



UNIVERSITAS WIRARAJA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : lppm@wiraraja.ac.id Website : lppm.wiraraja.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 095/SP.HCP/LPPM/UNIJA/III/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Anik Anekawati, M.Si
Jabatan : Kepala LPPM
Instansi : Universitas Wiraraja

Menyatakan bahwa :

1. Nama : Dr. Mohammad Hidayatullah, M.I.Kom.
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah melakukan cek plagiarisme ke LPPM menggunakan *software turnitin.com* untuk artikel dengan judul "**TEORI SOSIAL EMPIRIK**" dan mendapatkan hasil similarity sebesar 45%

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.

Sumenep, 21 Maret 2022

Kepala LPPM,

Dr. Anik Anekawati, M.Si.

NIDN. 0714077402

Teori Sosial Empirik

by Mohammad Hidayaturrahman

Submission date: 16-Mar-2022 03:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 1785500105

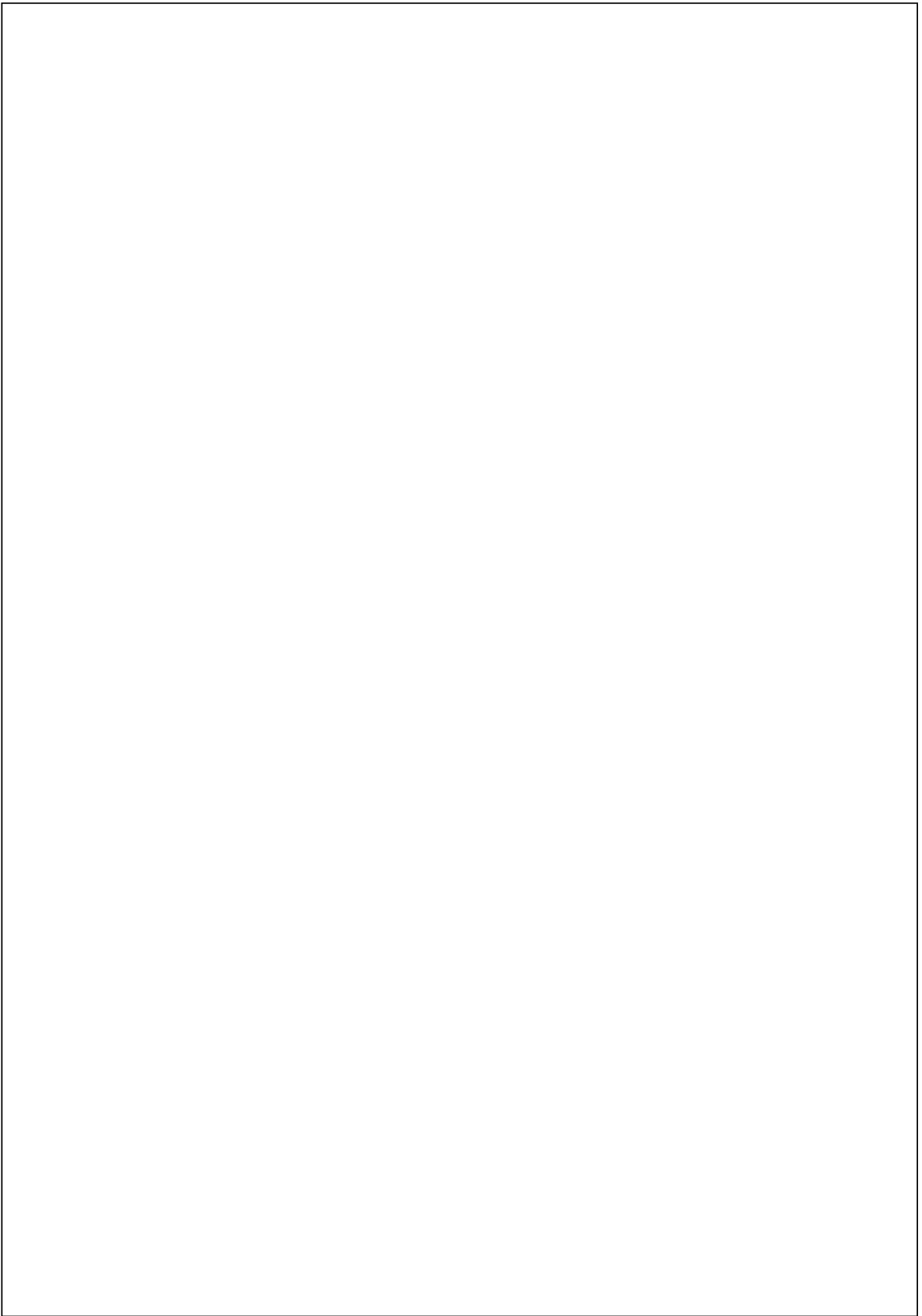
File name: Teori_Sosial_Empirik.pdf (1.31M)

Word count: 39353

Character count: 268852

TEORI SOSIAL EMPIRIK

**Untuk Penelitian Ilmiah
Skripsi, Tesis dan Disertasi**



TEORI SOSIAL EMPIRIK

**Untuk Penelitian Ilmiah
Skripsi, Tesis dan Disertasi**

Tim Penulis:

Dr. Mohammad Hidayatullah, MIKom

Dr. dr. Moch. Moerod

Dr. Nisful Laily, S.Pd, M.Pd

Dr. Yossita Wisman, SE, M.M.Pd

Dr. Lorentius Goa, M.Th

Dr. Teresia Noiman Derung, S.Pd, M.Th

Dr. Anak Agung Putu Sugiantiningsih, S.IP, M.AP

H.M. Yahya, SE, SH, M.AP

Drs. Eko Agusrianto, M.Si

Endang Handayani, S.Pd, M.Pd



TEORI SOSIAL EMPIRIK

Untuk Penelitian Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi)

Tim Penulis : Dr. Mohammad Hidayatullah, MIKOM
Dr. dr. Moch. Moerod
Dr. Nisful Laily, S.Pd, M.Pd
Dr. Yossita Wisman, SE, M.M.Pd
Dr. Lorentius Goa, M.Th
Dr. Teresia Noiman Derung, S.Pd, M.Th
Dr. Anak Agung Putu Sugiantiningsih, S.IP, M.AP
H.M. Yahya, SE, SH, M.AP
Drs. Eko Agusrianto, M.Si
Endang Handayani, S.Pd, M.Pd

Penata isi : Rofiq Ma'mun
Desain sampul : Muhammad Faliqul Ishbah

Diterbitkan Oleh:

EduLitera (Anggota IKAPI)

Imprint **PT. Literindo Berkah Karya**

Jl. Apel No. 28 A Semanding, Sumbersekar,

Dau, Kab. Malang (65151)

Telp./Fax: (0341) 5033268

Email: eduliteramalang@gmail.com

Cetakan I : 2020

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. Mohammad Hidayatullah, MIKOM ... [et.al]

Teori Sosial Empirik - Untuk Penelitian Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi) /

Dr. Mohammad Hidayatullah, MIKOM ... [et.al] - Malang, EduLitera 2020

210 hlm, 16 x 23 cm

ISBN : 978-623-7454-60-1

1. Sosiologi

I. Judul

II. Dr. Mohammad Hidayatullah, MIKOM... [et.al]



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan alam semesta, Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala nikmat, karunia dan pertolongannya buku yang berjudul “Teori Sosial Empirik Untuk Penelitian Ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi” ini bisa diselesaikan. Tentu saja, ada banyak kekurangan di dalam penulisan dan penyusunannya. Berharap kepada pembaca untuk menyampaikan masukan, kritik dan saran, untuk perbaikan di masa mendatang.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan maupun penerbitan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga kontribusi semua pihak akan menjadi kebaikan dan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik dan lebih luas lagi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT.

Besar harapan kami buku kecil dan sederhana ini, bisa memberi sedikit sumbangsih bagi kemajuan ilmu pengetahuan, pembangunan peradaban pada masa mendatang. Khususnya sebagai bahan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada para mahasiswa yang hendak atau sedang menyelesaikan tugas akhir, baik skripsi, tesis maupun disertasi, atau pun penelitian lain.

Malang, 1 Mei 2020

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Kata Pengantar	5
Daftar Isi	7
Pendahuluan	9
Teori Pertukaran Sosial	11
• Mohammad Hidayaturrahman	
Teori Perilaku	17
• Moch. Moerad	
Teori Perilaku Sosial	35
• Nisful Laily	
Teori Peran	41
• Lorentius Goa	
Teori Interaksi Sosial	51
• Teresia Noiman Derung	
Teori Partisipasi	75
• Yossita Wisman	

Teori Kebijakan Publik	87
• HM. Yahya	
Teori Implementasi Kebijakan Publik	115
• Nisful Laily	
Teori Evaluasi Kebijakan Publik.....	135
• HM. Yahya	
Teori Interaksi Simbolik	153
• Teresia Noiman Derung	
Teori Jaringan Sosial	161
• Nisful Laily	
Teori Realitas Sosial	173
• Mohammad Hidayaturrahman	
Teori Struktural Fungsional	181
• Eko Agusrianto	
Teori Kebutuhan.....	187
• Endang Handayani	
Teori Perubahan Sosial.....	195
• Anak Agung Putu Sugiantiningsih	
Penutup	203
Biodata Penulis.....	205

PENDAHULUAN

Teori sosial dapat dipahami sebagai teori yang empirik, kelahirannya dari tradisi induktif. Sebagai catatan, ada kalangan yang masih belum memahami teori. Teori oleh sebagian orang masih disamakan dengan omong kosong atau *omong doang* alias *omdo*. Malah terkadang teori diletakkan pada posisi yang tidak lebih dari sekadar bualan semata, *no action talk only* (nato).

Padahal teori dalam ilmu sosial lahir dari pengalaman panjang pengamatan secara kasat mata dan logis, yang sebelum diakui sebagai teori sudah diuji keabsahannya. Maka teori dalam ilmu sosial lahir dari praktik, yang tidak hanya dipraktikkan satu atau dua orang, tapi juga oleh masyarakat secara umum. Sehingga teori tidak lahir dari ruang hampa, apalagi dari sekadar omong kosong.

Betapa pentingnya teori dalam kehidupan sosial, sebab teori dapat menjelaskan fenomena yang terjadi dan dialami oleh manusia pada saat ini. Tidak hanya itu, teori bahkan bisa meramalkan masa depan. Bukan berdasarkan ramalan dukun atau ahli nujum, tapi

berdasarkan gejala yang bisa dianalisis berdasarkan data empirik. Di sini pentingnya menautkan apa yang dilakukan dengan teori. Terlebih lagi bagi mereka yang berada di lingkup dunia akademik dan masyarakat yang semakin rasional.

TEORI PERTUKARAN SOSIAL

Mohammad Hidayaturrahman

Teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) erat kaitannya dengan tindakan sosial (*social action*). Seperti yang dikemukakan Saifuddin dalam (Wirawan, 2014: 171), teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) berkaitan dengan saling memberi dan menerima (*take and give*) atau tukar-menukar antarindividu (Saifuddin, 2001: 4). Menurut George Homans, dalam teori pertukaran sosial, saat ada dua orang atau lebih yang saling berhubungan dan berinteraksi, setiap orang dari masing-masing pihak yang berhubungan dan berinteraksi saling mempengaruhi sikap dan perilaku sosial, dalam batas tertentu. Semakin sering tindakan yang dilakukan oleh seseorang dihargai oleh orang lain, maka sering pula orang tersebut mengerjakan tindakan. (Homans, 1961: 30, 54; Homans, 1974: 106).

Wirawan menyebut teori pertukaran (*exchange theory*) George Homans, mengakui bahwa fakta sosial (*social fact*) mempunyai pengaruh yang menentukan dalam perubahan tingkah laku individu (*individual behavior*), yang menyebabkan munculnya fakta sosial baru lainnya. Homans menyebut bahwa sebenarnya faktor utamanya adalah variabel yang bersifat psikologi. Dalam pandangan teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) motivasi merupakan hal yang bersifat personal. Meski begitu, motivasi tetap akan terpengaruh oleh lingkungan dan budaya. Sehingga dana (*cost*) yang diberikan oleh seseorang akan diharapkan untuk mendapatkan imbalan (*reward*). Namun ada kalanya seseorang yang mengeluarkan tidak berharap kembalinya dana yang dikeluarkan dalam bentuk materi atau uang, tetapi cukup dengan perasaan puas karena penghargaan yang diperoleh dari dana yang dikeluarkan. Dengan memberikan tekanan pada individu dan konsep-konsep penghargaan (*reward*), dengan beban atau biaya (*cost*) dan aktivitas (*activity*) Homans tetap mengacu langsung tentang individu atau kelompok dua orang. Sifat hipotesisnya mengenai seseorang dan orang lain (*person and other*). Adapun Peter Blau secara umum mengamati jenis serupa dari interaksi pertukaran perkara, terutama dengan memberikan tekanan bahwa tipe penghargaan (*reward*) dan beban atau ongkos (*cost*) termasuk di dalamnya. Peter Blau tampaknya mencoba untuk merinci bagaimana struktur sosial itu membuat mapan pertukaran, dan selain itu ia juga mengemukakan cara-cara stabilisasi menimbulkan kekuatan-kekuatan oposisi yang bahkan cenderung mengubah pertukaran yang telah mapan (Wirawan, 2014: 172-183). Bagi Homans, apa pun bisa memiliki nilai (*value*) bagi manusia, baik secara positif maupun negatif. Dalam bentuk yang positif bisa menjadi hadiah (*reward*), adapun dalam bentuk yang negatif adalah pemberian dalam bentuk sanksi (*punishment*) (Homans, 1946: 27).

74 Hasil, teori pertukaran sosial sebenarnya dengan bahasa lain, hendak mengatakan bahwa dalam setiap interaksi sosial terdapat unsur biaya (*cost*), imbalan (*reward*) dan keuntungan (*profit*). Sehingga, biaya, imbalan dan keuntungan merupakan kata kunci dalam teori pertukaran sosial. Pertukaran sosial selalu menyertakan adanya imbalan (*reward*) dan keuntungan (*profit*) selain tentu saja adanya biaya (*cost*). Di sini dijelaskan, seseorang memandang hubungannya dengan orang lain dalam kaitannya dengan keseimbangan antara biaya (*cost*) dan imbalan (*reward*) dalam hubungan tersebut yang berujung pada keuntungan (*profit*). Jenis hubungan dan kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain.

Dalam teori pertukaran sosial, objek kajiannya jelas pada perilaku nyata. Dengan asumsi bahwa, suatu hubungan hanya bisa terjadi apabila kedua belah pihak yang berinteraksi sama-sama memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut. Jadi setiap pihak yang saling berhubungan, dalam waktu yang bersamaan keduanya dibiarkan untuk mengejar kepentingan pribadi masing-masing melalui pertukaran-pertukaran yang terjadi dan disepakati. Dengan demikian, maka apa saja yang diinginkan di antara keduanya baru bisa terjadi. Maka, pertukaran sosial meniscayakan adanya interaksi sosial, sebab tidak terjadi pertukaran jika tidak ada interaksi sosial. Itu sebabnya Homans lebih mengamati hubungan pertukaran yang terjadi pada tingkat individu. Dalam analisisnya, Homans membatasi diri pada pertukaran tatap muka atau pertukaran langsung. Dalam hubungan pertukaran hal yang tak dapat dihindarkan adalah biaya (*cost*), imbalan (*reward*) dan keuntungan (*profit*). Bagi Homans, konsep tentang imbalan (*reward*) sama dengan dukungan (*support*) sedangkan biaya (*cost*) sama dengan hukuman (*punishment*) dalam psikologi perilaku. Dalam

seluruh karyanya, Homans menganalisis hubungan pertukaran sosial pada tingkat individu atau level mikro. Berkaitan dengan teori pertukaran sosial, George Ritzer menyebut bahwa secara individual, orang lain sangat membutuhkan penghargaan dari orang lain, dan sebagian besar kebutuhan penghargaan didapat dari orang (Ritzer, 2011: 515). Secara pasti, teori pertukaran sosial juga membicarakan aktor, yang dipandang sebagai pihak dalam melakukan tindakan memiliki tujuan. Aktor bertindak selalu didasari untuk merealisasikan tujuan (Suyanto, 2010: 264).

Peter Blau melihat pertukaran sosial layaknya seperti tukar-menukar yang bersifat jual beli dalam aktivitas ekonomi. Di mana dalam interaksi sosial yang melibatkan satu orang atau lebih, satu kelompok atau lebih, dilihat sebagai pertukaran menyangkut prinsip ekonomi terjadi. Misalnya seseorang yang telah memberi imbalan berupa materi kepada orang lain, maka orang yang telah memberi imbalan tersebut akan berharap akan mendapat imbalan materi juga. Maksudnya adalah bahwa kebaikan yang dilakukan oleh orang lain akan diharapkan mendapat imbalan kebaikan pula. Orang yang telah memberi makan siang kepada orang lain, akan berharap orang yang telah diberinya makan siang akan mengundangnya juga untuk makan siang (Blau, 1964).

Menurut Poloma, sedikit berbeda dengan George Homans, Peter Blau melihat bahwa pertukaran sosial juga tidak hanya terbatas pada pertukaran yang bersifat individual, namun juga bersifat sosial. Pertukaran tidak hanya melibatkan antara satu orang atau lebih, namun juga antara kelompok (unit) dalam kehidupan sosial. Peter Blau menarik teori pertukaran sosial dari level mikro ke level makro, dari peran aktor ke dalam peran masyarakat atau struktur sosial. Ini yang membedakan Homans dengan Blau, Homans cenderung menitikberatkan pandangannya

pada aktor, sementara Blau menitikberatkan pada struktur sosial. (Poloma, 1984: 94-95).

Daftar Pustaka

- Blau, Peter. (1964). *Exchange And Power In Social Life*. NY: John Wiley & Sons
- Homans, George (1961) *Social Behaviour: Its Elementary Forms*. New York: Harcourt, Brace & World, Inc.
- (1974) *Social Behaviour: Its Elementary Forms*. Rev. ed. New York: Harcourt, Brace & World, Inc.
- Poloma, M (1984). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: CV Rajawali.
- Ritzer, George (2011) *Teori Sosiologi Modern Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Saifuddin, Anwar (2001) *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Suyanto & Sutinah, (2010). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Pendekatan Alternatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wirawan, I (2014). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.

TEORI PERILAKU

Moch. Moerad

49

Perilaku dari pandangan biologis merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Jadi, perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, perilaku manusia mempunyai bentangan yang sangat luas, mencakup perjalanan, berbicara, bereaksi, berpakaian, dan lain sebagainya. Bahkan kegiatan internal (*internal activity*) seperti berpikir, persepsi, dan emosi juga merupakan perilaku manusia. Dapat dikatakan bahwa perilaku adalah apa yang dikerjakan oleh manusia tersebut, baik yang dapat diamati secara langsung atau secara tidak langsung

Perilaku dan gejala perilaku yang tampak pada kegiatan makhluk hidup tersebut dipengaruhi baik oleh faktor genetik (keturunan) dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor genetik dan lingkungan itu merupakan penentu dari perilaku makhluk hidup termasuk perilaku manusia. Hereditas atau faktor keturunan adalah konsepsi dasar atau modal untuk perkembangan perilaku makhluk hidup itu untuk selanjutnya.

Sedangkan lingkungan adalah kondisi atau lahan untuk perkembangan perilaku tersebut. Suatu mekanisme pertemuan antara kedua faktor dalam rangka terbentuknya perilaku tersebut disebut proses belajar (*learning process*).

Skinner (1938) seorang ahli perilaku mengemukakan bahwa perilaku merupakan hasil hubungan antara perangsang (*stimulus*) dan tanggapan dan respons. Ia membedakan adanya dua respons, yakni:

- 1) Responden respons atau *reflexive response*, ialah respons yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan yang semacam ini disebut *eliciting* stimulasi, karena menimbulkan respons-respons yang relatif tetap. Responden respons (*respondent behavior*) ini mencakup juga emosi respons atau *emotional behavior*. *Emotional response* ini timbul karena hal yang kurang menyenangkan manusia yang bersangkutan. Sebaliknya, hal-hal yang menyenangkan pun dapat menimbulkan perilaku emosional.
- 2) *Operant response* atau instrumental respons, adalah respons yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang tertentu. Perangsang semacam ini disebut *reinforcing stimulus* atau *reinforcer*, karena perangsangan-perangsangan tersebut memperkuat respons yang telah dilakukan oleh organisme. Oleh sebab itu, perangsang yang demikian itu mengikuti atau memperkuat sesuatu perilaku tertentu yang telah dilakukan. Dengan kata lain responsnya akan lebih intensif atau lebih kuat lagi.

Di dalam kehidupan sehari-hari, respons jenis pertama (*respondent response* atau *respondent behavior*) sangat terbatas keberadaannya pada manusia. Hal ini disebabkan karena hubungan yang pasti antara stimulus dan respons kemungkinan

untuk memodifikasinya adalah sangat kecil. Sebaliknya *operant response* atau *instrumental behavior* merupakan bagian terbesar dari perilaku manusia, dan kemungkinan untuk memodifikasi sangat besar, bahkan dapat dikatakan tidak terbatas. Fokus teori Skinner adalah pada respons atau jenis perilaku yang kedua.

78

Untuk membentuk jenis respons atau perilaku ini perlu diciptakan adanya suatu kondisi tertentu, yang disebut *operant conditioning* (Notoatmodjo, 2011: 135). Prosedur pembentukan perilaku dalam *operant conditioning* ini menurut Skinner (1938) adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan identifikasi tentang hal-hal yang merupakan penguat atau *reinforcer* berupa hadiah-hadiah atau *rewards* bagi perilaku yang akan dibentuk.
- 2) Melakukan analisis untuk mengidentifikasi komponen-komponen kecil yang membentuk perilaku yang dikehendaki. Kemudian komponen-komponen tersebut disusun dalam urutan yang tepat untuk menuju kepada terbentuknya perilaku yang dimaksud.
- 3) Dengan menggunakan secara urut komponen-komponen itu sebagai tujuan-tujuan sementara, mengidentifikasi *reinforcer* atau hadiah untuk masing-masing komponen tersebut.
- 4) Melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan urutan komponen yang telah tersusun. Apabila komponen pertama telah dilakukan, maka hadiahnya diberikan. Hal ini akan mengakibatkan komponen atau perilaku (tindakan) tersebut cenderung akan sering dilakukan. Kalau perilaku ini sudah terbentuk, kemudian dilakukan komponen (perilaku) yang kedua yang diberi hadiah (komponen pertama tidak memerlukan hadiah lagi), demikian berulang-ulang, sampai komponen kedua terbentuk. Setelah itu dilanjutkan dengan

komponen ketiga, keempat dan selanjutnya sampai seluruh perilaku yang diharapkan terbentuk.

Sedangkan dalam bentuk perilaku, secara lebih operasional perilaku dapat diartikan suatu respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar objek tersebut. Respon ini terbentuk dua macam, yakni:

- 1) Bentuk pasif, adalah respons internal, yaitu yang terjadi di dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain, misalnya berpikir, tanggapan atau sikap batin dan pengetahuan. Misalnya, seorang ibu tahu bahwa imunisasi itu dapat mencegah suatu penyakit tertentu, meskipun ibu tersebut tidak membawa anaknya ke Puskesmas untuk diimunisasi. Contoh lain, seorang yang menganjurkan orang lain untuk mengikuti keluarga berencana meskipun ia sendiri tidak ikut keluarga berencana. Dari kedua contoh tersebut terlihat bahwa ibu tersebut tahu manfaat imunisasi dan contoh kedua, orang tersebut telah mempunyai sikap yang positif untuk mendukung keluarga berencana, meskipun mereka sendiri belum melakukan secara konkret terhadap kedua hal tersebut. Oleh sebab itu perilaku mereka ini masih terselubung (*covert behavior*), atau perilaku tertutup.
- 2) Bentuk aktif, yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi secara langsung. Misalnya pada kedua contoh tersebut, ibu sudah membawa anaknya ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan lain untuk imunisasi, dan pada kasus kedua sudah ikut keluarga berencana dalam arti sudah menjadi akseptor Keluarga Berencana (KB). Oleh karena perilaku mereka ini sudah tampak dalam bentuk tindakan nyata, maka disebut '*overt behavior*'.

Proses Perubahan Perilaku

Perilaku manusia khususnya yang berkaitan dengan perilaku kesehatan bersifat kompleks. Beberapa faktor yang mempengaruhi derajat perilaku sehat seseorang yang tercakup dalam faktor internal dan eksternal. Pada hakikatnya faktor inilah yang perlu diupayakan agar dapat memiliki kualitas hidup yang diharapkan, karena kualitas hidup berkaitan erat dengan kesehatan, panjang umur, pekerjaan, kebebasan dan keamanan, pendidikan dan bahkan keindahan.

Perilaku hidup sehat akan mempengaruhi kualitas hidup, ada empat faktor yang mempengaruhi hidup sehat yaitu motivasi, kemampuan, persepsi, dan kepribadian. Motivasi adalah suatu kekuatan yang mendorong orang berperilaku tertentu. Kemampuan menunjukkan kapasitas seseorang. Persepsi adalah bagaimana seseorang menafsirkan informasi secara seksama, sehingga perilakunya sesuai dengan yang diinginkan, sedang kepribadian adalah karakteristik seseorang yang meliputi pengetahuan, sikap, keterampilan dan kemauan.

Motivasi dalam Perilaku

Perilaku kesehatan seperti halnya perilaku manusia yang lain, dimotivasi oleh suatu stimulus/ rangsangan yang berasal dari lingkungan seseorang. Respon yang timbul dari suatu stimulus dapat berhubungan atau tidak berhubungan dengan kesehatan. Motivasi yang menimbulkan perilaku kesehatan seringkali tidak hanya berkaitan dengan kesehatan tetapi dengan keindahan. Dimensi motivasi terhadap perilaku tersebut, berarti bersifat dinamik dan statik, dan dapat mencerminkan tingkat pencapaian seseorang terhadap perilaku tertentu. Mengubah perilaku terbukti

efektif untuk mengubah banyak faktor masalah kesehatan. Pemahaman terhadap fase-fase ini dapat membantu petugas kesehatan untuk menuntun perubahan pada klien dari satu fase ke fase berikutnya.

- Fase prekontemplasi. Pada fase ini klien tidak memiliki kesadaran untuk berubah. Promosi kesehatan pada fase ini harus difokuskan pada meningkatkan kesadaran terhadap perilaku tidak sehat.
- Fase kontemplasi. Fase mulai terjadi perubahan perilaku. Klien sudah memiliki motivasi untuk berubah. Mendorong klien ke arah perubahan merupakan tindakan yang sesuai untuk fase ini.
- Fase komitmen. Klien sudah memiliki niat serius untuk berubah. Pada fase ini petugas kesehatan membantu menterjemahkan niat menjadi rencana tindakan, strategi mengatasi masalah dan mengidentifikasi sumber-sumber yang mendukung.
- Fase tindakan. Klien mengubah perilakunya. Dukungan selama fase ini dapat berupa konsultasi teratur, kelompok pendukung melalui teman, keluarga, telepon atau kombinasi.
- Fase maintenens. Klien berusaha menjaga perilaku barunya. Strategi koping yang telah diidentifikasi sebelumnya sangat diperlukan. Selain itu dukungan yang berkelanjutan juga vital karena sebagian besar klien gagal pada awal fase maintenens ini.
- Fase relaps. Pada fase ini mereka kembali pada fase lamanya. Petugas kesehatan harus mengidentifikasi alasan terjadinya relaps dan mengarahkan lagi ke fase kontemplasi.
- Fase keluar. Fase dimana perubahan perilaku kesehatan telah terjadi dan dapat dijaga keberlanjutannya.

Konsep Risiko Sebagai Penentu Perubahan Perilaku

Bila perilaku individu diterapkan pada situasi kesehatan, maka yang dianggap sebagai faktor penentu respon individu adalah tingkat beratnya risiko atau penyakit. Heper, Holman dan Dawes (1994) dalam (Emilia, 2008: 30) menggambarkan risiko kesehatan sebagai berikut:

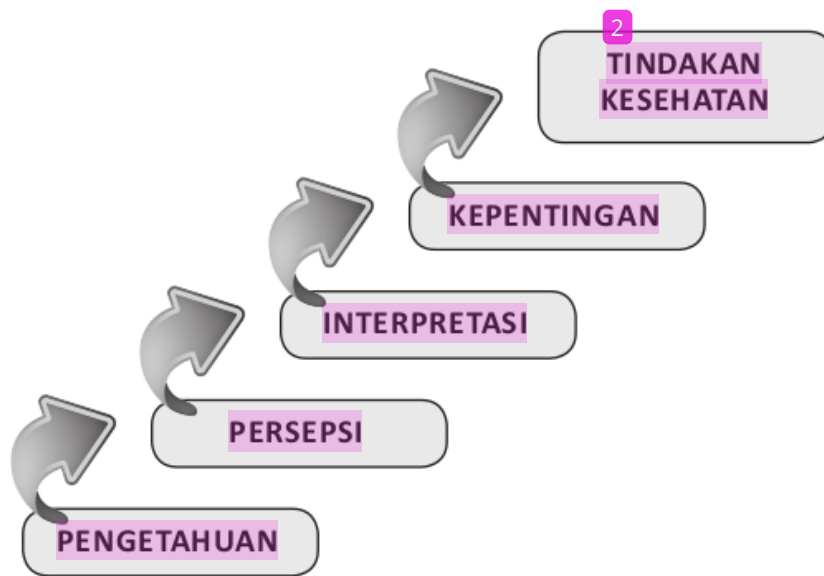
“Konsep risiko didasarkan pada adanya hubungan antara penyakit dan beberapa atribut atau faktor risiko. Pada kelompok dengan faktor risiko tertentu memiliki insidensi penyakit lebih tinggi dibanding bila tidak ada faktor risiko. Meskipun sebagian proporsi kelompok yang berisiko menderita penyakit, tetapi ada sebagian lain yang tidak terkena penyakit”.

Secara umum, bila seseorang mengetahui ada risiko terhadap kesehatan maka secara sadar orang tersebut akan menghindari risiko tersebut. Namun tidak sesederhana itu. Risiko adalah konsep sehari-hari, yang ada dalam semua aspek perilaku.

Hubungan Pengetahuan dan Perilaku Kesehatan

Kecenderungan seseorang untuk memiliki motivasi berperilaku kesehatan yang baik dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilannya. Hal ini didukung juga oleh insentif yang diperoleh dari masyarakat/ lingkungan (*socio environment*) agar perilaku tersebut berlanjut atau hilang.

Pendapat umum menyatakan bahwa adanya pengetahuan yang cukup akan memotivasi individu untuk berperilaku sehat. Pendapat ini mengacu pada model perilaku *knowledge-action*. Kenyataannya pengetahuan tidak cukup untuk mengubah perilaku.



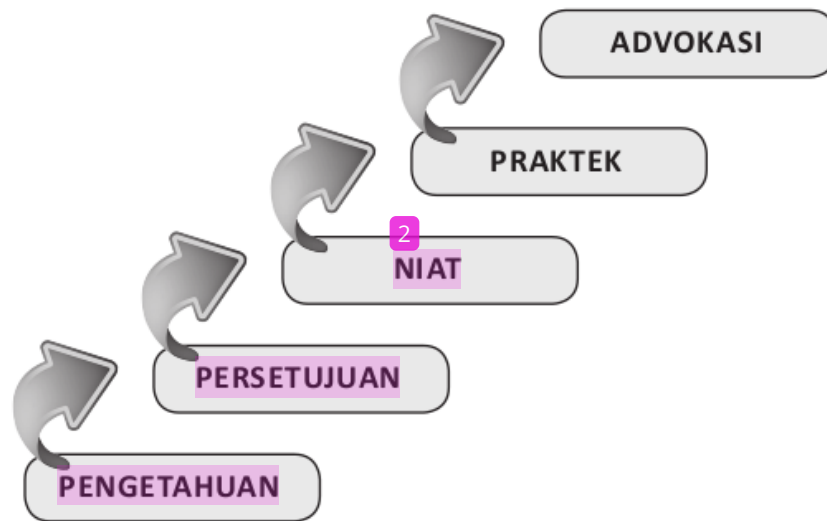
Gambar:

Tahap-tahap perubahan pengetahuan menjadi perilaku

Sumber: Fishbein & Ajzen, 1975

Pengetahuan berubah secara bertahap sebelum menjadi perilaku seperti pada gambar di atas sebagai berikut:

- Pada beberapa kasus pengetahuan cukup untuk mengubah perilaku, tetapi pada kasus yang lain tidak cukup atau bahkan tidak diperlukan.
- Belum tentu orang selalu mengetahui perilaku kesehatan yang seharusnya, dan belum tentu bila orang sudah berpengetahuan dijamin akan berubah perilakunya.
- Bila pengetahuan dianggap diperlukan, berikan sesuai bahasa audiens.
- Perubahan pengetahuan menjadi tindakan dan perilaku tergantung pada faktor internal dan eksternal yang meliputi nilai, sikap dan kepercayaan.
- Bagi sebagian besar individu mengubah pengetahuan menjadi perilaku memerlukan keterampilan tertentu.



Gambar

Tahap-tahap perubahan pengetahuan menjadi advokasi

Fishbein dan Ajzen, 1975

Gambar di atas merupakan model yang seringkali digunakan untuk menggambarkan terjadinya tahapan perubahan perilaku yang ingin dicapai dan ruang lingkup materi komunikasi yang bisa digunakan untuk mencapai perubahan perilaku tersebut. Setiap orang berbeda-beda dalam menapaki tahapan-tahapan di atas, ada yang cepat ada yang lambat, ada yang meloncati tahapan ke tahapan berikutnya tetapi ada juga yang turun kembali ke tahapan sebelumnya. Semua itu merupakan proses seseorang atau sekelompok orang dalam perubahan perilakunya (Emilia, 2008: 33-34).

Hubungan Sikap, Nilai dan Perilaku

Agar dapat menjadi perilaku maka pengetahuan harus masuk dalam diri seseorang sehingga mempengaruhi sikap dan

nilainya terhadap kesehatan. Nilai seseorang terhadap sesuatu akan membentuk sikap orang tersebut. Pemahaman antara keterkaitan antara nilai dan sikap akan mendorong pemahaman bila terjadi ketidakselarasan antara pengetahuan dan perilaku (terjadi disonansi). Orang merasa nyaman bila antara pengetahuan dan perilaku mereka selaras, namun bila tidak selaras orang akan menunjukkan gejala² menghilangkan atau menghindari ketidakselarasan tersebut. Sehingga jelas disini bahwa tidak ada garis linier antara sikap menjadi perilaku. Seringkali sikap berubah dahulu baru perilaku atau sebaliknya perilaku berubah dahulu baru sikapnya (F²²amilia, 2008: 34). Ketidakselarasan yang ditunjukkan di atas oleh Sheth dan Frazier (1982) diformulasikan dalam model bauran strategi perubahan perilaku.

Bila sikap dan perilaku konsisten ke arah melakukan perilaku diperlukan proses penguatan untuk mempertahankan perilaku tersebut. Hal ini dapat dikerjakan dengan memperkuat sikap atau perilaku. Bila sikap positif dan perilaku tidak dilakukan perlu dikerjakan proses induksi yang ditujukan untuk meminimalkan² atau menghilangkan halangan sesioekonomik, waktu dan tempat. Bila perilaku dilakukan namun sikap negatif, tindakan tepat adalah dilakukan rasionalisasi² misalnya menghubungkan ANC dengan kesehatan ibu dan bayi. Tidak adanya sikap dan perilaku maka dilakukan proses konfrontasi misalnya mengingatkan orang tentang risiko tidak melakukan²² olahraga terhadap kesehatan. Dari deskripsi tersebut tampak bahwa perilaku dapat dimotivasi oleh psikologis (internal) dan lingkungan (eksternal) yang tentu saja dipengaruhi oleh komponen intelektual (*kognitif*) dan emosional (*afektif*).

Model Perubahan Perilaku

Pemahaman model pengetahuan-sikap-perilaku memberikan arah dalam menentukan tujuan komunikasi, menformulasikan pesan kesehatan dan menetapkan cara mencapai tujuan tersebut. Proses ini sangat tergantung pada semacam kepercayaan (*belief*) yang dimiliki individu/ sasaran. Misalnya, dengan atribut yang sama akan dirasakan berbeda oleh individu yang berbeda karena memiliki kepercayaan yang berbeda.

Model kepercayaan kesehatan (*health-belife*). Model *health-belief* (Rosenstock, 1974) merupakan model perilaku kesehatan yang paling tua. Prinsip dasar dari model ini adalah bahwa cara individu mempersepsi akan memberikan motivasi pada perilakunya. Kesiapan untuk melakukan tindakan kesehatan berasal dari persepsi individu akan kerentanannya terhadap penyakit. Misalnya seorang ibu bersikeras untuk imunisasi selama kehamilan, bila ibu ini percaya dan takut anaknya terkena penyakit dan juga bila ibu percaya bahwa imunisasi efektif untuk menghilangkan bahaya. Jadi adanya tindakan kesehatan tergantung dari tiga hal:

- a. Adanya motivasi yang cukup untuk melakukan tindakan.
- b. Adanya kepercayaan bahwa seseorang rentan terhadap masalah kesehatan tersebut.
- c. Adanya kepercayaan bahwa melakukan sesuatu akan mengurangi kerentanan dengan biaya yang terjangkau.

Teori ini diperluas dengan memasukkan aspek *self-efficacy* yaitu kepercayaan bahwa seseorang mampu melakukan perubahan tersebut (Emilia, 2008).

Model disonansi kognitif (*cognitive-disonance*). Ada beberapa teori sikap yang didasarkan pada kenyataan bahwa orang mencari

konsistensi internal antara kepercayaan, sikap dan perilakunya karena secara psikologis akan dirasakan nyaman. Keadaan inkonsistensi akan menimbulkan upaya untuk menghindari atau menghilangkan inkonsistensi tersebut (disebut disonan). Teori yang paling berpengaruh adalah teori disonansi kognitif (*cognitive dissonance theory*) oleh Festinger (1957). Teori ini mengupas hubungan antara berbagai kepercayaan atau kognisi. Kepercayaan atau kognisi dapat tidak berhubungan, konsisten (konsonan) atau inkonsisten (disonan artinya dalam konflik). Teori ini mengatakan bahwa orang yang mengalami disonansi akan berusaha mengurangi dan menghindari dari paparan. Disonansi dapat dikurangi dengan beberapa cara seperti menambah kepercayaan yang lain/ baru, mengubah kepercayaan atau mengubah tingkat kepentingan kepercayaan (Emilia, 2008).

Teori Belajar Sosial (*Social Learning*)

Teori *social-learning* (atau sering disebut teori *social-cognitive*) dikenalkan oleh Bandura (1977) memiliki dasar bahwa perilaku ditentukan oleh harapan dan insentif. Secara khusus perilaku dipengaruhi oleh harapan tentang:

- Respon lingkungan (kepercayaan bahwa suatu perilaku berhubungan dengan lingkungannya).
 - Konsekuensi tindakan (yaitu bagaimana perilaku mempengaruhi tujuan).
 - Kompetensi melakukan perilaku sehingga mempengaruhi tujuan.
 - Insentif adalah nilai dari suatu tujuan, dapat berupa status kesehatan, penampilan yang lebih baik atau merasa lebih baik.
- Bila diuraikan lebih jauh, teori ini mengemukakan bahwa: Pertama, Bandura berpendapat manusia dapat berfikir dan

mengatur tingkah lakunya sendiri; sehingga mereka bukan semata-mata bidak yang menjadi obyek: pengaruh lingkungan. Sifat kausal bukan dimiliki sendirian oleh lingkungan, karena orang dan lingkungan saling mempengaruhi. *Kedua*, Bandura menyatakan, banyak aspek fungsi kepribadian melibatkan interaksi orang itu dengan orang lain. Dampaknya, teori kepribadian yang memadai harus memperhitungkan konteks sosial di mana tingkah laku itu diperoleh dan dipelihara.

Teori belajar sosial (*social learning theory*) dari Bandura, didasarkan pada konsep saling menentukan (*reciprocal determinism*), tanpa penguatan (*beyond reinforce*), dan pengaturan diri/ berfikir (*self-regulation/ cognition*).

Determinis resiprokal. Pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal-balik yang terus menerus antara determinan kognitif, behavioral dan lingkungan. Orang menentukan/ mempengaruhi tingkah lakunya dengan mengontrol kekuatan lingkungan, tetapi orang itu juga dikontrol oleh kekuatan lingkungan itu. Determinis resiprokal adalah konsep yang penting dalam teori belajar sosial Bandura, menjadi pijakan Bandura dalam memahami tingkah laku. Teori belajar sosial memakai saling determinis sebagai prinsip dasar untuk menganalisis fenomena psiko-sosial di berbagai tingkat kompleksitas, dari perkembangan intrapersonal sampai tingkah laku interpersonal serta fungsi interaktif dari organisasi dan sistem sosial.

Beyond reinforce. Bandura memandang teori Skinner dan Hull terlalu bergantung kepada *reenforcement*. Jika setiap unit respon sosial yang kompleks harus dipilah-pilah untuk direnforce satu per satu, bisa jadi orang malah tidak belajar apapun. Menurutnya, *reenforcement* penting dalam menentukan apakah suatu tingkah

laku akan terus terjadi atau tidak, tetapi itu bukan satu-satunya pembentuk tingkah laku. Orang dapat belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati dan kemudian mengulang apa yang dilihatnya. Belajar melalui observasi tanpa ada *reenforcement* yang terlibat, berarti tingkah laku ditentukan oleh antisipasi konsekuensi, itu merupakan pokok teori belajar sosial.

Self-regulation/ cognition. Teori belajar tradisional sering terhalang oleh ketidaksenangan atau ketidakmampuan mereka untuk menjelaskan proses kognitif. Konsep Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri (*self regulation*), mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, mengadakan konsekuensi bagi tingkah laku sendiri. Kemampuan kecerdasan untuk berfikir simbolik menjadi sarana yang kuat untuk menangani lingkungan, misalnya dengan menyimpan pengalaman (dalam ingatan) dalam wujud verbal dan gambaran imajinasi untuk kepentingan tingkah laku pada masa yang akan datang. Kemampuan untuk menggambarkan secara imajinatif hasil yang diinginkan pada masa yang akan datang mengembangkan strategi tingkah laku yang membimbing ke arah tujuan jangka panjang.

Teori Reasoned Action

Teori ini dikenalkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) yang menyatakan bahwa perilaku dapat diramal dari minat orang untuk melakukan perilaku tersebut. Minat adalah fungsi sikap terhadap perilaku dan sikap kolega, serta keluarga. Sikap merupakan fungsi kepercayaan tentang konsekuensi perilaku dengan mempertimbangkan kepentingan hasil. Sikap juga merupakan fungsi harapan dari orang lain dengan mempertimbangkan motivasi untuk menerima (Emilia, 2008).

Model Fishbein dan Ajzen memiliki dua prinsip penting. *Pertama*, ada perbedaan jelas antara sikap terhadap objek atau masalah atau kejadian, dan sikap terhadap perilaku yang berkaitan dengan objek atau masalah atau kejadian. *Kedua*, Fishbein membedakan antara kepercayaan individu yang berkaitan dengan objek atau masalah, dan kepercayaan individu tentang penilaian orang lain terhadap suatu masalah (normatif). Oleh karena itu model ini memasukkan norma sosial sebagai faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku.

Teori *Protection Motivation*

Teori yang dikemukakan Rogers (1971) ini memiliki pendekatan yang mirip dengan teori *health-belief*. Teori ini dikembangkan semula sebagai model *fear-arousal* yang menerangkan munculnya motivasi karena ketakutan atau kecemasan akibat komunikasi yang bersifat "mengancam". Teori ini beranggapan bahwa orang memiliki motivasi untuk melindungi dirinya dari bahaya fisik, sosial dan psikologis (Rogers 1971, 1983).

Empat proses yang mengikuti perubahan sikap dan perilaku adalah:

- Persepsi terhadap besarnya bahaya atau masalah.
- Persepsi bahwa bahaya tersebut kemungkinan timbul (risiko).
- Persepsi tentang efektifitas alternatif tindakan yang dipromosikan (untuk menghindari dari risiko).
- Persepsi individu terhadap kemampuannya untuk melaksanakan tindakan.

Empat tahap proses ini dinilai secara keseluruhan melalui tahap penilaian bahaya atau masalah dan tahap penilaian tindakan.

Bila ada bahaya atau masalah dan ada tindakan yang efektif maka kemungkinan besar individu akan berubah. Namun bila bahaya atau masalah tidak dirasakan (tidak akan terjadi pada saya) dan atau tindakan yang diprogramkan tampak tidak efektif maka akan timbul respon yang keliru (Emilia, 2008).

Teori Mencoba

Bagozzi dan Warshaw (1990) mengembangkan teori mencoba yang memiliki dua elemen utama yaitu tujuan individu dan tujuan akhir. Teori ini menfokuskan pada tujuan individu dan tujuan akhir. Teori ini menfokuskan pada tujuan individu bukan pada pilihan perilakunya, dan teori ini memisahkan tahap mencoba tujuan individu dengan tujuan akhirnya. Dari teori ini hal-hal yang perlu dicatat adalah:

- Sikap individu terhadap mencoba suatu perilaku tergantung dari tiga faktor yaitu: sikap terhadap keberhasilan dan persepsi kemungkinan berhasil; sikap terhadap kegagalan dan persepsi kemungkinan gagal; dan sikap terhadap proses mencoba itu sendiri.
- Minat individu untuk mencoba ditentukan oleh sikapnya terhadap mencoba; norma sosial tentang mencoba; dan berapa kali individu tersebut telah mencoba.
- Mencoba perilaku yang sesungguhnya ditentukan oleh minat individu untuk mencoba; frekuensi mencoba sebelumnya; dan selang waktu dengan saat mencoba yang terakhir.

Daftar Pustaka

Abraham F (1982) *Modern Sociological Theory, AN Introduction*, London: Oxford University Press.

- Bandura, A. (1977). *Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change*. *Psychological Review*, 84, 191-215.
- 22 Emilia, O (2008). *Promosi Kesehatan Dalam Lingkup Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Pustaka Cendikia Press.
- Festinger, L (1957). *Theory of Cognitive Dissonance*, Evanston, IL: Row Peterson.
- Fishbein, M, & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Reading, MA: Addison-Wesley.
- Holman, J.P (1994). *Perpindahan Kalor*, Edisi Keenam, (Alih Bahasa Ir. E. Jasjfi, Msc, Erlangga), Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Notoatmojo S (2011). *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- 2 Rogers, E. M. dan F. F Shoemaker (1971). *Communication of Innovations*. New York. The Free Press.
- Rosenstock, I. M. (1974). *The Health Belief Model and Preventive Health Behavior*. *Health Education Monographs*, 2, 354-386.
- Skinner, B.F (1938). *The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis*. Cambridge Massachusetts: B.F. Skinner Foundation.

TEORI PERILAKU SOSIAL

Nisful Laily

¹⁷
Perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia (Rusli Ibrahim, 2001). Sebagai bukti bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai diri pribadi tidak dapat melakukannya sendiri melainkan memerlukan bantuan dari orang lain. Ada ikatan saling ketergantungan di antara satu orang dengan yang lainnya. Artinya bahwa kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung dalam kebersamaan. Untuk itu manusia dituntut mampu bekerja sama, saling menghormati, tidak mengganggu hak orang lain, toleran dalam hidup masyarakat.

Menurut Krech, Crutchfield dan Ballachey (1982) dalam Rusli Ibrahim (2001), perilaku sosial seseorang itu tampak dalam pola respons antar orang yang dinyatakan dengan hubungan timbal balik antar pribadi. Perilaku sosial juga identik dengan reaksi seseorang terhadap orang lain (Baron dan Byrne, 1991 dalam

Rusli Ibrahim, 2001). Perilaku itu ditunjukkan dengan perasaan, tindakan, sikap, keyakinan, kenangan, atau rasa hormat terhadap orang lain. Perilaku sosial seseorang merupakan sifat relatif untuk menanggapi orang lain dengan cara berbeda-beda. Misalnya dalam melakukan kerja sama, ada orang yang melakukannya dengan tekun, sabar, dan selalu mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sementara di pihak lain, ada orang yang bermalas-malasan, tidak sabaran dan hanya ingin mencari untung sendiri.

Perilaku sosial adalah aktifitas fisik dan psikis seseorang terhadap orang lain atau sebaliknya dalam rangka memenuhi diri atau orang lain yang sesuai dengan tuntutan sosial. Macam-macam perilaku sosial menurut Sarlito (2000: 150) dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Perilaku sosial (*social behavior*).

Yang dimaksud perilaku sosial adalah perilaku ini tumbuh dari orang-orang yang ada pada masa kecilnya mendapatkan cukup kepuasan akan kebutuhan inklusinya. Ia tidak mempunyai masalah dalam hubungan antar pribadi mereka bersama orang lain pada situasi dan kondisinya. Ia bisa sangat berpartisipasi, tetapi bisa juga tidak ikut-ikutan, ia bisa melibatkan diri pada orang lain, bisa juga tidak, secara tidak disadari ia merasa dirinya berharga dan bahwa orang lain pun mengerti akan hal itu tanpa ia menonjolkan diri. Dengan sendirinya orang lain akan melibatkan dia dalam aktifitas-aktifitas mereka.

b. Perilaku yang kurang sosial (*under social behavior*).

Perilaku ini timbul jika kebutuhan akan inklusi kurang terpenuhi, misalnya: sering tidak diacuhkan oleh keluarga semasa kecilnya. Kecenderungannya orang ini akan menghindari hubungan orang lain, tidak mau ikut dalam kelompok-kelompok,

menjaga jarak antara dirinya dengan orang lain, tidak mau tahu, acuh tak acuh. Pendek kata, ada kecenderungan introvert dan menarik diri. Bentuk tingkah laku yang lebih ringan adalah, terlambat dalam pertemuan atau tidak datang sama sekali, atau tertidur di ruang diskusi dan sebagainya. Kecemasan yang ada dalam ketidaksadarannya adalah bahwa ia seorang yang tidak berharga dan tidak ada orang lain yang mau menghargainya.

c. Perilaku terlalu sosial (*over social behavior*).

Psikodinamikanya sama dengan perilaku kurang sosial, yaitu disebabkan kurang inklusi. Tetapi pernyataan perilakunya sangat berlawanan. Orang yang terlalu sosial cenderung memamerkan diri berlebihan (*exhibitionistik*). Bicaranya keras, selalu menarik perhatian orang, memaksakan dirinya untuk diterima dalam kelompok, sering menyebutkan namanya sendiri, suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengagetkan. Sebagai makhluk sosial, seorang individu sejak lahir hingga sepanjang hayatnya senantiasa berhubungan dengan individu lainnya atau dengan kata lain melakukan relasi interpersonal. Dalam relasi interpersonal itu ditandai dengan berbagai aktivitas tertentu, baik aktivitas yang dihasilkan berdasarkan naluriah semata atau justru melalui proses pembelajaran tertentu. Berbagai aktivitas individu dalam relasi interpersonal ini biasa disebut perilaku sosial. Seseorang agar bisa memenuhi tuntutan sosial maka perlu adanya pengalaman sosial yang menjadi dasar pergaulan.

Krech *et al* (1962) antara lain mengungkapkan bahwa untuk memahami perilaku sosial individu, dapat dilihat dari kecenderungan-kecenderungan ciri-ciri respon interpersonalnya, yang terdiri dari:

- a. Kecenderungan peranan (*role disposition*), yaitu kecenderungan yang mengacu kepada tugas, kewajiban dan posisi yang dimiliki seorang individu;

- b. Kecenderungan sosiometrik (*sociometric disposition*), yaitu kecenderungan yang bertautan dengan kesukaan, kepercayaan terhadap individu lain;
- c. Ekspresi (*expression disposition*), yaitu kecenderungan yang bertautan dengan ekspresi diri dengan menampilkan kebiasaan-kebiasaan khas (*particular fashion*). Lebih jauh diuraikan pula bahwa dalam kecenderungan peranan (*role disposition*) terdapat pula 4 (empat) kecenderungan yang bipolar, yaitu:

Pertama, *ascendance-social timidity*. *Ascendance* yaitu kecenderungan menampilkan keyakinan diri, dengan arah berlawanannya *social timidity* yaitu takut dan malu bila bergaul dengan orang lain, terutama yang belum dikenal. Kedua, *dominance-submissive*. *Dominance* yaitu kecenderungan untuk menguasai orang lain, dengan arah berlawanannya kecenderungan *submissive*, yaitu mudah menyerah dan tunduk pada perlakuan orang lain. Ketiga, *social initiative-social passivity*. *Social initiative* yaitu kecenderungan untuk memimpin orang lain, dengan arah yang berlawanannya. *Social passivity* yaitu kecenderungan pasif dan tak acuh. Keempat, *independent-dependence*. *Independent* yaitu untuk bebas dari pengaruh orang lain, dengan arah berlawanannya *dependence* yaitu kecenderungan untuk bergantung pada orang lain. Dengan demikian, perilaku sosial individu dilihat dari kecenderungan peranan (*role disposition*) dapat dikatakan memadai, manakala menunjukkan ciri-ciri respons interpersonal sebagai berikut:

1. Yakin akan kemampuannya dalam bergaul secara sosial;
2. Memiliki pengaruh yang kuat terhadap teman sebaya;
3. Mampu memimpin teman-teman dalam kelompok;
4. Tidak mudah terpengaruh orang lain dalam bergaul.

Sebaliknya, perilaku sosial individu dikatakan kurang atau tidak memadai manakala menunjukkan ciri-ciri respons interpersonal sebagai berikut:

1. Kurang mampu bergaul secara sosial;
2. Mudah menyerah dan tunduk pada perlakuan orang lain;
3. Pasif dalam mengelola kelompok;
4. Tergantung kepada orang lain bila akan melakukan suatu tindakan.

Kecenderungan-kecenderungan tersebut merupakan hasil dan pengaruh dari faktor konstitusional, pertumbuhan dan perkembangan individu dalam lingkungan sosial tertentu dan pengalaman kegagalan dan keberhasilan berperilaku pada masa lampau.

11

Baron dan Byrne berpendapat bahwa ada 4 (empat) kategori utama yang dapat membentuk perilaku sosial seseorang, yaitu:

- a. Perilaku dan karakteristik orang lain. Jika seseorang lebih sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki karakter santun, ada kemungkinan besar ia akan berperilaku seperti kebanyakan orang-orang berkarakter santun dalam lingkungan pergaulannya. Sebaliknya, jika ia bergaul dengan orang-orang berkarakter sombong, maka ia akan terpengaruh oleh perilaku seperti itu.
- b. Proses kognitif. Ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan dan pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang akan berpengaruh.
- c. Faktor lingkungan. Lingkungan alam terkadang dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Misalnya orang yang berasal dari daerah pantai atau pegunungan yang terbiasa berkata dengan keras, maka perilaku sosialnya seolah

keras pula, ketika berada di lingkungan masyarakat yang terbiasa lembut dan halus dalam bertutur kata.

- d. Tata budaya sebagai tempat perilaku dan pemikiran sosial itu terjadi. Misalnya, seseorang yang berasal dari etnis budaya tertentu mungkin akan terasa berperilaku sosial aneh ketika berada dalam lingkungan masyarakat yang beretnis budaya lain atau berbeda.

Daftar Pustaka

Baron, R. A., & Byrne (1991). *Sosial Psychology: Understanding Human Interaction*. 6th edition. USA: Allyn & Bacon

Krech, David and Egerton L. Ballanchey (1962). *Individual in Society, A text Book of Social Psychology*. Tokyo: Mc Grawhill Kogo Fusha.

Krech, Crutchfield dan Ballachey (1982) *Individual in Society*. Tokyo: Mc Graw-Hill International Book Company.

³⁰ Rusli Ibrahim. (2001). *Landasan Psikologi Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar*. Jakarta: Depdiknas.

Sarlito W. Sarwono (2000). *Berkenalan Dengan Aliran-Aliran dan Tokoh-Tokoh Psikologi*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.

TEORI PERAN

Lorentius Goa

Pengertian peran banyak dikemukakan oleh ahli. Salah satunya yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, dengan menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soekanto, 1990: 268). Berdasarkan pengertian tersebut, peran dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat (Cohen, 1992: 76).

Sedangkan menurut (Berry, 1981: 99-101) peran berhubungan dengan pekerjaan. Seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaan yang dipegangnya. Peran didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peran ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan, di dalam

keluarga dan di dalam peran-peran yang lain. Peran terdapat dua macam harapan, yaitu: *pertama*, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan *kedua*, harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peran yang saling berhubungan antara pemegang peran dengan lingkungannya. Pendapat lain dikemukakan oleh Alvin Bertran yang menyebut bahwa peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu (Taneko, 1986: 220).

¹⁹ Menurut (Dougherty & Pritchard, 1985) teori peran memberi kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat terhadap produk atau *outcome* yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran (Bauer, 2003: 58).

Robert Linton mengembangkan teori peran, dengan menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai mahasiswa, orang tua, wanita, dan

lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Kemudian, Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya yang dinamakan “*life-course*” memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori tertentu di dalam masyarakat, baik berdasarkan usia atau hal lain yang berlaku dalam masyarakat tersebut (Zaubaidah & Risnawati, 2016: 115).

Peran juga dimaknai sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang yang sesuai dengan statusnya. Sehingga peran tidak bisa dipisahkan dari status seseorang di dalam lingkungannya. Dengan status tersebut seseorang diharapkan dapat menjalankan perannya termasuk terkait dengan hak kewajibannya (Horton, 1993: 118).

¹¹ Menurut (Kahn, 1964) teori peran (*role theory*) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Peran (*role*) adalah konsep sentral dari teori peran (Shaw & Constanzo, 1982). Dengan demikian kajian mengenai teori peran tidak lepas dari definisi peran dan berbagai istilah perilaku di dalamnya. Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Untuk dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang memerlukan cara tertentu guna mengantisipasi perilaku orang lain. Peran melakukan fungsi ini dalam sistem sosial. Seseorang memiliki peran, baik dalam pekerjaan maupun di luar itu. Masing-masing peran menghendaki perilaku yang berbeda-beda, antara satu dengan yang lain (Agustina, 2009: 42).

³⁶ Maka, dalam praktiknya, peran merupakan hal yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soekanto, 1984: 237).

56

Menurut (Biddle & Thomas, 1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut *pertama*, orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, *kedua*, perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, *ketiga*, kedudukan orang-orang dalam perilaku, *keempat*, kaitan antara orang dan perilaku (harapan) (Horoepoetri, 2003).

Teori peran (*role theory*) memotret interaksi sosial (*social interaction*) dengan mengibaratkan aktor yang bermain sesuai dengan peran yang telah ditentukan. Peran dimaknai sebagai pemahaman bersama yang menuntun untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang diharapkan. Dokter misalnya, diharapkan agar berperilaku sesuai dengan peran tersebut, yang mengobati orang sakit. Status sebagai dokter tersebut membuatnya harus mengobati pasien yang datang kepadanya, perilaku tersebut sudah ditentukan oleh harapan lingkungan dan orang sekitar (Sarwono, 2002: 89).

Dengan ungkapan yang lebih sederhana, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang sekitarnya, maka ia menjalankan suatu peran. Begitu pula dengan Livinson, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peran meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran juga mencakup suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Sehingga peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat (Soekanto, 1990: 221).

Dengan kata lain, perilaku individu berdasarkan pada konsep perannya terhadap masyarakat sekitar. Bagaimana individu mengkonsep masyarakat, begitulah ia berperilaku. Berdasarkan pengertian di atas, peran dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Pendapat lain menyebut bahwa peran adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu (Cohen, 1992: 76).

Pendapat lain disampaikan oleh Alvin Bertran yang diterjemahkan oleh Soeleman Taneko, menyebut bahwa peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku status atau kedudukan tertentu. (Taneko, 1986: 220).

Ada pula peran dalam bidang politik. Peran di bidang politik dikaitkan langsung dengan partisipasi di dalam proses politik. Salah satu ciri demokrasi adalah adanya partisipasi warga negara di dalam proses politik, baik lewat partai politik maupun nonpartai politik, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat sipil (*civil society*) yang melakukan kegiatan kontrol dan kritik terhadap kebijakan pemerintah (Srijanti, 2007: 29-42).

Peranan berasal dari kata "peran". Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkah laku yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 845) "peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan". Istilah "peran" sering diucapkan banyak orang sesuai dengan posisi atau kedudukan seseorang. Teori utama dalam disertasi ini adalah teori peran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti pemain sandiwara (film), tukang lawak dalam permainan makyong, perangkat tingkah laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Ahmadi

(1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

53

Kozier Barbara, (1995: 21) berpendapat bahwa peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran ini dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil. Peran juga diartikan sebagai bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

36

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tentu saja akan terjadi interaksi antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Tumbuhnya interaksi antara mereka tentunya akan timbul saling ketergantungan satu sama lain.

Peran sangat berkaitan erat dengan yang namanya sosialisasi. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*) walau Park menjelaskan dampak masyarakat atas perilaku kita dalam hubungannya dengan peran. Namun jauh sebelumnya Robert Lintong (1936) dalam (Cahyono, 2008), seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Menurut teori ini, masyarakat yang dibarengi dengan yang namanya pemahaman tentang peran-peran secara otomatis akan lebih paham dalam

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, karena segala sesuatu yang diajarkan dengan peran adalah salah satu faktor utama dalam mencapai kepuasan tersendiri bagi individu untuk menjalankan sebuah fungsi. Hal ini dikaitkan dengan bagaimana seorang individu atau masyarakat memahami apa yang dilakukan oleh agen sosialisasi. Oleh karena itu diperlukan peran yang aktif dalam proses pensosialisasian atas individu atau masyarakat agar tercapai keinginan yang disepakati.

Sementara itu menurut Robert Linton (1936), teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan sebagainya, diharapkan agar seseorang berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi, karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya. Perilaku ditentukan oleh peran sosial.

19

Scot *et al.* (1981) dalam Kanfer (1987: 197) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu:

1. Peran itu bersifat impersonal; posisi peran itu sendiri menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity* dan *role ambiguity*)
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.

5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama-seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Untuk dapat melihat secara sederhana penjelasan mengenai teori peran, apa dan bagaimana definisi serta mekanisme dari teori peran itu sendiri, maka terlebih dahulu dapat kita lihat penjelasan teori peran yang dikaji terhadap hubungan sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan antar manusia terdapat tiga teori yang dapat dijadikan acuan untuk membantu menerangkan model dan kualitas hubungan antar manusia tersebut, salah satunya adalah teori peran.

Dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang biasanya manusia akan menjadi apa dan siapa, tergantung dari lingkungan sekitarnya atau pada siapa ia bergaul. Manusia tidak dapat hidup sendirian, sebab terdapat adanya rasa saling ketergantungan satu sama lain. Dalam pergaulan hidup, manusia menduduki fungsi yang bermacam-macam. Dalam hubungan antar manusia terdapat seorang pemimpin dan bawahan, pemerintah dan masyarakat, dan lain sebagainya.

Menurut teori peran dalam kajiannya terhadap hubungan antar manusia ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario atau peran-peran yang telah disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Contohnya, manusia yang berkumpul di suatu tempat dengan jumlah yang banyak kemudian disebut sebagai masyarakat, masyarakat kemudian menunjuk seorang sebagai pemimpin, misalnya ketua RT, yang berperan mengatur dan membimbing masyarakat. Kemudian dalam lingkup yang lebih besar yaitu negara, ditunjuk seorang presiden dengan peran yang diatur oleh masyarakat sendiri. Jadi, dengan kata lain sudah tertulis bahwa seorang presiden harus bagaimana, seorang gubernur

harus bagaimana, seorang guru harus bagaimana, murid harus bagaimana? Demikian juga sudah tertulis peran apa yang harus dilakukan oleh suami, istri, ayah, ibu, anak, dan seterusnya.

68

Perilaku individu dalam hidup bermasyarakat sangat berkaitan erat dengan peran. Karena peran mengandung hak dan kewajiban yang harus dijalani seorang individu dalam masyarakat. Suatu peran harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga dalam masyarakat. Seorang individu dalam hubungan dengan peran yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dilihat dari status sosialnya.

24

Daftar Pustaka

Ahmadi, Abu (1982). *Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*. Jakarta: Bina Ilmu.

Agustina, Lidya (2009). "Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor. Penelitian Kantor Akuntan Publik yang Bermitra Dengan Kantor Akuntan Publik Big Four di Wilayah DKI Jakarta". Universitas Kristen Maranatha. Vol. 1 No. 1, hal. 40-69.

Bauer, Jeffrey (2003). *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States*. Dissertation, University of Cincinnati-Clermont.

Biddle, B. B., & Thomas, E. J. (1966). *Role Theory: Concepts and Research*. New York: Wiley.

Berry, David (1981). *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali.

Cohen, Bruce (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rineka Cita.

2

Dougherty and Pritchard (1985). *Peran Memberikan Suatu Kerangka Konseptual Dalam Studi Perilaku di dalam Organisasi*.

- Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt (1993). *Sosiologi*, Jilid 1 Edisi Keenam, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Horoepoetri, Arimbi, Santosa, Achmad (2003). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta:
- Walhi. Kahn, et. al. (1964). *Organizational Stress*. Newyork: John Wiley & Sons.
- Kanfer, R (1987). "Task-Specific Motivation: An Integrative Approach to Issues of Measurement, Mechanisms, Processes, and Determinants". *Journal of Social and Clinical Psychology*, 5, 237.
- 24 Kozier, Barbara. (1995). *Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
- Sarwono, S. W. (2002). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Shaw, M. E., & Constanzo, P. R. (1982). *Theories of Social Psychology*. Second Edition. Tokyo: Mc Graw Hill Inc.
- 40 Soekanto, Soejono (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Srijanti et. al. (2007). *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- 6 Taneko, Soleman (1986). *Konsepsi System Sosial dan System Sosial Indonesia*. Jakarta: Fajar Agung.
- Zubaidah & Risnawati (2016). *Psikologi Pembelajaran Matematika*. Yogyakarta: PT Plosokuning.

TEORI INTERAKSI SOSIAL

Teresia Noiman Derung

¹²Interaksi sosial menurut Shaw dalam (Ali, 2004: 87), merupakan suatu pertukaran antarpribadi yang ditandai dengan masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dalam kehadiran mereka dan masing-masing perilaku mempengaruhi satu sama lain. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu interaksi merupakan stimulus bagi individu lain yang menjadi pasangannya. Homans dalam (Ali, 2004: 87), mendefinisikan interaksi sebagai suatu kejadian ketika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan oleh individu lain yang menjadi pasangannya. Konsep yang dikemukakan oleh Homans ini mengandung pengertian bahwa interaksi adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang.

12

Hal senada juga dikemukakan oleh Thibaut dan Kelley bahwa interaksi sosial sebagai peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama, mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain atau berkomunikasi satu sama lain. Jadi, dalam kasus interaksi, tindakan setiap orang bertujuan untuk mempengaruhi individu lain.

Menurut Bonner dalam (dalam Ali, 2004), interaksi merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih individu, di mana kelakuan individu mempengaruhi, mengubah atau mempengaruhi individu lain atau sebaliknya. Interaksi sosial dapat juga diartikan sebagai suatu proses di mana seseorang bertindak dan bereaksi antara yang satu dengan lainnya (Smelser, 1984: 89). Bonar mendefinisikan interaksi sosial seperti yang dikutip oleh (Gerungan 1986: 57), sebagai hubungan antara dua atau lebih individu manusia, dimana kelakuan individu saling memengaruhi, mengubah atau memperbaiki sama lain. Gilin dan Gilin, yang dikutip oleh Soekanto (1983: 51) mengartikan interaksi sosial sebagai hubungan yang dinamis, menyangkut hubungan antar orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.

Johnson (1988: 214) mengatakan demikian; di dalam masyarakat, interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok dan sebaliknya. Interaksi sosial memungkinkan masyarakat berproses sedemikian rupa sehingga membangun suatu pola hubungan. Interaksi sosial dapat pula diandaikan dengan apa yang disebut Weber sebagai tindakan sosial individu yang secara subjektif diarahkan terhadap orang lain. Menurut Kimball Young, interaksi sosial dapat berlangsung antara: 1) orang-perorangan dengan kelompok atau kelompok dengan

orang-perorangan (*there may be person to group or group to person relation*), 2) kelompok dengan kelompok (*there is group to group interaction*), 3) orang-perorangan (Taneko, 1990: 112).

Teori interaksi yang dikembangkan oleh Paul Janssen adalah hubungan timbal balik antara pengasuh dengan anak berkebutuhan khusus. Timbal balik berarti saling melengkapi, saling mengisi, saling memberi kasih. Interaksi dibangun dalam prinsip kasih. Kasih adalah pemberian diri yang total kepada Tuhan melalui anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Kasih itu tidak menuntut balasan sebab kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu rela berkorban, dan kasih itu tidak memegahkan diri (Gaudium In Christo, 2007-29).

Menurut Max Weber, metode yang bisa dipergunakan untuk memahami arti-arti subjektif tindakan sosial seseorang adalah dengan *verstehen*. *Verstehen* adalah kemampuan untuk berempati atau kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain. Max Weber mengklasifikasikan ada empat jenis tindakan sosial yang mempengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakat. Keempat jenis tindakan sosial itu adalah; *pertama*, rasionalitas instrumental, yaitu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. *Kedua*, rasionalitas yang berorientasi nilai. Sifat rasional tindakan jenis ini adalah bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. *Ketiga*, tindakan tradisional. Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar

atau perencanaan. *Keempat*, tindakan efektif. Tipe tindakan ini didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar.

14

Interaksi sosial yang sesungguhnya terjadi adalah hubungan yang bermakna. Melalui hubungan itu berlangsung kontak makna-makna yang ditanggapi kedua belah pihak. Makna-makna dikomunikasikan dalam simbol-simbol. Misalnya, rasa senang akan diungkapkan dengan senyum, jabat tangan dan tindakan positif lainnya sebagai tambahan rangsangan panca indera atau rangsangan pengertian penuh.

Hendro Puspito (1992: 288) menyatakan bahwa pada umumnya para ahli sosiologi yaitu Max Weber mengklasifikasikan bentuk dan pola interaksi sosial menjadi dua, yaitu proses sosial yang bersifat menggabungkan (*associative processes*) dan proses sosial yang menceraikan (*dissociative processes*).

20 Interaksi sosial memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial. Kontak sosial adalah suatu kegiatan individu atau kelompok dengan isyarat mempunyai makna untuk pelaku dan penerima. Jenis kontak sosial terjadi antarindividu, antarkelompok, dan antara individu dengan kelompok. Kontak sosial dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Kontak sosial positif dapat menimbulkan suatu kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif dapat menimbulkan konflik atau pertentangan. Kontak sosial primer terjadi ketika individu yang berinteraksi bertemu secara langsung dan bertatap muka. Sedangkan kontak sosial sekunder terjadi ketika interaksi dilakukan melalui perantara, seperti telpon, *whatssapp*, *instagram*, *twiter* dan lainnya sebagainya.

Komunikasi terletak pada proses pesan atau pemahaman makna itu maksud dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. ⁶⁷ Lima unsur pokok komunikasi, yaitu *pertama*, komunikator adalah orang yang menyampaikan atau mengutarakan pesan, pikiran, atau perasaan kepada pihak lain. *Kedua*, komunikan yaitu orang atau kelompok yang dikirim pesan, atau perasaan. *Ketiga*, pesan merupakan sesuatu yang disampaikan atau diutarakan oleh komunikator atau pengirim pesan. Pesan dapat berupa informasi dan perasaan. *Keempat*, media yaitu alat untuk menyampaikan atau mengutarakan pesan. Media komunikasi seperti, tulisan, lisan, film, gambar yang saat ini sangat canggih melalui sosial media. *Kelima*, efek adalah perubahan aksi reaksi yang diharapkan dapat terjadi pada komunikan, setelah memperoleh pesan dari komunikator.

Interaksi sosial berasal dari dua kata, yaitu interaksi dan sosial. Interaksi berarti hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok (Soekanto, 2001). Syarat terjadinya interaksi sosial terdiri dari dua hal, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial terjadi karena ada tanggapan terhadap tindakan sosial seseorang. ⁴⁰ Kata "kontak" berasal dari bahasa Latin, yaitu *con* atau *cum*, yang artinya bersama-sama dan *tango* yang berarti menyeluruh. Kontak sosial berlangsung dalam 3 bentuk; 1) antara orang perorangan yaitu suatu proses di mana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, di mana orang tersebut menjadi anggotanya.

¹² Ada beberapa bentuk interaksi sosial menurut Park dan Burgess (Santosa, 2004:12), yaitu bentuk asosiatif meliputi:

- ⁴⁵ 1. Kerja sama, sebagai suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja sama saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk-bentuk

kerja **sama** meliputi; kolaborasi (*colab*), memiliki bentuk tersendiri, yaitu kerukunan atau saling membantu secara sukarela, tanpa menuntut imbalan atau balasan. *Kooptasi*, yaitu mekanisme penerimaan unsur-unsur baru dalam diri orang lain atau kelompok untuk menghindari adanya konflik. *Koalisi*, yaitu kombinasi yang dilakukan **dari dua pendapat atau lebih, dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Koalisi dari dua organisasi menghasilkan keadaan dengan tidak stabil** lantaran kedua organisasi mempunyai struktur tersendiri.

2. **Persaingan adalah suatu bentuk interaksi sosial dimana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama.** Persaingan yang ada dalam asosiatif bersifat positif atau persaingan sehat dilakukan pada norma dan nilai yang diakui dan diterapkan di masyarakat.
3. **Pertentangan adalah bentuk interaksi sosial yang berupa perjuangan yang langsung dan sadar antara orang dengan orang atau kelompok dengan kelompok untuk mencapai tujuan yang sama;**
4. **Peresesuaian, ialah proses penyesuaian di mana orang-orang atau kelompok-kelompok yang sedang bertentangan bersepakat untuk menyudahi pertentangan tersebut atau setuju untuk mencegah pertentangan yang berlarut-larut dengan melakukan interaksi damai baik bersifat sementara maupun bersifat kekal.**

Bentuk negatif interaksi sosial menurut Max Weber adalah bentuk disosiatif (menceraikan) terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Persaingan (*kompetisi*). Persaingan yaitu proses sosial bila ada dua atau lebih pihak yang berkompetisi melaksanakan sesuatu

untuk mencapai suatu kemenangan tertentu. Persaingan terjadi kalau beberapa pihak menginginkan sesuatu dengan jumlah terbatas. Persaingan yang dimaksud dalam bentuk disosiatif adalah persaingan negatif atau persaingan yang tidak sehat yang ada dalam hidup individu maupun kelompok yaitu persaingan yang memakai kekerasan atau ancaman bahkan menghabiskan nyawa orang lain. Persaingan ini sesungguhnya tidak dikehendaki oleh semua orang tetapi karena manusia seringkali tidak dapat mengendalikan diri, sakit hati, benci dan marah maka manusia bisa membunuh orang lain.

2. Kontradiksi. Kontradiksi yaitu perselisihan yang tersirat secara laten (tersembunyi) lantaran tidak adanya konflik terbuka atau terang-terangan. Kontradiksi merupakan proses sosial dengan gejala ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Hal ini seringkali terjadi antara atasan dan bawahan, antara yang tua dan muda serta antara orang yang berkuasa dan para pekerja. Kontradiksi seringkali terjadi karena ada banyak penyebabnya yaitu perbedaan pendapat antara kalangan tertentu dalam masyarakat atau organisasi serta status dalam masyarakat.
3. Pertikaian. Pertikaian yaitu proses sosial sebagai bentuk lanjut dari kontradiksi berupa perselisihan terbuka. Perselisihan terjadi lantaran perbedaan yang semakin tajam antara kalangan tertentu di masyarakat. Kondisi diskriminasi yang lebih tajam menimbulkan kemarahan dan kebencian yang mendorong tindakan untuk melukai, menghancurkan, atau menyerang orang lain bahkan membunuh. Perselisihan timbul ketika individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan mereka dengan menentang

pihak lain dengan ancaman atau kekerasan. Pertikaian dalam masyarakat saat ini marak terjadi dan pertikaian membuat rasa persaudaraan luntur dan hidup tidak berdamai satu dengan lainnya.

4. Pertentangan²¹ atau konflik (*conflict*). Konflik atau Pertentangan yaitu usaha individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuannya dengan menantang lawan. Konflik terjadi lantaran perbedaan pendapat, perasaan individu, budaya, kepentingan baik individu maupun kelompok, dan terjadinya perubahan sosial yang cepat dengan menimbulkan disorganisasi sosial.

Pola interaksi yang dianjurkan dalam kehidupan bersama adalah pola interaksi asosiatif agar dapat tercipta hidup rukun, damai, bersatu, saling menolong, saling menghargai, saling mendukung, bekerja sama dalam perbedaan baik dalam kelompok keluarga, kelompok kategorial maupun dalam kelompok masyarakat pada umumnya.

Proses interaksi⁷⁵ sosial dalam masyarakat sosial terdiri dari faktor internal yang berasal dari dalam diri individu dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu. Dorongan yang berasal dari diri sendiri atau internal, meliputi; *pertama*, dorongan untuk melanjutkan atau mengembangkan keturunan. Dorongan ini terjadi secara naluri tidak perlu dipelajari. *Kedua*, dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. *Ketiga*, dorongan untuk mempertahankan hidup, baik pribadi maupun kelompok. *Keempat*, dorongan untuk melakukan komunikasi dengan sesama. Manusia memerlukan orang lain untuk mengungkapkan apapun yang ada dalam diri maupun kelompok.

Selain dorongan internal, ada juga dorongan eksternal dalam interaksi sosial. Dorongan eksternal terdiri dari 6 faktor yaitu:

1. Simpati. Simpati adalah suatu sikap tertarik kepada orang lain karena suatu hal, baik penampilan, pola pikir, atau kebijaksanaan yang dimiliki orang tertentu (Mahmuda, 2010). Simpati memengaruhi orang untuk melakukan apapun untuk menunjukkan rasa simpati pada orang tersebut. Simpati timbul pada seseorang bukan atas dasar rasional tetapi berdasarkan perasaan.
2. Motivasi. Samsudin (2010: 281) menuliskan pengertian motivasi sebagai suatu usaha memberi dorongan kepada orang lain secara pribadi atau kelompok agar melaksanakan suatu hal sesuai dengan yang telah ditetapkan. Motivasi juga merupakan daya dorong atau kekuatan bagi seseorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar mungkin bagi orang lain atau kelompok demi mencapai tujuan yang diinginkan (Hasibuan, 2010: 143). Kontribusi yang diberikan tanpa menuntut imbalan ataupun balasan karena dilakukan dengan kerelaan hati yang besar tanpa merasa terpaksa sehingga menghasilkan pekerjaan yang memuaskan.
3. Empati. Empati berasal dari kata *pathos* (dalam bahasa Yunani) yang berarti perasaan yang mendalam. Empati menurut Budiningsih (2004: 47) adalah kemampuan untuk mengenal, mengerti, dan merasakan perasaan orang lain dengan ungkapan verbal dan perilaku. Perilaku timbul karena seseorang dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain sehingga subjek tergerak hati untuk melakukan tindakan untuk membantu orang lain yang amat membutuhkan.
4. Sugesti. Sugesti menurut Ahmadi (1998: 161) adalah pengaruh yang diberikan kepada pikiran dan perilaku seseorang sehingga orang tersebut meyakini atau memercayai apapun

yang dikehendaki oleh orang tertentu. Sugesti memengaruhi seseorang dalam interaksi sosial agar tidak berpikir panjang dan melupakan pikirannya sendiri sehingga ia meyakini apa yang diyakini oleh orang yang memberikan sugesti itu.

5. Imitasi. Imitasi merupakan proses sosial yang berupa tindakan sosial untuk meniru orang lain baik dalam hal penampilan, gaya hidup, tutur kata dan tindakan yang dimiliki orang lain (Sasmita, 2011). Imitasi seringkali dilakukan oleh seorang anak dari sikap dan tutur kata orang tua atau orang yang lebih senior darinya. Imitasi juga merupakan suatu proses kognisi untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh *role model* melalui panca indera dan kemampuan untuk mempraktikannya.
6. Identifikasi. Identifikasi menurut Poerwadarminto (1976: 369) adalah suatu proses untuk mengenal dan menempatkan objek atau individu pada kelompok atau kelas tertentu sesuai dengan karakteristik tertentu. Identifikasi juga merupakan penetapan identitas seseorang atau suatu benda atas dasar ikatan emosional dengan tokoh tertentu sehingga ia berperilaku atau membayangkan dirinya adalah tokoh tersebut.

Interaksi sosial sangat berperan dalam kehidupan bermasyarakat termasuk antara pengasuh dengan anak tunagrahita ringan. Simmel juga melihat bahwa salah satu tugas sosiologi adalah memahami interaksi antara individu. Salah satu teori yang dikemukakan oleh Simmel dan masih terkait dengan interaksi adalah 'masyarakat sebagai proses interaksi' (Sudjarwo, 2015:42). Menurut pandangannya, masyarakat dapat terbentuk karena adanya interaksi, bukan adanya kelompok orang yang hanya diam. Dalam interaksi tidak mementingkan berapa jumlah orang yang

berinteraksi, yang penting adalah adanya interaksi. Jadi, melalui interaksi timbal balik, di mana individu saling berhubungan dan saling memengaruhi, maka masyarakat itu akan muncul.

52

Dalam sosiologi formal Simmel, kita dapat melihat jelas tentang upayanya dalam mengembangkan “geometri” relasi sosial. Dari dua koefisien geometri yang menarik perhatiannya adalah jumlah dan jarak. Minat Simmel pada dampak jumlah orang terhadap kualitas interaksi dapat dilihat dalam bahasannya tentang perbedaan antara *dyad* dan *triad*. *Dyad* dan *triad* adalah jumlah orang yang terlibat dalam interaksi tersebut. Simmel mengemukakan bahwa ketika jumlah orang yang terlibat dalam interaksi berubah, maka bentuk interaksi merekapun berubah dengan teratur dan dapat diramalkan. Unit terkecil dalam kehidupan manusia yang menjadi ruang lingkup perhatian sosiologi adalah *dyad*, yang merupakan unit atau kelompok yang terdiri dari dua orang.

21

Bentuk *dyad* (duaan) memperlihatkan ciri khas yang unik sifatnya dan tidak terdapat dalam satuan sosial apapun yang lebih besar. Contohnya adalah, suami dan istri, dua orang sahabat karib dan seterusnya. Kalau seorang individu memilih untuk keluar dari suatu kelompok *dyad* (duaan) maka satuan sosial itu sendiri akan hilang lenyap. Oleh karena *dyad* terdiri dari dua pihak, maka tidak ada pihak lain yang mungkin menengahinya, sehingga Simmel berkesimpulan kedua pihak tersebut sebenarnya merupakan suatu kesatuan perasaan. Di dalam *dyad* terdapat hubungan yang sangat erat dan menyatu. Maka, ada kemungkinan terjadi konflik atau pertikaian. Kesatuan perasaan tersebut kadang terganggu oleh tindakan masing-masing yang mungkin mengakibatkan terjadi konflik. Hubungan *dyad* tidak selalu disertai oleh perasaan-perasaan positif.

43

Teori interaksi sosial (*social interaction theory*) banyak dikemukakan oleh para ahli. Menurut George Simmel, masyarakat, lebih dari sekadar kumpulan individu serta pola perilakunya, masyarakat tidak independen dari individu yang membentuknya. Sebaliknya, masyarakat menunjuk pada pola interaksi timbal-balik antarindividu. Simmel menyebut bahwa bentuk interaksi sosial sebagai pola perilaku universal dan berulang-ulang melalui makna berbagai isi diungkapkan (Habib, 2004: 26-28).

Menurut Robert Hall dan Thomas, interaksi sosial memiliki dimensi ruang dan dimensi waktu. Hall membagi ruangan dalam interaksi sosial menjadi empat batasan jarak, pertama, jarak intim, kedua, jarak pribadi, ketiga, jarak sosial, dan keempat, jarak publik. Hall juga menjelaskan dimensi waktu. Pada dimensi waktu ini terlihat adanya batasan toleransi waktu yang dapat mempengaruhi bentuk interaksi. Thomas menyebut aturan dimensi situasi. Definisi situasi merupakan penafsiran seseorang sebelum memberikan reaksi. Sebelum melakukan reaksi, individu atau masyarakat terlebih dulu membaca situasi yang ada. Definisi situasi ini dibuat oleh individu juga oleh masyarakat, bisa secara terpisah ataupun bersamaan. Sementara menurut Rahayu Ginintasasi, interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu, dan antara individu dengan kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar (Ginintasasi, 2015: 1-2).

Adapun (Basrowi, 2015) mengemukakan interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok manusia. Bentuknya tidak hanya bersifat kerjasama,

tetapi juga berbentuk tindakan, persaingan, pertikaian dan sejenisnya. Menurut (Partowisastro, 2003) interaksi sosial ialah relasi sosial yang berfungsi menjalin berbagai jenis relasi sosial yang dinamis, baik relasi itu berbentuk antar individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Sementara (Soekanto, 2002) mengemukakan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang meliputi hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Menurut (Sarwono & Meinarno, 2009) interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara individu satu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok lain (Soekanto, 2005: 61).

Interaksi sosial merupakan hubungan dinamis yang memiliki dimensi cukup beragam, mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok maupun orang dengan kelompok. Bentuknya tidak hanya bersifat kerjasama, tetapi juga bisa berbentuk persaingan, pertikaian dan sejenisnya (Basrowi, 2005: 138).

Kehidupan meniscayakan adanya interaksi sosial sebagai pengaruh timbal balik (*feedback*) antar individu dengan golongan di dalam usaha mereka untuk memecahkan persoalan (*problem solving*) yang diharapkan dan dalam usaha mereka untuk mencapai tujuannya (Ahmadi, 2004: 100).

Bimo Walgito menyebut interaksi sosial (*social interaction*) bisa juga bersifat individual, yaitu adanya hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, satu individu saling mempengaruhi individu lain, sehingga terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik (Walgito, 2003: 57).

Soerjono Soekanto menyebut ada dua syarat terdapatnya interaksi sosial, yaitu adanya kontak sosial (*social contact*). Kontak sosial berasal dari bahasa latin *con* atau *cum* yang berarti bersama-sama dan *tango* yang berarti menyentuh. Jadi secara harfiah kontak (*contact*) adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan fisik (*badaniyah*). Sebagai gejala sosial itu tidak perlu berarti suatu hubungan *badaniyah*, karena bisa jadi orang dapat mengadakan hubungan tanpa harus menyentuhnya, seperti misalnya dengan cara berbicara dengan orang yang bersangkutan. Dengan berkembangnya teknologi dewasa ini, orang-orang dapat berhubungan satu sama lain dengan melalui telepon, telegraf, radio, dan yang lainnya yang tidak perlu memerlukan sentuhan *badaniah* (Soekanto, 2000: 64).

Menurut Abdulsyani, kontak sosial terkait dengan hubungan antara satu orang dengan orang lain, atau lebih. Kontak sosial dilakukan bisa dengan berbicara secara langsung bertemu secara fisik, atau berkomunikasi dengan media yang membuat bisa saling memahami antara satu dengan lain (Abdulsyani, 2012: 154). Bungin menyebut komunikasi sebagai salah satu cara terjadinya kontak sosial, yang bisa saling berbagi informasi atau pengetahuan maupun pengalaman (Bungin, 2006: 57).

Menurut Soerjono Soekanto ada tiga bentuk interaksi sosial, berupa kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*) dan bahkan juga berbentuk pertentangan atau pertikaian (*conflict*). Hal tersebut senada juga dengan apa yang disampaikan oleh Kimball Young (Soekanto, 1987: 59).

Charles Loomis menyebut ada ciri penting dari interaksi sosial, yaitu:

1. Jumlah pelaku lebih dari seorang, bisa dua atau lebih, dengan kata lain bisa individu lebih dari satu, bisa pula kelompok.

20

2. Adanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol.
3. Adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini dan akan datang, yang menentukan sifat dari aksi yang sedang berlangsung.
4. Adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat.

Selain itu, apabila terjadi interaksi sosial yang diulang-ulang menurut pola yang sama dan bertahan untuk waktu yang lama, maka akan terwujud apa yang disebut dengan hubungan sosial, atau kontak sosial (social contact) (Soekanto, 2005: 113). Terjadinya kontak sosial tidaklah semata-mata tergantung dari tindakan atau stimulus, tetapi juga tergantung kepada adanya tanggapan atau respon terhadap tindakan tersebut. Sehingga menjadi jelas dan terang, bahwa di dalam interaksi sosial selalu melibatkan lebih dari satu orang, atau lebih dari satu kelompok/ pihak. Interaksi sosial tidak ada akan ada jika hanya dan satu orang, interaksi sosial tidak akan terjadi bila tidak ada yang memberi stimulus dan tidak ada yang merespon (Narwoko, 2007: 16).

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu (seseorang) dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Tanpa interaksi sosial maka tidak mungkin akan ada kehidupan bersama. Soerjono Soekanto (2006), menjelaskan bahwa interaksi sosial yaitu hubungan-hubungan sosial dinamis yang menyangkut antara orang-perorangan, antara orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok.

Johnson mengatakan di dalam masyarakat, interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok dan sebaliknya.

Interaksi sosial memungkinkan masyarakat berproses sedemikian rupa sehingga membangun suatu pola hubungan. Interaksi sosial dapat pula diandaikan dengan apa yang disebut Weber sebagai tindakan sosial individu yang secara subjektif diarahkan terhadap orang lain (Johnson, 1988: 214).

Menurut Kimball Young, interaksi sosial dapat berlangsung antara: (a) orang-perorangan dengan kelompok atau kelompok dengan orang-perorangan (*there may be person to group or group to person relation*); (b) kelompok dengan kelompok (*there is group to group interaction*); (c) orang-perorangan (*there is person to person interaction*) (Taneko, 1990: 112).

Hendro Puspito menyatakan bahwa pada umumnya para ahli sosiologi mengklasifikasikan bentuk dan pola interaksi sosial menjadi dua, yaitu proses sosial yang bersifat menggabungkan (*associative processes*) dan proses sosial yang menceraikan (*dissociative processes*). Proses sosial yang mengarah menggabungkan ditujukan bagi terwujudnya nilai-nilai yang disebut kebajikan-kebajikan sosial seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas dan dikatakan sebagai proses positif. Sedangkan proses sosial menceraikan mengarah kepada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan, perpecehan dan ini dikatakan proses negatif (Puspito, 1992).

Bentuk-bentuk proses sosial asosiatif adalah:

- a) **Kerja Sama.** Adalah suatu bentuk proses sosial dimana dua atau lebih perorangan atau kelompok mengadakan kegiatan bersama guna mencapai tujuan yang sama. Bentuk ini paling umum terdapat di antara masyarakat untuk mencapai dan meningkatkan prestasi material maupun non material.
- b) **Asimilasi.** Berasal dari kata latin *assimilare* yang artinya menjadi

sama. Definisi sosiologisnya adalah suatu bentuk proses sosial dimana dua atau lebih individu atau kelompok saling menerima pola kelakuan masing-masing sehingga akhirnya menjadi satu kelompok yang terpadu. Mereka memasuki proses baru menuju penciptaan satu pola kebudayaan sebagai landasan tunggal untuk hidup bersama.

- c) Akomodasi. Berasal dari kata latin *acomodare* yang berarti menyesuaikan. Definisi sosiologisnya adalah suatu bentuk proses sosial yang di dalamnya dua atau lebih individu atau kelompok berusaha untuk tidak saling mengganggu dengan cara mencegah, mengurangi atau menghentikan ketegangan yang akan timbul atau yang sudah ada. Akomodasi ada dua bentuk yaitu toleransi dan kompromi. Bila pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini bersedia menanggung derita akibat kelemahan yang dibuat masing-masing. Bila masing-masing pihak mau memberikan konsesi kepada pihak lain yang berarti mau melepaskan sebagian tuntutan yang semula dipertahankan sehingga ketegangan menjadi kendor disebut kompromi (Puspito, 1992).

Sedangkan bentuk-bentuk disosiatif terdiri dari:

- a) Persaingan. Adalah bentuk proses sosial dimana satu atau lebih individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan bersama dengan cara yang lebih cepat dan mutu yang lebih tinggi. Dengan adanya persaingan itu, masyarakat mengadakan seleksi untuk mencapai kemajuan.
- b) Penghalang (oposisi). Berasal dari bahasa latin *opponere* yang artinya menempatkan sesuatu atau seseorang dengan maksud permusuhan. Oposisi adalah proses sosial dimana seseorang atau sekelompok orang berusaha menghalangi pihak lain mencapai tujuannya.

- c) **Konflik.** Berasal dari bahasa latin *confligere* yang berarti saling memukul. Konflik berarti suatu proses dimana orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.

Bentuk-bentuk interaksi dapat menguntungkan bila berlangsung dalam perhitungan rasional dan mendatangkan keuntungan bagi yang menjalankannya. Akan tetapi dapat menjadi merugikan bila kerjasama dan persaingan atau pertikaian dijalankan berdasarkan emosional dan sentimen yang tidak terkontrol sehingga hasilnya kerap kali membawa kerugian serta kekecewaan (Soemardjan dan Soemardi, 1974: 179).

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa interaksi sosial yang berkesinambungan cenderung membentuk keteraturan. Bila hubungan yang terjadi sedemikian rupa didasarkan oleh status dan perannya maka hubungan itu dinamakan dengan relasi sosial.

Ada beberapa ciri relasi sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh Hendro Puspito, yaitu:

- a. Relasi sosial adalah suatu bentuk hubungan yang berdasarkan status atau kedudukan sosial masing-masing individu. Mereka melakukan menurut istilah Goffman perannya sesuai dengan statusnya dan menjalin hubungan masing-masing, menghormati dan bertindak selaras dengan statusnya. Sebagian besar interaksi sosial di dalam masyarakat berupa relasi sosial yang terjadi di seputar status yang tak terpisahkan dengan perannya (hak dan kewajiban yang melekat dengan statusnya).
- b. Relasi sosial terjadi berdasarkan peranan yang dilakukan sebagaimana statusnya yang dipegang setiap orang. Setiap

peranan merupakan tempat pertemuan dan pertukaran jasa. Sifat pertukaran dalam relasi ini adalah didasarkan pada *reward* atau imbalan yang ekstrinsik. Istilah *reward ekstrinsik* diciptakan oleh Peter M. Blau dan ia membedakannya dengan *reward intrinsik*. Perbedaan antara pertukaran ekstrinsik dengan intrinsik sejajar dengan pertukaran ekonomi dan pertukaran sosial. Hubungan relasi yang bersifat *reward ekstrinsik* berfungsi sebagai alat bagi suatu *reward* lainnya, dan bukan *reward* demi untuk hubungan itu sendiri. Dalam kasus ini, *reward* itu dapat dipisahkan dari hubungannya, dan pada prinsipnya dapat diperoleh dari setiap pasangan pertukaran. Sebaliknya *reward intrinsik* adalah *reward* yang berasal dari hubungan itu sendiri. Dalam kasus ini, *reward* merupakan akibat logis dari suatu hubungan, tanpa adanya negosiasi sebelumnya. Azas pertukaran itu adalah *do ut des* (saya memberi, saudara harus memberi saya). Kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan *cost* (biaya) dan mengharapkan *reward* (imbalan) yang *profit* (menguntungkan) dari setiap hubungan.

- c. Dalam pandangan sosiologi, seluruh jalinan interaksi di atas bersifat statis dan pada umumnya tidak menimbulkan konflik yang membahayakan bagi masyarakat. Oleh karenanya pengawasan sosial terhadap relasi sosial semacam itu tidak berlangsung ketat.

Menurut Michener dan Delameter (dalam Hidayati, 2014: 22) menyatakan bahwa relasi sosial juga disebut hubungan sosial yang merupakan hasil dan interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Hubungan dalam relasi sosial merupakan hubungan yang sifatnya timbal balik antara individu yang lain dan saling mempengaruhi.

Beberapa tahapan terjadinya relasi sosial yaitu:

- a) *Zero contact* yaitu kondisi di mana tidak terjadi hubungan antara dua orang.
- b) *Awareness* yaitu seseorang sudah mulai menyadari kehadiran orang lain.
- c) *Surface contact* yaitu orang pertama menyadari adanya aktifitas yang sama oleh seseorang di sekitarnya.
- d) *Mutuality* yaitu sudah mulai terjalin relasi sosial antara 2 (dua) orang yang tadinya saling asing.

Menurut Spradley dan McCurdy (dalam Astuti 2012: 1) menyatakan bahwa relasi sosial atau hubungan sosial yang terjadi antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola.

Charles P. Loomis melihat ada beberapa ciri-ciri penting dari interaksi sosial antara lain:

- a) Ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Proses interaksi sosial tidak dapat terjadi ketika hanya terdapat satu orang. Proses interaksi baru akan terjalin ketika terdapat individu yang berinteraksi dengan individu lain.
- b) Ada komunikasi antara pelaku dengan simbol-simbol. Proses interaksi sosial melibatkan komunikasi yang dijalin oleh individu/ kelompok tidak hanya secara lisan, akan tetapi komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu melalui gestur tubuh atau isyarat.
- c) Ada dimensi waktu (masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang) yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Proses interaksi sosial melibatkan dimensi waktu yang pernah terjadi artinya interaksi sosial pernah terjadi di masa lampau, interaksi sosial dapat terjadi di masa kini, dan pada masa yang akan datang interaksi sosial juga terjadi.

- d) Ada tujuan-tujuan tertentu. Para pelaku memiliki tujuan dalam menjalin interaksi sosial. Misalnya, di pasar terjadi interaksi antara penjual dengan pembeli. Pembeli memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu barang yang dibutuhkan dalam berinteraksi dengan penjual. Sementara penjual memiliki tujuan untuk menawarkan barang hingga terjual kepada pembeli dalam berinteraksi (Taneko, 1984: 114).

Menurut Gillin dan Gillin (dalam Soekanto, 2007) interaksi sosial terjadi ketika memenuhi dua syarat yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi.

Kontak Sosial

Pada dasarnya kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain. Hal tersebut merupakan awal terjadinya interaksi sosial di mana masing-masing pihak saling bereaksi meski tidak harus bersentuhan secara fisik. Sederhananya, kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak sosial dibedakan:

- 1) Kontak sosial langsung (kontak sosial primer) merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok yang terjadi secara fisik (tatap muka). Misalnya, berbicara dan berjabat tangan.
- 2) Kontak sosial tidak langsung (kontak sosial sekunder) merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok melalui perantara, seperti komunikasi melalui media seperti telepon, chatting, atau menyampaikan pesan lewat orang lain.

Komunikasi

Jika kontak sosial adalah suatu cara dalam berinteraksi sosial, maka komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan (ide gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antara keduanya.

- 1) Komunikasi verbal. Merupakan bentuk komunikasi secara lisan maupun tertulis seperti berbicara dan surat menyurat.
- 2) Komunikasi nonverbal. Merupakan bentuk komunikasi dengan simbol-simbol atau gestur tubuh seperti menyapa teman dengan melambaikan tangan.

Faktor-faktor pendorong dalam interaksi sosial meliputi:

a. Faktor peniruan (imitasi)

Imitasi adalah suatu proses belajar dengan cara meniru orang lain. Gejala tiru-meniru atau proses imitasi sangat kuat peranannya dalam interaksi sosial. Salah satu segi positifnya adalah bahwa imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Namun imitasi dapat bersifat negatif jika yang ditiru adalah sifat yang menyimpang. Selain itu imitasi juga melemahkan/mematikan kreasi seseorang.

b. Faktor sugesti

Sugesti adalah suatu pendapat, pandangan dan sikap yang diberikan kepada orang lain dan diterima oleh pihak lain sehingga orang tersebut mengikuti pandangan/pengaruh tersebut. Sugesti secara psikologis diartikan sebagai suatu proses dimana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik. Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi pandangan atau sikap dari dirinya yang kemudian diterima pihak lain. Hal ini hampir sama dengan imitasi, hanya sugesti

terjadi karena pihak yang menerima dilanda oleh emosinya sehingga menghambat berpikirnya secara rasional.

c. Faktor identifikasi

Identifikasi adalah suatu dorongan untuk menjadi identik (sama) dengan orang lain. Proses identifikasi memerlukan suatu figur yang ideal bagi pelakunya. Identifikasi sebenarnya merupakan kecenderungan. Kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi dapat berlangsung secara sadar maupun tidak sadar dan prosesnya tidak saja bersifat lahiriah, tapi juga bersifat batiniah.

d. Faktor simpati

Proses simpati sebenarnya merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain, yang seolah-olah merasa berada dalam keadaan orang lain yang dapat memunculkan perasaan emosional tertentu (sedih, senang dan lain-lain). Di dalam proses ini perasaan seseorang memegang peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya.

76

Daftar Pustaka

Abdulsyani (2012) *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ahmadi, A (2004). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.

Basrowi (2005). *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghia Indonesia.

Bungin, B (2006). *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana.

Ginintasasi, R (2012). *Interaksi Sosial*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Habib, A (2004). *Konflik Antaretnik di Pedesaan Pasang Surut Hubungan Cina- Jawa*. Yogyakarta: LKiS.

- Johson, P (2008). *Contemporary Sociological Theory An-Integrated Multi-Level Approach*. New York: Springer.
- Narwoko, D (2007). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S (2005) *Struktur dan Proses Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Taneko, S (1986). *Konsepsi System Sosial dan System Sosial Indonesia*. Jakarta: Fajar Agung.
- Morris, Desmond (1977), *Manwatching: A Field Guire to Human Behaviour*, New York: Hary N. Abrams, inc.
- Scharer, Hans (1944), *Die Dajakische Religion In Ethaologischer and Theologischer Sicht Evangelisches Mission Magazin*.
- Schechner, Richard, (2006), *Performance Studies: An Intoduction, Second Edition*, Routledge New York And London
- Mansyur, Fakhri (2011) *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insis Press.
- Hirst, Paul (2001) *Globalisasi Adalah Mitos*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
- Wardhana, Wisnu (2010) *Dampak Pemanasan Global*, Yogyakarta: Andi Offset.

TEORI PARTISIPASI

Yossita Wisman

¹ Bila dilihat dari asal katanya, partisipasi berasal dari bahasa Inggris “*participation*” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (Partan & Al-Barry, 2006: 655). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010: 46).

¹⁵ Menurut pendapat Mubyarto (1997: 35) bahwa mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. ¹⁵ Arimbi (1993: 1) mendefinisikan partisipasi sebagai *feed-forward information and feedback information*. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi

antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut (Laily, 2015: 187).

²⁹ Pengertian tentang partisipasi juga dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001: 201-202) di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R. Tilaar, (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi di mana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

²⁶ Pengertian partisipasi menurut Poerwadarminta, (1990: 998) adalah sejumlah orang yang turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Partisipasi secara formal didefinisikan sebagai turut wewenang baik secara mental dan emosional memberikan sumbangsih kepada proses pembuatan dimana keterlibatan secara pribadi orang yang bersangkutan untuk melaksanakan tanggung jawabnya (Hardjasoemantri, 1993: 7).

² Banyak para ahli yang mendefinisikan tentang partisipasi. Janabrota Bhattacharyya dalam Hardjasoemantri (1993: 7). mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Sedangkan Mubyarto dalam Hardjasoemantri

(1993: 8) mendefinisikannya sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Partisipasi juga ada yang mendefinisikan tidak semata-mata bentuk fisik dan lahiriah atau materi semata, namun juga sebagai keterlibatan mental/ pikiran dan emosi/ perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok tersebut dalam usaha mencapai tujuan bersama serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Keith Davis dalam Gultom, 2006: 11).

Korten dalam (Gultom, 2006: 11), bahwa partisipasi sebagai suatu tindakan yang mendasar untuk bekerjasama yang memerlukan waktu dan usaha, agar menjadi mantap dan hanya berhasil baik dan terus maju apabila ada kepercayaan. Di samping itu, (Gultom, 2006: 12) memberikan batasan partisipasi sebagai suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan suatu pelaksanaan dari gejala sesuatu yang berpusat pada kepentingannya dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.

Nelson Bryant, 1982 (Purnawati, 2005: 50) mengklasifikasikan partisipasi bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Selain itu partisipasi dapat disebut sebagai partisipasi vertikal dan horisontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horisontal, karena pada suatu saat tertentu tidak mustahil masyarakat

mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, di mana setiap anggota/ kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan pengambilan bagian atau keterlibatan anggota masyarakat dengan cara memberikan dukungan (tenaga, pikiran maupun materi) dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama.

18 Terjadinya partisipasi seseorang dalam suatu program menurut Cohen dalam (Sastropoetro, 1986: 122-123) disebabkan karena empat hal. *Pertama*, dari segi basisnya, yaitu partisipasi karena desakan (*impetus*) dan partisipasi karena adanya insentif. *Kedua*, segi bentuk yaitu partisipasi terjadi secara terorganisasi, ada pengarahan dari pimpinan kelompok, dan partisipasi yang dilakukan secara langsung oleh individu itu sendiri. *Ketiga*, segi keluasannya, yaitu partisipasi terjadi dengan mengorbankan waktu dan dengan menambah kesibukan di luar untuk kepentingan pribadinya. *Keempat*, dari segi efektivitasnya, yaitu dengan menjadi partisipan berharap bisa memberikan masukan/ saran atau kontribusi yang tentunya pada akhirnya akan memberi manfaat terhadap dirinya.

Dari keempat segi partisipasi tersebut bila dilihat dari prakarsa terjadinya partisipasi maka bisa digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu partisipasi yang datang dari atas (*top down*), dan partisipasi yang datang dari bawah (*bottom up*).

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang. Menurut (Sastropoetro, 1986: 27) di antara faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi adalah status sosial, kegiatan program, dan keadaan alam sekitarnya. Status sosial meliputi pendidikan, pendapatan, kebiasaan dan kedudukan sosial dalam sistem sosial. Kegiatan program merupakan kegiatan yang direncanakan dan dikendalikan oleh kelompok yang dapat berupa organisasi masyarakat dan tindakan kebijaksanaan. Sedangkan alam sekitar merupakan faktor fisik atau lingkungan tempat tinggal.

Sedangkan menurut (Mikkelsen, 2003: 17), ada tiga faktor yang mempengaruhi partisipasi yaitu:

Kepemimpinan, faktor pertama proses pengendalian usaha ditentukan sekali oleh kepemimpinan. Tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan kesadaran yang lebih tinggi dan memudahkan bagi pengembangan identifikasi terhadap tujuan program. Komunikasi, gagasan-gagasan, kebijaksanaan dan rencana-rencana akan memperoleh dukungan bila hal tersebut mudah diketahui dan dimengerti oleh masyarakat.

Ahmad & Supriyanto (2004) mengemukakan bahwa terdapat beberapa unsur penting yang tercakup dalam pengertian partisipasi tersebut, di antaranya:

1. Dalam partisipasi yang ditelaah bukan hanya keikutsertaan secara fisik tetapi juga fikiran dan perasaan (mental dan emosional).
2. Partisipasi dapat digunakan untuk memotivasi seseorang yang menyumbangkan kemampuannya kepada situasi kelompok sehingga daya kemampuan berfikir serta inisiatifnya dapat timbul dan diarahkan kepada tujuan kelompok.

3. Dalam partisipasi mengandung pengertian orang untuk ikut serta dan bertanggungjawab dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi rasa keterlibatan psikologis individu dengan tugas yang diberikan kepadanya, semakin tinggi pula rasa tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas tersebut.

Sementara menurut Gultom (2001: 27), terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan partisipasi seseorang, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi seseorang merupakan satu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikapnya terhadap suatu program.
2. Seseorang akan lebih mengetahui seluk beluk suatu program dan akan mempunyai rasa memiliki program tersebut.
3. Partisipasi merupakan hak demokrasi bila seseorang dilibatkan di dalamnya.

Dari penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (individu atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberikan peluang. Apabila ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari individu atau kelompok masyarakat, meskipun organisasi/ pemerintah telah memberikan peluang, maka partisipasipun juga tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak adanya ruang atau kesempatan yang diberikan oleh organisasi/ pemerintah untuk individu atau kelompok masyarakat, maka partisipasipun juga tidak akan terjadi.

Sundariningrum dalam (Sugiyah, 2001:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

1. Partisipasi langsung. Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Dengan kata lain, individu terlibat secara aktif di dalam kegiatan.
2. Partisipasi tidak langsung. Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

⁵⁴ Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Astuti (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis. *Pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan. *Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan *keempat*, partisipasi dalam evaluasi.

⁵⁴ *Pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, kordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

⁵⁴ *Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun

kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari luaran (*output*), sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Individu yang telah berpartisipasi mendapat manfaat dari keterlibatannya.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama, dalam suatu masyarakat, bukan individu bertindak untuk dirinya sendiri.

Hessel mengutip Nelson menyebut partisipasi terbagi dalam dua macam atau kategori:

Partisipasi horizontal. Partisipasi horizontal yaitu, partisipasi antarsesama warga, atau anggota masyarakat, di mana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan. Setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Partisipasi vertikal. Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai satu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan di mana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut/ klien. Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan (Tangkilisan, 2005: 323).

Jadi, seseorang dapat dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan jika individu itu benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan mental dan emosinya, bukan sekadar hadir dan bersikap pasif terhadap aktivitas tersebut. Adapun rasa tanggung jawab sebagai salah satu unsur dari partisipasi, sebagaimana merupakan aspek yang menentukan dalam pengambilan keputusan individu untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan. Partisipasi terkait dengan rasa tanggung jawab sebagai suatu kualitas dari masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tatkala yang bersangkutan secara sadar, bebas memilih dan menyetujui semua hal, menyerap suatu nilai, atau menerima suatu tugas.

Menurut Basrowi yang dikutip Dwiningrum (2011: 58), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Partisipasi fisik. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan kegiatan. Seperti misalnya terlibat secara fisik dengan usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan sekolah.

Partisipasi nonfisik. Partisipasi nonfisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah kegiatan tanpa hadir secara fisik, seperti meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan. Sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Sastropetro (dalam Isbandi, 2007: 16) mengemukakan pengertian partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama, dan beberapa bentuk

partisipasi masyarakat meliputi partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk dana, partisipasi dalam bentuk material, partisipasi dalam bentuk informasi.

Partisipasi melibatkan lebih banyak mental dan emosi daripada fisik seseorang, sehingga pribadinya diharapkan lebih banyak terlibat dari pada fisiknya sendiri. Partisipasi yang didorong oleh mental dan emosi yang demikian itu, disebut sebagai partisipasi «sukarela». Sedangkan partisipasi dengan paksaan disebut mobilisasi. Partisipasi mendorong orang untuk ikut bertanggung jawab di dalam suatu kegiatan, karena apa yang disumbangkannya adalah atas dasar kesukarelaan sehingga timbul rasa bertanggung jawab kepada organisasi (Deviyanti, 2013: 382).

Menurut Holil (dalam Isbandi, 2007: 21) ada beberapa bentuk partisipasi, antara lain:

- a. Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- b. Partisipasi dalam bentuk ²⁹ uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untuk memperlancar usaha bagi ²⁹ pencapaian suatu program. Partisipasi ini bisa sumbangan berupa uang, tetapi tidak dipaksakan yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat ²⁹ untuk suatu kegiatan.
- c. Partisipasi dalam bentuk harta benda adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk menyumbang harta ²⁹ benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

Daftar Pustaka

- Ahmad & Supriyanto (2004). *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arimbi, Achmad (1993). *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Deviyanti, D. (2013). "Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan". *Ejournal Administrasi Negara*. Volume 1 Nomor 2. Hal. 380.
- Dwiningrum, Astuti (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gultom, Maidin (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Adinata.
- H.A.R Tilaar (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hardjasoemantri (1993). *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Isbandi, Rukminto (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Jalal, dan Supriadi (2001). *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Mikkelsen, Britha (2003). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mubyarto (1997). *Ekonomi Rakyat, Program IDT, dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Partanto & Al-Barry (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Apollo.
- Poerwadarminta (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Purnawati (2005). *Aspirasi dan Partisipasi Orangtua Terhadap Pendidikan*. Retrieved May 20, 2013. From [http:// diglib.unnes.ac.id](http://diglib.unnes.ac.id).
- Sastropoetro, Santoso (1986). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Sugiyah (2001). "*Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar (SD) Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon Progo*". Tesis. PPs-UNY.
- Sumaryadi, Nyoman (2010). *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tangkilisan, Hessel (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

TEORI KEBIJAKAN PUBLIK

HM. Yahya

⁴
Kebijakan publik berasal dari terjemahan *public policy*, berikut kami akan jelas apa yang dimaksud *public* dan *policy*. Isamy (1996: 1) menerjemahkan kata *public* ke dalam bahasa Indonesia sangat susah misalnya diartikan masyarakat, rakyat, umum dan negara. Namun kebanyakan penulis buku menerjemahkannya sebagai “publik” saja seperti terjemahan *public policy* yaitu kebijakan publik. Kata *public* mempunyai dimensi arti yang agak banyak, secara sosiologi kita tidak boleh menyamakannya dengan masyarakat. Perbedaan pengertiannya adalah masyarakat diartikan sebagai sistem antar hubungan sosial dimana manusia hidup dan tinggal bersama-sama. Di dalam masyarakat tersebut terdapat norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang mengikat dan membatasi kehidupan anggota-anggotanya. Di lain pihak publik diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian,

minat atau kepentingan yang sama. Tidak ada norma/ nilai yang mengikat/ membatasi perilaku *public* sebagaimana halnya pada masyarakat, karena *public* sulit dikenali sifat-sifat kepribadiannya (identifikasinya) secara jelas. Satu yang menonjol adalah mereka mempunyai perhatian atau minat yang sama (Islamy, 1996: 6).

Sedangkan kebijakan yang dimaksud disepadankan dengan kata *policy* yang dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu (Pasolong, 2011: 38). Winarno (2008: 16) dan Wahab (2010: 1-2) sepakat bahwa istilah “kebijakan” ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*. Bagi para *policy makers* (pembuat kebijakan) dan orang-orang yang menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan masalah, tetapi bagi orang diluar struktur pengambilan kebijakan tersebut mungkin akan membingungkan.

Menurut Rakhmat (2009: 127), bahwa secara konseptual, kata *policy* diartikan dan diterjemahkan menjadi istilah kebijakan atau kebijaksanaan, karena memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah dalam suatu pemerintahan. Menurut Said (dalam Rakhmat, 2009: 127) perbedaan makna antara konsep kebijakan dan kebijaksanaan tidak menjadi persoalan selama kedua istilah diartikan sebagai keputusan pemerintah yang bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat atau kepentingan publik.

Banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan (*policy*). Setiap definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena

setiap ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda pula. Seorang penulis mengatakan, bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O. Jones (1996: 82) bahwa, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (*a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it*).

4
Konsep *public policy* dapat dipelajari secara sistematis pertama kali digambarkan oleh John Dewey di dalam bukunya *Logic: The Theory of Inquiry*, Dewey memberikan perhatian terhadap sifat eksperimen dari cara mengukur kebijaksanaan (*policy*). Digambarkan pula bagaimana rencana-rencana tindakan harus dipilih dari alternatif-alternatif dan bagaimana mengamati akibat-akibat yang dapat dipergunakan sebagai uji coba yang tepat (Thoha, 2008: 104).

Mac Rae dan Wilde (dalam Islamy, 1996: 8) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah orang. Pengertian ini mengandung maksud bahwa kebijakan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai, yang merupakan pilihan pemerintah dan kebijakan tersebut mempunyai pengaruh dan dampak terhadap sejumlah besar orang.

Rose (1969) sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya

dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Friedrich (dalam Thoha, 2008: 107) menyatakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pengertian-pengertian *policy* seperti dikutipkan di atas kiranya dapat dipergunakan sebagai dasar pemahaman dari *public policy*. Tetapi sehubungan dengan pernyataan Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt di atas, bahwa *policy* dilakukan baik oleh pemerintah maupun yang melaksanakan dengan menekankan adanya perilaku yang konsisten dan berulang. Maka Thomas R. Dey meragukan hal semacam itu. Menurut Dey (Thoha, 2008: 107) pemerintah sering kali melakukan hal-hal yang tidak konsisten dan tidak berulang.

“Now certainly it would be a wonderful thing if government activities were characterized by “consistency and repetitiveness”, but it is doubtful that we would ever find “public policy” in government if we insist on these criteria. Much of what government does is inconsistent and nonrepetitive. (Sekarang tentu itu akan menjadi hal yang luar biasa dari kegiatan pemerintah yang ditandai dengan “konsistensi dan pengulangan”, tetapi diragukan bahwa kita akan pernah menemukan “kebijakan publik” dalam pemerintahan jika kita bersikeras kriteria tersebut. Banyak dari apa yang dilakukan pemerintah tidak konsisten dan tidak berulang)”.

Adapun *public policy* menurut David Easton dalam Thoha (2008:107) sebagai berikut: *“The authoritative allocation of value for the*

whole society-but it turns out that only the government can authoritatively act on the 'wholw' society, and everything the government choose to do or not to do results in the allocation of values. (Alokasi otoritatif nilai bagi seluruh masyarakat. tapi ternyata bahwa hanya pemerintah otoritatif dapat bertindak pada masyarakat secara keseluruhan ', dan segala sesuatu pemerintah memilih untuk melakukan atau tidak melakukan hasil dalam alokasi nilai-nilai)".

Menurut ² Thomas R. Dye (1981) bahwa, *public policy* adalah apa pun yang dipilih oleh ⁶¹ pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*). Thomas R. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah (Pasolong, 2011: 39). Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja, dalam ³² pengertian seperti ini, maka pusat perhatian dari *public* ³² *policy* tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah (Thoha, 2008: 107).

Anderson merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan ¹ oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi (Parsons, 2001: 110). Jadi, definisi ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*) pemilihan salah satu di antara berbagai alternatif kebijakan yang tersedia.

⁴ Winarno (2008: 16) mengingatkan bahwa berkenaan dengan definisi kebijakan ini, dalam mendefinisikan kebijakan haruslah

melihat apa yang sebenarnya dilakukan dari pada apa yang diusulkan mengenai suatu persoalan. Alasannya adalah karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai.

Winarno menganggap definisi dari Anderson yang mirip dengan definisi Friedrich sebagai yang lebih tepat. Jadi, definisi ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*), pemilihan salah satu diantara berbagai alternatif kebijakan yang tersedia.

4 Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyeston sebagaimana yang dikutip oleh Winarno (2008: 17). Eyeston mengatakan bahwa 'secara luas' kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai "hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya". Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Jones. Definisi Jones tentang kebijakan publik tersebut oleh Wahab (2010: 4) digunakan untuk memberikan definisi kebijaksanaan negara. Konsep yang ditawarkan ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Wahab (2012: 4) mengajukan definisi dari Jenkis yang merumuskan kebijaksanaan publik sebagai:

"A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang

telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).”

Pendapat yang lain dikemukakan Udoji (dalam Wahab, 2010: 5). Udoji mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut: “*an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large* (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat).”

Definisi kebijakan yang oleh Wahab (2010: 5) dan Winarno (2008: 20) dianggap lebih tepat dibanding definisi lainnya adalah yang dikemukakan James Anderson yang diartikan sebagai kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Dalam kaitan ini, aktor-aktor bukan pemerintah (swasta) tentu saja dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijakan publik.

Berdasarkan pembahasan di atas, kami ingin merumuskan definisi kebijakan publik sebagai respon suatu sistem politik, melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik. Keputusan itu bisa berimplikasi pada tindakan maupun bukan-tindakan. Kata “publik” dapat berarti masyarakat dan perusahaan, bisa juga berarti negara, dan sistem politik serta administrasi. Sementara “pemerintah” adalah orang atau sekelompok orang yang diberi amanat oleh seluruh anggota suatu sistem politik untuk melakukan pengaturan terhadap keseluruhan sistem bisa RT, RW, Desa, Kabupaten, Provinsi, Negara hingga supra negara (ASEAN, EU) dan dunia (WTO, PBB).

Para ilmuwan politik yang pada masa lampau umumnya berminat terhadap proses-proses politik seperti proses legislatif, proses pemilu dan unsur-unsur sistem politik seperti kelompok kepentingan atau pendapat umum, dewasa ini telah semakin meningkatkan perhatian mereka terhadap studi kebijakan publik. Studi kebijakan publik merupakan suatu studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Kecenderungan para ilmuwan politik semakin menaruh minat yang besar terhadap studi kebijakan publik telah dinyatakan Thomas Dye (1978) sebagaimana dikutip Wahab (2010: 11-12) sebagai berikut:

“Studi ini mencakup upaya menggambarkan isi kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat dari berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”

Fenomena kecenderungan meningkatnya minat ilmuwan politik terhadap kebijakan publik dapat kita lihat dari semakin banyaknya studi mengenai kebijakan publik dalam bentuk penelitian-penelitian berkala maupun literatur-literatur yang membahas kebijakan publik secara khusus. Jika kebijakan publik dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, maka menurut Winarno (2008: 24), minat untuk mengkaji kebijakan publik telah berlangsung sejak amat lama, bahkan sejak zaman Plato dan Aristoteles, walaupun saat itu studi mengenai kebijakan publik masih terfokus pada lembaga-lembaga negara

saja. Ilmu politik tradisional lebih menekankan pada studi-studi kelembagaan dan pembenaran filosofis terhadap tindakan-tindakan pemerintah, namun kurang menaruh perhatian pada hubungan antara lembaga tersebut dengan kebijakan-kebijakan publik. Baru setelah itu perhatian para ilmuwan politik mulai beranjak pada masalah-masalah proses-proses dan tingkah laku yang berkaitan dengan pemerintahan dan aktor-aktor politik. Sejak adanya perubahan orientasi ini, maka ilmu politik mulai dianggap memberi perhatian pada masalah-masalah pembuatan keputusan secara kolektif atau perumusan kebijakan.

Persoalan-persoalan tersebut di atas merupakan persoalan atau pertanyaan penelitian kebijakan dan sekaligus menunjukkan kenapa kebijakan publik perlu dipelajari. Ada tiga alasan mengapa kebijakan publik penting/ urgen dan perlu dipelajari. Wahab dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menjelaskan ketiga alasan itu, alasan ilmiah (*scientific reason*), alasan profesional (*professional reason*), dan alasan politis (*political reason*).

Alasan pertama adalah alasan ilmiah. Dari sudut ini, maka kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses-proses perkembangannya dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Pada gilirannya hal ini akan menambah pengertian tentang sistem politik dan masyarakat secara umum. Dalam konteks seperti ini, maka kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel independen (*independent variable*).

Jika kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga

mempengaruhi isi kebijakan publik. Misalnya, bagaimana kebijakan dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan (*power*) antara kelompok-kelompok penekan dan lembaga-lembaga pemerintah? Bagaimana urbanisasi dan pendapatan nasional membantu dalam menentukan atau mempengaruhi isi atau muatan kebijakan? Sebagai variabel bebas, dapat dipertanyakan bagaimana kebijakan mempengaruhi dukungan bagi sistem politik atau pilihan-pilihan kebijakan masa depan? Pengaruh apa yang ditimbulkan oleh kebijakan pada keadaan sosial masyarakat? Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan? Dengan demikian kebijakan publik dipandang sebagai variabel bebas bila fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan terhadap sistem politik dan lingkungan.

Alasan kedua adalah alasan profesional: studi kebijakan dimaksudkan untuk menghimpun pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari. Dalam hal ini Don Price (1964) membuat perbedaan antara tingkatan ilmiah (*the scientific estate*) yang berusaha menetapkan pengetahuan dan tingkatan profesional (*the professional estate*) yang berusaha menerapkan pengetahuan ilmiah kepada penyelesaian masalah-masalah sosial praktis. Beberapa ilmuwan politik setuju bahwa seorang ilmuwan dapat membantu menentukan tujuan-tujuan kebijakan publik, namun beberapa yang lain tidak sependapat.

James Anderson termasuk yang mendukung profesionalitas (bukan hanya saintifik). Menurutnya, jika kita mengetahui sesuatu tentang fakta-fakta yang membantu dalam membentuk kebijakan publik atau konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang mungkin timbul, jika kita tahu bagaimana individu, kelompok atau pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan

kebijakan mereka, maka kita layak memberikan hal tersebut dan tidak layak untuk berdiam diri. Oleh karenanya menurut Anderson adalah sesuatu yang sah bagi seorang ilmuwan politik memberikan saran-saran kepada pemerintah maupun pemegang otoritas pembuat kebijakan agar kebijakan yang dihasilkannya mampu memecahkan persoalan-persoalan dengan baik. Tentunya pengetahuan yang didasarkan pada fakta adalah prasyarat untuk menentukan dan menghadapi masalah-masalah masyarakat.

Alasan ketiga adalah alasan politik: mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula. Sebagaimana telah diuraikan di atas beberapa ilmuwan politik cenderung pada pilihan bahwa studi kebijakan publik seharusnya diarahkan untuk memastikan apakah pemerintah mengambil kebijakan yang pantas untuk mencapai tujuan-tujuan yang tepat. Mereka menolak pendapat bahwa analisis kebijakan harus bebas nilai. Bagi mereka ilmuwan politik tidak dapat berdiam diri atau tidak berbuat apa-apa mengenai masalah-masalah politik. Mereka ingin memperbaiki kualitas kebijakan politik dalam cara-cara menurut apa yang mereka perlukan, meskipun dalam masyarakat seringkali terdapat perbedaan substansial mengenai kebijakan apa yang disebut “benar” dan “tepat” itu.

Dalam literatur ilmu politik terdapat banyak batasan atau definisi mengenai kebijakan politik yang masing-masing memberi penekanan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Faktor lain yang menyebabkan para ahli berbeda dalam memberikan definisi kebijakan publik ini menurut Winarno (2008: 16) karena perbedaan pendekatan dan model apakah kebijakan publik dilihat sebagai rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya dapat diramalkan.

Sementara itu, Santosa (1993: 4-5) dengan meng-komparasikan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam kebijakan publik mengumpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua menurut Amir Santosa berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk faham kategori atau kelompok ini terbagi ke dalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan mereka yang menganggap kebijakan publik memiliki akibat-akibat yang dapat diramalkan.

Para ahli yang termasuk ke dalam kubu ini yang pertama melihat kebijakan publik dalam ketiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Dengan kata lain, menurut kelompok atau kubu ini, kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksanan kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan kubu yang kedua lebih melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan. Kubu atau kelompok kedua ini diwakili oleh Presman dan Widavsky yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang dapat diramalkan. Dari berbagai

definisi tentang kebijakan publik yang dikemukakan para ahli, pandangan yang dikemukakan James Anderson dianggap cukup tepat. Dengan mengikuti pandangan Anderson, kebijakan publik diartikan sebagai kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Dalam kaitan dengan hal ini, aktor-aktor bukan pemerintah/ swasta tentunya dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijakan publik.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2006: 24) menyatakan ciri kebijakan publik yang utama yang disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yakni para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para raja/ ratu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para panitia pemilu (KPU dan Bawaslu) dan lain sebagainya. Mereka inilah yang menurut Easton merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan politik dan dianggap oleh sebagian besar warga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tadi dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu.

Berdasarkan pernyataan di atas maka implikasinya adalah:

- a) Kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan, bukan tindakan yang acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b) Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak hanya berupa keputusan untuk membuat undang-

undang, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan-paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.

- c) Kebijakan bersangkutan-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi atau menggalakkan program perumahan rakyat dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tersebut.
- d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara dalam bentuknya yang negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun ketika campur tangan pemerintah sebenarnya diharapkan. Sudah barang tentu tiadanya bentuk campur tangan/ keterlibatan pemerintah dapat membawa dampak tertentu bagi seluruh atau sebagian warga.

Para ahli memberikan padangan masing-masing mengenai jeniskebijakan. James Anderson (2004: 94) misalnya, menyampaikan kategori tentang kebijakan publik tersebut sebagai berikut:

- 1) Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substantif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.
- 2) Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan re-distributif. Kebijakan distributif. Kebijakan

distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

- 3) Kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*). Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Nugroho (2004: 54-57) membagi jenis-jenis kebijakan publik berdasarkan 3 kategori. Pembagian jenis kebijakan publik kategori *pertama* berdasarkan pada makna dari kebijakan publik. Berdasarkan maknanya, maka kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Kebijakan publik berdasar makna kebijakan publik dengan demikian terdiri dua jenis, yakni: kebijakan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan kebijakan atau hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. *Kedua*, pembagian jenis kebijakan publik yang didasarkan pada lembaga pembuat kebijakan publik tersebut. Pembagian menurut kategori

ini menghasilkan tiga jenis kebijakan publik. *Pertama*, kebijakan publik yang dibuat oleh legislatif. Kebijakan publik ini disebut pula sebagai kebijakan publik tertinggi. Hal ini mendasarkan teori *politica* yang diajarkan oleh Montesquieu pada abad pencerahan di Perancis yaitu abad ke-7. Demokrasi adalah sebuah suasana dimana seorang penguasa dipilih bukan atas dasar kelahiran atau kekerasan, namun atas dasar sebuah kontrak yang dibuat bersama melalui mekanisme pemilihan umum baik langsung atau tidak langsung dan siapa pun yang berkuasa harus membuat kontrak sosial dengan rakyatnya. Kebijakan publik adalah kontrak sosial itu sendiri.

Kedua kebijakan publik yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dengan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan legislatif, namun mencerminkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislatif bekerja sendiri. Di Indonesia produk kebijakan publik yang dibuat oleh kerjasama kedua lembaga ini adalah undang-undang ditingkat nasional dan peraturan daerah ditingkat daerah untuk hal-hal tertentu yang bersifat sementara sampai UU-nya dibuat. Bahkan di Indonesia yang mengesahkan UU adalah Presiden. UU sendiri disahkan setelah ada persetujuan dari legislatif dan eksekutif. Dalam hal setelah persetujuan setelah 30 hari eksekutif tidak segera mengesahkan, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat 5 UUD 1945, maka Rancangan UU tersebut dianggap sah dengan sendirinya. Di sini tampak bahwa keluaran legislatif relatif lebih tinggi daripada eksekutif.

Ketiga, kebijakan publik yang dibuat oleh eksekutif saja. Di dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup hanya melaksanakan kebijakan yang dibuat legislatif, karena dengan semakin meningkatnya kompleksitas permasalahan kehidupan

bersama sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan publik pelaksanaan yang berfungsi sebagai turunan dari kebijakan publik di atasnya. Di Indonesia ragam kebijakan publik yang ditangani eksekutif bertingkat sebagai berikut: (1) Peraturan Pemerintah, (2) Keputusan Presiden (Keppres), (3) Keputusan Menteri (Kepmen) atau Lembaga Pemerintah Nondepartemen, (4) dan seterusnya, misalnya Instruksi Menteri.

Sedangkan di tingkat daerah terdapat: (1) Keputusan Gubernur dan bertingkat keputusan dinas-dinas di bawahnya, (2) Keputusan Bupati, (3) Keputusan walikota dan bertingkat keputusan dinas-dinas di bawahnya. Pembagian jenis kebijakan publik kategori ketiga didasarkan pada karakter dari kebijakan publik yang sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan publik yang tertulis formal. Di sini kebijakan publik dibagi menjadi dua yaitu: *Pertama*, regulasi versus de-regulatif, atau restriktif versus non restriktif, dan *kedua*, alokatif versus distributif atau redistributif. Kebijakan publik jenis pertama adalah kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan. Sebagian besar kebijakan publik berkenaan dengan hal-hal yang regulatif/ restriktif dan regulatif non restriktif.

Kebijakan publik jenis kedua, kebijakan alokatif dan distributif. Kebijakan kedua ini biasanya berupa kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keluaran publik. Richard Musgrave dan Peggy Musgrave (1993), pakar keuangan publik mengemukakan bahwa fungsi dari kebijakan keuangan publik adalah fungsi alokasi yang bertujuan mengalokasikan barang-barang publik dan mekanisme pasar, fungsi distribusi yang berkenaan dengan pemerataan kesejahteraan termasuk di dalamnya perpajakan, fungsi stabilisasi yang berkenaan dengan peran penyeimbang dari kegiatan alokasi dan distribusi tersebut,

dan fungsi koordinasi anggaran yang berkenaan dengan koordinasi anggaran secara horizontal dan vertikal.

Kategori lain, Subarsono (2005: 96) mengemukakan. Secara tradisional para ilmuwan politik umumnya membagi menjadi:

- a) Kebijakan substantif (misalnya kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri dan sebagainya).
- b) Kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen).
- c) Kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya: kebijakan masa reformasi, kebijakan masa Orde Baru).

Selanjutnya menurut Young dan Quinn (dalam Suharto, 2006: 44) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.

Dunn (2003: 109-110) mengemukakan bahwa kebijakan publik (*publik policy*) adalah rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan keputusan untuk sudah berbuat), yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu (*issue areas*) yaitu serangkaian tindakan pemerintah yang aktual ataupun yang potensial mengandung konflik di antara tujuan-tujuan yang ada dalam masyarakat. Sementara Jenkins (dalam Wahab, 2008: 4) mengatakan kebijakan publik adalah:

“Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih, beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan

ini pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor.”

4 Berdasarkan beberapa pendapat para ahli kebijakan publik tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Kebijakan publik yaitu suatu agenda kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah yang merupakan tanggapan (*responsiveness*) terhadap lingkungan atau masalah publik. Sementara itu Tjokroamidjojo dan Mustopadididjaya, (1999: 98) menjelaskan bahwa untuk mampu menyelenggarakan seluruh siklus kebijakan berupa formulasi, implementasi dan evaluasi serta penilaian hasil-hasil pelaksanaan berbagai kebijakan. Maka dalam pembangunan suatu sistem administrasi diperlukan peningkatan kemampuan dalam formulasi dan implementasi kebijakan pembangunan. 4 Selanjutnya Gerald Caiden (dalam Thoha, 2008: 116) mengatakan bahwa, ruang lingkup studi kebijakan publik meliputi hal-hal sebagai berikut yaitu:

“(1) Adanya partisipasi masyarakat (*public participation*), (2) adanya kerangka kerja kebijakan (*policy framework*), (3) adanya strategi-strategi kebijakan (*policy strategies*), (4) adanya kejelasan tentang kepentingan (*public interest*), (5) adanya pelembagaan lebih lanjut dari kemampuan *public policy*, (6) adanya isi kebijakan dan evaluasinya.”

Lebih lanjut Said (dalam Rakhmat, 2009: 129) berpandangan bahwa, terdapat beberapa isi dari sebuah kebijakan yaitu:

- 1) Adanya tujuan (*goals*) tertentu yang hendak dicapai;
- 2) Rencana (*plans*) yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapai tujuan;
- 3) Program (*programs*); cara yang disahkan untuk mencapai tujuan;

- 4) Keputusan atau pilihan (*decition or choises*); tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program;
- 5) Dampak (*impack*), yaitu efek atau dampak yang ditimbulkan dari suatu program dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan Anderson sebagaimana dikutip oleh Kadji (2008: 14) dan Rakhmat (2009: 133), mengatakan bahwa proses kebijakan publik meliputi lima tahap yaitu: (1) perumusan masalah (*problem formulation*), (2) perumusan kebijakan (*policy formulation*), (3) penentuan kebijakan (*policy adoption*) (4) pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*), (5) penilaian kebijakan (*policy evaluation*).

Sedangkan Menurut Dunn (2003: 22) bahwa, proses pembuatan kebijakan publik mencakup antara lain: 1) penyusunan agenda kebijakan, 2) formulasi kebijakan, 3) adopsi kebijakan, 4) Implementasi kebijakan, dan 5) penilaian kebijakan. Berdasarkan berbagai pendapat para ahli kebijakan publik tersebut di atas, maka secara sederhana dapat dipahami bahwa kebijakan publik adalah suatu hukum yang mengatur arah dan kebijakan dari suatu pemimpin dalam pemerintahan yang disusun dan disepakati oleh masyarakat dan para pejabat yang berwenang yang diwujudkan melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, termasuk Peraturan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Michael Howlet dan M. Ramesh sebagaimana yang dikutip Subarsono (2005: 107) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- a) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.

- c) Pembuatan kebijakan (*decition making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- d) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

31

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Daerah/ Provinsi, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, dan Keputusan Bupati/ Walikota.

1

Makna modern dari gagasan “kebijakan” dalam bahasa Inggris adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik (Wilson, 1887). Sejak periode pasca Perang Dunia II. Kata *policy* mengandung makna kebijakan sebagai sebuah *rationale*, sebuah manifestasi dari penilaian penuh pertimbangan. Misalnya, bayangkan bagaimana jika para politisi mengakui bahwa mereka tidak punya kebijakan tentang persoalan x? Sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefenisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan (Parson, 2008: 14-17).

Sedangkan kata “publik” secara terminologi diartikan sebagai suatu kelompok orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu. Menurut Wayne Parson publik adalah aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya

oleh tindakan bersama (Parson, 2008: 3). Hal ini berarti bahwa masyarakat atau publik datang dengan latar belakang kepentingan yang diwujudkan dalam bentuk tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*). Intervensi terhadap publik oleh pemerintah ataupun oleh aturan sosialnya mendorong terjadinya perubahan-perubahan terhadap publik melalui usaha-usaha yang telah direncanakan. Terlepas dari perubahan tersebut membawa dampak yang bersifat baik maupun dampak yang bersifat buruk.

Usaha pemerintah untuk merespon kepentingan publik ini adalah yang disebut dengan kebijakan publik. Thomas R. Dye (1995) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *what government do, why they do it, and what different it makes*. (Harold Laswell & Abraham Kaplan, 1970) mendefinisikan sebagai *a project program of goals, values, and practices*. David Easton mendefinisikan sebagai *the impact of government activity* (Nugroho: 2006, 23-24). Berdasarkan definisi dari para pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. “dikerjakan” atau “tidak dikerjakan” merupakan keputusan, karena dilakukan atau tidak dilakukan tetap akan memberikan dampak. Menurut David Easton, dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang berkembang di dalam masyarakat, sistem politik dapat menempuhnya melalui dua cara. *Pertama*, membuat keputusan keputusan sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. *Kedua*, melakukan politisasi, yaitu membangun nilai-nilai yang ada di dalam pemerintahan (Marijan, 2010: 6).

Membuat keputusan atau kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat bukanlah hal yang mudah. Kepentingan masyarakat tidak tunggal. Pemerintah sebelum merumuskan kebijakan perlu untuk memetakan kepentingan publik yang berbeda-beda (*public*

mapping). Dengan pemetaan ini bentuk perhatian publik seperti kepentingan, aspirasi, masalah-masalah masyarakat, isu yang berkembang bisa dikenali. Pemetaan kepentingan ini akan sangat berguna karena pemerintah akan mengetahui kepentingan yang mana yang paling mendesak dan paling mewakili kepentingan dari masyarakat, sehingga kebijakan benar-benar mengandung manfaat yang paling besar kepada masyarakat. Dengan mengenali rakyatnya, pemerintah akan mengerti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat.

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh Dunn (2003: 132), dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan tiga elemen yaitu pelaku kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling terhubung dan terkait. Ilustrasi elemen kebijakan publik digambarkan di bawah ini:

Perumusan Masalah

Pada tahap perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (*agenda setting*). Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya,

memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

Peramalan

Tahap peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang *plausible* (masuk akal), potensial dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengendalikan kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan.

Rekomendasi

Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat risiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam membuat pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

Pemantauan

Pemantauan (*monitoring*), pada tahap ini menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari

kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan dalam tahap implementasi kebijakan. Banyak badan secara teratur memantau hasil dan dampak kebijakan dengan menggunakan berbagai indikator kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, kesejahteraan, kriminalitas, dan ilmu dan teknologi. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahapan kebijakan.

Evaluasi

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksihinggaan antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah (Dunn, 2003: 25-29).

Sementara Winarno (2012), menyebutkan bahwa tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Penyusunan Agenda

32

Penyusunan agenda adalah sebuah tahap dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan *stakeholder*.

Formulasi Kebijakan

32

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

Implementasi Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, James (1978). *Public Policy Making. Second Edition*. New York: University of Houston.
- Dye, Thomas (1981). *Understanding Public Policy*. 3th. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Dunn, William (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Islamy, Irfan (1997). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugroho, Rian (2009). *Public Police (Edisi Revisi)*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Parson Waene (2001). *Publik Police: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis* Edward Elgar Publishing. Ltd, (dialihbahasakan oleh Triwibowo Budi Santoso 2005), Jakarta: Kencana.

- Pasolong, Harbani (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabet.
- 4 Rakhmat (2009). *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Jakarta: Pustaka Arif.
- Santoso, Amir (1993). *Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- 31 Subarsono (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 11 Suharto, Edi (2010). *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Cetakan kelima. Bandung: Alfabeta.
- Tjokroamidjojo & Mustopadidjaja (1999). *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Thoha, Miftah (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- 31 Wahab, Abdul (2002). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, Budi (2004). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.

TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Nisful Laily

Implementasi³ merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan dalam masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah Undang-Undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya, sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggungjawab

melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung pada masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program melalui formulasi kebijakan *derivate* (turunan) dari kebijakan tersebut. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Implementasi kebijakan jika di pandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang baik.

Pada setiap perumusan kebijakan yang menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan, selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Betapapun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti. Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke

dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran brokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle dalam Wahab, 1990: 59).

Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan. Ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak bekerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya. Dalam kaitan ini, seperti dikemukakan oleh Wahab (1990: 51), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan dalam arsip kalau tidak mampu diimplementasikan.

Administator sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan yang dibuatnya. Kecenderungan terjadinya tarik ulur suatu kebijakan mulai dari perumusan, implementasi sampai dengan evaluasi kebijakan merupakan suatu proses yang wajar dan ini merupakan suatu proses yang baik dalam arti semua kepentingan peduli terhadap kebijakan yang akan dibuat.

² Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012: 21), “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver polity output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.

Menurut Agustino (2008: 139), “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.

3 Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008: 146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar maupun kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

18 Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan;
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;
3. Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Berikut tahapan operasional implementasi kebijakan:

Tahapan Interpretasi

Tahapan ini merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak dan sangat umum ke dalam kebijakan atau tindakan yang lebih bersifat manajerial dan operasional. Dalam Nugroho (2006) disebutkan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langka yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan abstrak biasanya tertuang dalam bentuk peraturan perundangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif, bisa berbentuk peraturan daerah ataupun undang-undang. Kebijakan manajerial biasanya tertuang dalam bentuk keputusan eksekutif yang bisa berupa peraturan presiden maupun keputusan kepala daerah, sedangkan kebijakan operasional berupa keputusan pejabat pemerintahan bisa berupa keputusan/peraturan menteri ataupun keputusan kepala dinas terkait. Kegiatan dalam tahap ini tidak hanya berupa proses penjabaran dari kebijakan abstrak ke petunjuk pelaksanaan/ teknis namun juga berupa proses komunikasi dan sosialisasi kebijakan tersebut baik yang berbentuk abstrak maupun operasional kepada para pemangku kepentingan.

Tahapan Pengorganisasian.

Kegiatan pertama tahap ini adalah penentuan pelaksana kebijakan (*policy implementor*) yang setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut: instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah); sektor swasta; Lembaga swadaya masyarakat maupun komponen masyarakat. Setelah pelaksana kebijakan ditetapkan; maka dilakukan penentuan prosedur tetap kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman, petunjuk dan referensi bagi

pelaksana dan sebagai pencegah terjadinya kesalahpahaman saat para pelaksana tersebut menghadapi masalah. Prosedur tetap tersebut terdiri atas prosedur operasi standar (SOP) atau standar pelayanan minimal (SPM). Langkah berikutnya adalah penentuan besaran anggaran biaya dan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan bisa diperoleh dari sektor pemerintah (APBN/ APBD) maupun sektor lain (swasta atau masyarakat). Selain itu juga diperlukan penentuan peralatan dan fasilitas yang diperlukan, sebab peralatan tersebut akan berperan penting dalam menentukan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Langkah selanjutnya adalah penetapan manajemen pelaksana kebijakan yang diwujudkan dalam penentuan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan, dalam hal ini penentuan focal point (titik fokus) pelaksana kebijakan. Setelah itu, jadwal pelaksanaan implementasi kebijakan segera disusun untuk memperjelas hitungan waktu dan sebagai salah satu alat penentu efisiensi implementasi sebuah kebijakan.

Tahapan Implikasi

Tindakan dalam tahap ini adalah perwujudan masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Menurut Islamy (2003: 114-115), implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan kon⁶⁵kuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Silalahi (2005: 43), implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.

Model Implementasi Kebijakan Publik ¹ **Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn**

Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu model dasar yang mempunyai enam variabel yang membentuk ikatan (linkage) antara kebijakan dan pencapaian (performance). Meter dan Horn (1975) dalam Wibawa (1994: 19) merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan.

Model ini seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, tidak hanya menentukan hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Selain itu dengan model ini indikator-indikator yang memuaskan dapat dibentuk dan data yang tepat dapat dikumpulkan. Dengan menggunakan pendekatan masalah seperti ini, dalam pandangan Van Meter dan Van Horn, kita mempunyai harapan yang besar untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan dibandingkan hanya sekedar menghubungkan variabel bebas dan variabel terikat dalam suatu cara yang semena-mena. Variabel-variabel tersebut dijelaskan Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:

Standar dan Tujuan Kebijakan

Suatu kebijakan tentu telah menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Karena dijadikan sebagai kriteria penilaian, maka standar dan sasaran dirumuskan secara spesifik dan kongkret (Wibawa, 1994: 20). Menurut Van

Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah terealisasi. Ukuran-ukuran dasar (standar kebijakan) dan tujuan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dari sasaran-sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen seperti regulasi dan garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi pencapaian kebijakan. Dalam beberapa hal ukuran dasar dan sasaran kebijakan harus dideduksikan oleh peneliti dan pilihan ukuran pencapaian bergantung pada tujuan yang didukung penelitian (Winarno, 2004: 110-112).

Sumber Daya

Di samping standar dan tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber daya yang tersedia. Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik berupa dana maupun perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena sangat menunjang dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam praktik implementasi kebijakan, kita seringkali mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program

yang telah direncanakan. Dengan demikian, besar kecilnya dana akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Winarno, 2004: 112).

Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi

Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pengukuhan. Semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya menjadi tanggungjawab mereka. Hanya saja komunikasi adalah proses yang rumit, yang sangat potensial untuk terjadi penyimpangan. Hal ini menyangkut persoalan kewenangan dan kepemimpinan. Organisasi atasan (*superior*) mestinya mampu mengkondisikan organisasi bawahan atau pelaksana untuk memiliki idealita sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan (Wibawa, 2004: 20).

Implementasi akan berjalan efektif bila standar dan tujuan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Dengan demikian, tujuan dan standar yang jelas, komunikasi yang tepat dengan pelaksana, konsistensi dan keseragaman tujuan dan standar yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi sangat perlu diperhatikan. Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit.

Untuk meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpannya atau menyebarluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi ataupun sumber yang sama memberikan interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan atau bahkan bertentangan, maka para pelaksana

kebijakan akan mendapatkan kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud dari kebijakan. Oleh karena itu, menurut Van Meter dan Van Horn prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan tersebut. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil sering kali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini akan membantu atasan mendorong bawahan (pelaksana) untuk bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan. Para pejabat dalam organisasi mempunyai pengaruh dan kekuasaan personil dikarenakan posisi hierarkhis mereka. Pengaruh dan kekuasaan itu antara lain dalam hal, rekrutmen dan seleksi, jenjang karir bawahan, kontrol atas alokasi anggaran, mempengaruhi perilaku bawahan serta mempunyai kewenangan dalam menanggapi pencapaian kebijakan.

Hubungan-hubungan antar organisasi maupun antar pemerintah dalam kegiatan pelaksanaan terlihat dalam dua tipe. Pertama, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Pejabat-pejabat tingkat tinggi dapat membantu para bawahan menginterpretasikan peraturan-peraturan dan garis-garis pedoman pemerintah, menstrukturkan tanggapan-tanggapan terhadap inisiatif-inisiatif dan memperoleh sumber-sumber fisik dan teknis yang diperlukan yang berguna dalam melaksanakan kebijakan. Kedua, atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif. Menurut Van Meter dan Van Horn, kita dapat menyelidiki aspek pelaksanaan ini dengan menunjuk kepada perbedaan antara kekuasaan normatif, renumeratif, dan kekuasaan koersif (Winarno, 2004: 112-114).

Karakteristik dari Agen Pelaksana/ Implementor

Menurut Ripley (1973) struktur dari agen pelaksana, yang meliputi karakteristik, norma dan pola hubungan yang potensial maupun aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi (Wibawa, 1994: 20-21). Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa karakteristik dari badan pelaksana dilihat dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Disamping itu, perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan (Winarno, 2004: 116). Menurut Van Meter dan Van Horn organisasi pelaksana memiliki enam variabel yang harus diperhatikan, yaitu: (1) kompetensi dan jumlah staf, (2) rentang dan derajat pengendalian, (3) dukungan politik yang dimiliki, (4) kekuatan organisasi, (5) derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi, dan (6) keterkaitan dengan pembuat kebijakan (Wibawa, 1994: 21).

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Sebagaimana dapat diambil inferensi logis dari bagan sistem kebijakan di depan, kondisi sosial, ekonomi dan politik juga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Ini merupakan implikasi dari perspektif sistemik. Beberapa item pertanyaan yang berkaitan dengan variabel ini diantaranya

¹ adalah: apakah sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana cukup memadai untuk mengejar efektivitas yang tinggi; bagaimana keadaan sosial-ekonomi dari masyarakat yang akan dipengaruhi kebijakan; apa opini publik yang dominan, dan bagaimana pendapat publik terhadap kebijakan, apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan, adakah kekuatan penentang; dan sejauh mana kelompok kepentingan dan swasta mendukung atau menentang kebijakan (Wibawa, 1994: 21).

Kecenderungan (Disposition) dari Pelaksana/ Implementor

Semua variabel tadi membentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan yang mereka implementasikan, untuk pada akhirnya menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya. Kognisi, netralitas dan obyektivitas para individu pelaksana sangat berpengaruh bentuk respons mereka terhadap semua variabel tersebut. Wujud respons individu pelaksana menjadi penyebab dari berhasil dan gagal implementasi. Jika pelaksana tidak memahami tujuan kebijakan, lebih-lebih apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan maka implementasi tidak akan efektif. Hal yang sama juga terjadi bila "loyalitas" pelaksana kepada organisasi rendah (Wibawa, 1994: 21-22).

¹**Model Grindle**

Implementasi kebijakan menurut Grindle (1980), ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan, tetapi ini tidak berjalan mulus, tergantung pada implementability dari program itu, yang

dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya. Isi kebijakan mencakup: (1) kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, (2) tipe atau jenis manfaat yang akan dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) siapa pelaksana program dan (6) sumber daya yang dilibatkan.

Demikian dengan konteks kebijakan juga mempengaruhi proses implementasi. Yang dimaksud oleh Grindle dengan konteks kebijakan adalah: (1) kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, (2) karakteristik lembaga dan penguasa, dan (3) kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. Intensitas keterlibatan para perencana, politisi, pengusaha, kelompok sasaran dan para pelaksana program akan bercampur-baur mempengaruhi efektivitas implementasi. Hal ini searah dengan variabel kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, dimana juga berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan (Wibawa, 1994: 22-25).

1 Model Sabatier dan Mazmanian

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*); (2) karakteristik kebijakan/ undang-undang (*ability of statute to structure implementation*); (3) variabel lingkungan (*non-statutory variables affecting implementation*) (Subarsono, 2009:94). Kerangka berpikir yang mereka tawarkan juga mengarah pada dua persoalan mendasar yaitu, kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hanya saja pemikiran Sabatier dan Mazmanian ini terkesan menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila pelaksanaannya mematuhi peraturan yang ada (Wibawa, 1994: 25).

1

Model George C. Edwards III

Menurut Edwards, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mempengaruhi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Dalam kajian implementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan dua buah pertanyaan, yaitu: prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan dapat berhasil? Kedua, hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Menurut Edwards, terdapat empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor atau variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, kecenderungan atau tingkah laku (disposisi) dan struktur birokrasi (Winarno, 2004: 125-126).

Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran (Suharsono, 2009: 90).

Aspek lain dari komunikasi menyangkut petunjuk-petunjuk pelaksanaan adalah persoalan konsistensi. Keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administrasi dan menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif. Sementara itu, ada banyak hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak-dampak buruk bagi implementasi kebijakan. Beberapa hal yang dimaksud menyangkut transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan. Adapun hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi yakni, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan; informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi sehingga mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan; faktor penghambat terakhir adalah prespektif selektif dan ketidakmauan para pelaksana kebijakan untuk mengetahui prasyarat-prasyarat suatu kebijakan.

Faktor kedua yang dikemukakan oleh Edwards III adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga

komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Namun demikian, ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi. Pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Sesuatu yang sering dihambat oleh instruksi-instruksi yang sangat spesifik menyangkut implementasi kebijakan.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Perintah-perintah implementasi yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Tindakan yang sangat longgar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan (Winarno, 2004: 126-129).

Komunikasi berasal dari bahasa latin "*communis*" yang artinya sama. Dalam pengertian ini, komunikasi adalah sesuatu yang sama, sama dalam pengertian pesan yang disampaikan memiliki kesamaan antara pemberi dan penerima pesan⁷⁵. Bisa juga berasal dari kata "*communico*", "*communication*", atau "*communicare*" yang artinya membuat sama (*to make common*). Dalam pengertian ini komunikasi berarti mencari kesamaan, atau upaya untuk mendekatkan kesamaan antara komunikator dengan komunikan, antara pemberi pesan dengan penerima pesan. Menurut Deddy

Mulyana,⁸⁵ komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama (Mulyana, 2011: 4).

Adapun³⁹ menurut Everett M Rogers dan Lawrance Kincaid, komunikasi adalah, proses di mana dua orang atau lebih melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya akan menciptakan saling pengertian yang mendalam pada orang-orang yang berkomunikasi (Wiryanto, 2004: 6). Dalam pengertian ini komunikasi melibatkan lebih dari satu pihak yang sama-sama aktif saat melakukan kegiatan komunikasi.

³⁹ Shannon & Weaver mendefinisikan komunikasi sebagai bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, secara sengaja atau tidak sengaja, tidak terbatas komunikasi dalam bentuk verbal saja, tetapi juga ekspresi wajah,²⁴ gestur, simbol, seni, dan lainnya. Sedangkan menurut Gode, komunikasi adalah, proses yang dimaksudkan untuk membuat kebersamaan dua orang atau lebih, yang semula menjadi monopoli satu atau beberapa orang. (Daryanto, 2014: 360).

Sumber Daya

¹ Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan publik.

Kecenderungan-kecenderungan

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif, jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan akan semakin sulit.

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja atau sering disebut *standard operating procedure* (SOP) dan fragmentasi. Yang pertama, berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari pada pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar.

Yang kedua, berasal terutama dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan/ atau pemerintahan (Winarno, 2004:132-154).

Daftar Pustaka

31

- Agustino, Leo (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Daryanto (2014). *Teori Komunikasi*. Jakarta: Gunung Samudera.
- Grindle, Merilee (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Jersey: Princeton University Press.
- Islamy, Irfan (2003). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyana, Deddy (2011). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Agus & Sulistyastuti, Dyah (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Silalahi, Amin (2005). *Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Surabaya: Batavia Press.
- Suharsono (2009). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Wahab, Solichin (1990). *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wibawa, Samudra (1994). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Winarno, Budi (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wiryanto (2004). *Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Grasindo.

TEORI EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

HM. Yahya

⁹ Pada dasarnya evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Dengan demikian evaluasi lebih bersifat melihat kedepan daripada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan diarahkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan (Yusuf, 2000: 3).

¹ Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap

hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi sempat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*) kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataan mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran, dalam hal ini dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi (Dunn, 2000: 11).

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, tanpa dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggungjawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Suatu hasil kebijakan dikatakan mempunyai nilai karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran, dengan kata lain kebijakan atau program tersebut telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan ditemukan dan diatasi (Sadana, 2013: 143). Pada tataran konsep seperti ini, Wiliam Dunn menjelaskan bahwa evaluasi merupakan salah satu dari proses ataupun siklus kebijakan publik setelah perumusan masalah kebijakan, implentasi kebijkan, dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan (dalam Sadana, 2013: 243).

Anderson memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Stufflebeam, mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan

proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan (dalam Arikunto, 2002: 1). Patton dan Sawicki (dalam Arikunto, 2002: 14) mengklasifikasikan metoda pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian evaluasi menjadi 6 (enam) yaitu:

- a) *Before and after comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya suatu kebijakan atau program diimplementasikan.
- b) *With and without comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan menggunakan perbandingan kondisi antara yang tidak mendapat dan yang mendapat kebijakan atau program, yang telah dimodifikasi dengan memasukan perbandingan kriteria-kriteria yang relevan di tempat kejadian peristiwa (TKP) dengan program terhadap suatu TKP tanpa program.
- c) *Actual versus planned performance comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketetapan-ketetapan perencanaan yang ada (*planned*).
- d) *Experimental (controlled) models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkontrol/ dikendalikan untuk mengetahui kondisi yang diteliti.
- e) *Quasi experimental models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/ pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.
- f) *Cost oriented models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian yang hanya didasarkan pada penelitian biaya terhadap suatu rencana

1 Sementara itu, James Anderson (dalam Sadana: 145) mengatakan bahwa:

Police evaluation as a functional activity, is as old as policy itself, policy makers and administrators have always made judgments concerning the worth or effects of particular policies, programs and projects (Evaluasi kebijakan sebagai suatu kegiatan fungsional adalah suatu kebijakan itu sendiri. Pengambilan kebijakan dan administrator senantiasa membuat penilaian terhadap keberhasilan atau terhadap dampak dari kebijakan khusus, program-program dan proyek-proyek yang dilaksanakan itu).

Menurut Winarno (2008: 225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pula kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat 1 sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

24

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program

pemerintah yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan melakukan evaluasi maka akan ditemukan fakta pelaksanaan kebijakan publik di lapangan yang hasilnya bisa positif ataupun negatif. Sebuah evaluasi yang dilakukan secara professional akan menghasilkan temuan yang obyektif yaitu temuan apa adanya, baik data, analisis dan kesimpulannya tidak dimanipulasi yang pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada perumus kebijakan, pembuat kebijakan dan masyarakat.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Dane (dalam Wibawa, 1994: 124) menyebutkan ada dua tipe evaluasi yaitu: (1) *Sumative evaluation*, adalah penilaian dampak dari suatu program, disebut juga dengan evaluasi dampak (*outcome evaluation*); (2) *Formative evaluation*, adalah penilaian terhadap proses dari program, disebut pula evaluasi proses.

Putra (2003: 100-101) mengemukakan tiga macam evaluasi kebijakan publik, yaitu:

- 1) Evaluasi administratif, yaitu evaluasi yang dilakukan di dalam lingkup pemerintahan atau di dalam instansi-instansi. Sorotan dari evaluasi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan prosedur kebijakan publik dan aspek finansial.
- 2) Evaluasi yudisial; yaitu evaluasi yang berkaitan dengan objek-objek hukum. Apakah terdapat pelanggaran hukum atau tidak dari kebijakan publik yang sedang dievaluasi tersebut.
- 3) Evaluasi politik, yaitu evaluasi yang menyangkut pertimbangan-pertimbangan politik dari suatu kebijakan.

Anderson⁶ dalam Winarno (2008: 227) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi yaitu: *Tipe pertama*, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. *Tipe kedua*, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program tertentu. *Tipe ketiga*, adalah tipe evaluasi sistematis.

Pendapat Anderson tersebut dapat dijelaskan yaitu: *Tipe evaluasi pertama*, Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembentuk kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan, program-program dan proyek-proyek.

Pertimbangan-pertimbangan ini banyak memberi kesan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah-pisah dan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan para pendukungnya dan kriteria-kriteria lainnya. Dengan demikian, suatu program kesejahteraan misalnya, oleh suatu kelompok tertentu mungkin akan dipandang sebagai program yang sangat sosialis, terlepas dari pertimbangan apa

dampaknya yang sebenarnya. Oleh karena itu, program seperti ini tidak diharapkan untuk dilaksanakan tanpa melihat dampak yang sebenarnya dari program tersebut. Atau contoh yang lain misalnya, penjualan saham perusahaan-perusahaan pemerintah (BUMN) akan dipandang sebagai proses kapitalisasi dan dianggap akan mengancam kepentingan rakyat. Demikian juga misalnya menyangkut kompensasi yang diberikan kepada pengangguran mungkin dianggap “buruk” karena evaluator “mengetahui banyak orang” yang tidak layak menerima keuntungan-keuntungan seperti itu. Pandangan-pandangan seperti ini muncul karena setiap orang dalam melihat persoalan-persoalan tadi menggunakan cara pandang yang berbeda. Sebagaimana telah kita singgung pada bab terdahulu di mana nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan individu akan mempengaruhi keseluruhan proses kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi seperti ini akan mendorong terjadinya konflik karena evaluator-evaluator yang berbeda akan menggunakan kriteria-kriteria yang berbeda, sehingga kesimpulan yang didapatkannya pun berbeda mengenai manfaat dari kebijakan yang sama.

Tipe kedua merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut: Apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan), dan berapa jumlahnya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosodur secara sah diikuti? Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam melakukan evaluasi dan memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program, maka evaluasi dengan tipe

seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Namun demikian, evaluasi dengan menggunakan tipe seperti ini mempunyai kelemahan, yakni kecenderungannya untuk menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat.

Tipe ketiga adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini secara komparatif masih dianggap baru, tetapi akhir-akhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan publik. Evaluasi sistematis melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat. Dengan demikian, evaluasi sistematis akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya? Berapa biaya yang dikeluarkan serta keuntungan apa yang dia dapat? Siapa yang menerima keuntungan dan program kebijakan yang telah dijalankan? Dengan mendasarkan pada tipe-tipe pertanyaan evaluatif seperti ini, maka konsekuensi yang diberikan oleh evaluasi sistematis adalah bahwa evaluasi ini akan memberi suatu pemikiran tentang dampak dari kebijakan dan merekomendasikan perubahan-perubahan kebijakan dengan mendasarkan kenyataan yang sebenarnya kepada para pembentuk kebijakan dan masyarakat umum. Penemuan-penemuan kebijakan dapat digunakan untuk mengubah kebijakan-kebijakan dan program-program sekarang dan membantu dalam merencanakan kebijakan-kebijakan dan program-program lain dimasa depan.

Namun demikian, suatu evaluasi tidak selamanya digunakan untuk hal-hal yang baik. Bisa juga evaluasi dilakukan untuk tujuan-tujuan buruk. Dalam hal ini Carol Weiss mengatakan bahwa para pembuat keputusan program melakukan evaluasi untuk menunda keputusan, untuk membenarkan dan mengesahkan keputusan-keputusan yang sudah dibuat, untuk membebaskan diri dari kontroversi tentang tujuan-tujuan masa depan dengan mengelakkan tanggungjawab, mempertahankan program dalam pandangan pemilihnya, pemberi dana, atau masyarakat, serta untuk memenuhi syarat-syarat pemerintah atau yayasan dengan ritual evaluasi.

Selain itu, evaluasi dapat digunakan untuk meraih tujuan-tujuan politik tertentu, misalnya evaluasi yang dilakukan oleh partai oposisi dalam suatu pemerintahan biasanya seringkali digunakan untuk menjatuhkan partai yang berkuasa. Oleh karena itu, motivasi seorang evaluator dalam melakukan evaluasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yakni motivasi untuk melayani kepentingan publik dan motivasi untuk melayani kepentingan pribadi. Bila seorang evaluator mempunyai motivasi pelayanan publik, maka evaluasi digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik, yakni dalam rangka membenahi kualitas kebijakan publik. Namun bila para evaluator lebih mengedepankan melayani kepentingan sendiri, maka evaluasi kebijakan yang dijalankan digunakan untuk hal-hal yang kurang baik.

Jenis-Jenis Evaluasi

Secara umum, Nugroho (2008: 537) membagi evaluasi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Evaluasi pada Tahap Perencanaan

Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu diperlukan berbagai teknik yang dapat dipakai oleh perencana. Satu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dari permasalahannya sendiri.

2) Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, evaluasi adalah suatu kegiatan dengan melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara evaluasi menurut pengertian ini dengan mentoring. Mentoring menganggap bahwa tujuan yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Mentoring melihat apakah pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan. Sedangkan evaluasi melihat sejauh mana masih tetap dapat mencapai tujuannya, apakah tujuan tersebut sudah berubah, apakah pencapaian hasil kebijakan tersebut akan memecahkan masalah yang ingin dipecahkan. Evaluasi juga mempertimbangkan faktor-faktor luar yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut, baik membantu atau menghambat.

3) Evaluasi pada Tahap Paska Pelaksanaan

Dari sini pengertian evaluasi hampir sama dengan pengertian pada tahap pelaksanaan, hanya perbedaannya yang dinilai dan

9 dianalisa bukan lagi tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana, tetapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Fungsi Evaluasi

6 Fungsi Evaluasi kebijakan publik menurut Nugroho (2004: 463) memiliki empat fungsi, yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola-pola hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang diamatinya.

- a) Eksplanasi, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
- b) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan.
- c) Audit, Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai kekelompok saran kebijakan, atau ada kebocoran, atau penyimpangan.
- d) Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut.

Fungsi utama evaluasi, *pertama* memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan public. *Kedua*, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. evaluasi akan memberikan

informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik (Nugroho, 2004: 185).

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai hasil yang dicapai oleh suatu kebijakan setelah dilaksanakan. Hasil yang dicapai dapat diukur dalam ukuran jangka pendek atau *output*, jangka panjang atau *outcome*. Evaluasi kinerja kebijakan dengan melakukan penilaian komprehensif terhadap: (a) Pencapaian target (*output*); (b) Pencapaian tujuan kebijakan (*outcome*); (c) Kesenjangan (*gap*) antar target dan tujuan dengan pencapaian; (d) Perbandingan (*benchmarking*) dengan kebijakan yang sama ditempat lain yang berhasil; (e) Identifikasi faktor pendukung keberhasilan dan kegagalan sehingga menyebabkan kesenjangan, dan memberikan rekomendasi untuk menanggulangi kesenjangan.

Fungsi dari evaluasi kebijakan publik menurut Putra (2003: 93) ada tiga hal pokok, yaitu: (1) memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan; (2) untuk menilai kepasan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi; dan (3) untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama segi metodologinya. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi kebijakan dilakukan agar proses kebijakan secara keseluruhan dapat berlangsung secara baik.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2008: 227), evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. *Tugas pertama* adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan *tugas kedua* adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tugas pertama merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak. Bila tidak, faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya? Misalnya, apakah karena terjadi kesalahan dalam merumuskan masalah ataukah karena faktor-faktor yang lain? *Tugas kedua* dalam evaluasi kebijakan pada dasarnya berkait erat dengan tugas yang pertama. Setelah kita mengetahui konsekuensi-konsekuensi kebijakan melalui penggambaran dampak kebijakan publik, maka kita dapat mengetahui apakah program kebijakan yang dijalankan sesuai atau tidak dengan dampak yang diinginkan. Dari sini kita dapat melakukan penilaian apakah program yang dijalankan berhasil ataukah gagal? Dengan demikian, tugas kedua dalam evaluasi kebijakan adalah menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak dalam meraih dampak yang diinginkan.

Dari kedua hal yang dipaparkan di atas, maka kita dapat menarik suatu kesimpulan mengenai arti pentingnya evaluasi dalam kebijakan publik. Pengetahuan menyangkut sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dalam meraih dampak yang diinginkan dapat dijadikan pedoman untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan di masa yang akan datang.

Untuk memenuhi tugas tersebut, suatu evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yakni pengkhususan (*spesification*), pengukuran (*measurement*), analisis, dan rekomendasi. Spesifikasi merupakan kegiatan yang paling penting diantara kegiatan yang lain dalam evaluasi kebijakan. Kegiatan ini meliputi identifikasi tujuan atau kriteria melalui hasil kebijakan tersebut akan dievaluasi. Ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria inilah yang akan kita pakai untuk menilai manfaat program kebijakan. Pengukuran menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk obyek evaluasi, sedangkan analisis adalah penggunaan informasi

yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan. Dan akhirnya, rekomendasi, yakni penentuan mengenai apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang.

Terdapat beberapa alasan untuk menjawab mengapa perlu ada kegiatan evaluasi kebijakan. Alasan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi, internal dan eksternal. Yang bersifat internal, antara lain:

- 1) Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan. Dengan adanya evaluasi kebijakan dapat ditemukan informasi apakah suatu kebijakan sukses ataukah sebaliknya.
- 2) Untuk mengetahui efektivitas kebijakan. Kegiatan evaluasi kebijakan dapat mengemukakan penilaian apakah suatu kebijakan mencapai tujuannya atau tidak.
- 3) Untuk menjamin terhindarinya pengulangan kesalahan (*guarantee to non-recurrence*). Informasi yang memadai tentang nilai sebuah hasil kebijakan dengan sendirinya akan memberikan rambu agar tidak terulang kesalahan yang sama dalam implementasi yang serupa atau kebijakan yang lain pada masa-masa yang akan datang.

Sedangkan alasan yang bersifat eksternal paling tidak untuk dua kepentingan:

- a) Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Kegiatan penilaian terhadap kinerja kebijakan yang telah diambil merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengambil kebijakan kepada publik, baik yang terkait secara langsung maupun tidak dengan implementasi tindakan kebijakan.
- b) Untuk mensosialisasikan manfaat sebuah kebijakan. Dengan adanya kegiatan evaluasi kebijakan, masyarakat luas, khususnya kelompok sasaran dan penerima, manfaat dapat mengetahui manfaat kebijakan secara lebih terukur.

Model Evaluasi Kebijakan Publik

Dari Thomas Cook dan Frank Scioli, dalam studi *Impact Analysis in Public Policy Research* (1975: 98), setelah dimodifikasi, skema dari model evaluasi dampak kiranya dapat diilustrasikan. William Dunn (dalam Keban, 2008: 143), mengemukakan beberapa model evaluasi kebijakan publik yang terdiri dari :

- 1) *The adversary model*. Para evaluator dikelompokkan menjadi dua, yang pertama bertugas menyajikan hasil evaluasi program yang positif, hasil dampak kebijakan yang efektif dan baik, tim kedua berperan untuk menemukan hasil evaluasi program negatif, tidak efektif, gagal dan yang tidak tepat sasaran. Kedua kelompok ini dimaksudkan untuk menjamin adanya netralitas serta obyektivitas proses evaluasi. Temuannya kemudian dinilai sebagai hasil evaluasi. Menurut model dari evaluasi ini tidak ada efisiensi data yang dihimpun.
- 2) *The transaction model*. Model ini memperhatikan penggunaan metode studi kasus, bersifat naturalistik dan terdiri dua jenis, yaitu: evaluasi responsif (*responsive evaluation*) yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan secara informal, berulang-ulang agar program yang telah direncanakan dapat digambarkan dengan akurat; dan evaluasi iluminatif (*illuminative evaluation*) bertujuan untuk mengkaji program inovatif dalam rangka mendeskripsikan dan menginterpretasikan pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Jadi evaluasi model ini akan berusaha mengungkapkan serta mendokumenter pihak-pihak yang berpartisipasi dalam program.
- 3) *Good free model*. Model evaluasi ini bertujuan untuk mencari dampak aktual dari suatu kebijakan, dan bukan hanya sekedar untuk menentukan dampak yang diharapkan sesuai dengan

ditetapkan dalam program. Dalam upaya mencari dampak aktual, evaluator tidak perlu mengkaji secara luas dan mendalam tentang tujuan dari program yang direncanakan. Sehingga evaluator (peneliti) dalam posisi yang bebas menilai dan ada obyektivitas.

Evaluasi Kebijakan Publik sering kali diartikan sebagai aktivitas yang hanya mengevaluasi hasil kebijakan, selanjutnya mengevaluasi anggaran, baik (rutin/ pembangunan). Akan tetapi Evaluasi Kebijakan Publik⁴¹ juga membahas aktivitas atau kegiatan pembangunan lainnya. Evaluasi kebijakan sering juga disamakan dengan evaluasi program yaitu evaluasi secara komprehensif kepada seluruh sistem. Selain itu, ada juga evaluasi yang disebut evaluasi masalah atau evaluasi prosedur (menggunakan term evaluasi implentasi), yaitu penilaian hanya pada bagian-bagian sistem. Sebagaimana di gambarkan oleh Sadana (2011: 257).

Masih menurut House (dalam William Dunn, 2003: 194) mengatakan, ada 3 macam evaluasi kebijakan publik, ialah:

- a) *Evaluasi administratif*. Evaluasi kebijakan publik yang dilakukan sebatas dalam lingkungan pemerintahan atau instansi pemerintah. Dilaksanakan untuk mengevaluasi proyek pemerintah, biasanya berkaitan dengan masalah keuangan dan sebagai alat mengetahui apakah proyek pemerintah itu sudah sesuai dengan yang direncanakan (*the expected goals*).
- b) *Evaluasi yudisial*. Evaluasi ini melihat apakah kebijakan itu melanggar hukum. Sedangkan yang melaksanakan evaluasi yudisial adalah lembaga-lembaga hukum, pengacara, pengadilan, dan kejaksaan.
- c) *Evaluasi politik*. Pada umumnya evaluasi politik dilakukan oleh lembaga politik, misalnya: parlemen, parpol, atau

masyarakat. Pertimbangan politik apa saja dan bagaimana yang seharusnya mungkin dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi suatu kebijakan.

9

Daftar Pustaka

Arikunto, S (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Dunn, William (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GadjahMada Press.

Keban, Y.T (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Nugroho, Riant (2008). *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

6

Putra, Fadillah (2003). *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sadana kridawati (2013). *Realitas Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.

Cook, Tomas & Scioli, Frank (1975). *Impact Analisis in Public Policy Research*.

Wibawa, Samudra. *et. al* (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

31

Winarno, Budi (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Yusuf, Farida (2000). *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.

TEORI INTERAKSI SIMBOLIK

Teresia Noiman Derung

Teori interaksi simbolik dipelopori oleh George Herbert Mead, dengan pemikiran yang mendasar bahwa manusia hidup terus menerus, melibatkan diri dalam proses beradaptasi dengan lingkungannya sehingga manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu sebagai bentuk evolusi (Ritzer, 2011: 254). Arisandi (2015: 111) menuliskan pandangan Colley mengenai interaksi sosial yaitu diri merupakan produk dari interaksi sosial.

79

Karakter utama dari interaksi simbolik adalah hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan masyarakat dengan individu. Interaksi antar individu ini berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan bersama. Interaksi simbolik ini dilakukan secara sadar, menggunakan gerak tubuh, yaitu suara atau vokal, gerakan isyarat atau gerakan fisik, ekspresi tubuh, yang semuanya itu mengandung arti atau makna.

Wirawan (2012: 110) menyebut gerakan ini sebagai simbol yang mengandung makna.

Bentuk paling sederhana dan pokok dalam komunikasi interaksi simbolik adalah menggunakan isyarat karena manusia mampu menjadi objek untuk dirinya sendiri dan melihat tindakan-tindakannya seperti orang lain melihat tindakannya. Dalam komunikasi, manusia juga menggunakan kata-kata atau suara yang mengandung arti dan dipahami bersama dalam masyarakat itu. Komunikasi menggunakan kata-kata atau suara merupakan komunikasi standar dalam relasi dengan sesama. Komunikasi ini merupakan komunikasi simbolik.

Penggunaan simbolik dalam komunikasi reflektif memang tidak kelihatan tetapi menginspirasi kesadaran atau pikiran (*mind*) tentang diri. Mead mengatakan bahwa diri seseorang bisa berkembang internal, maka konsep *diri* secara tidak kelihatan menunjuk pada identitas diri yang dinyatakan oleh orang lain. Masyarakat berbentuk melalui pertukaran gerak tubuh dan bahasa (simbol) yang mewakili proses mental. Simbol yang dikomunikasikan dalam gerak tubuh dan bahasa ini mengandung makna sehingga terjadilah komunikasi dalam masyarakat dan terjadilah relasi antar satu dengan yang lainnya. Komunikasi murni bisa terjadi dalam masyarakat kalau simbol itu dipahami oleh masing-masing pihak, dan masing-masing pihak itu juga berusaha untuk memahami makna yang diberikan oleh pihak lain.

Landasan berpikir atau asumsi dari teori interaksi simbolik adalah interaksi berlangsung di antara berbagai pemikiran dan makna yang menjadi karakter masyarakat. Dalam berinteraksi, masing-masing diri (*self*) dan masyarakat (*society*) sebagai aktor dan keduanya tak dapat dipisahkan, saling menentukan. Tindakan

seseorang adalah hasil dari *stimulasi internal* atau dari bentuk sosial diri dan masyarakat. Karakteristik dari interaksi simbolik ditandai dengan hubungan antar individu dalam masyarakat melalui komunikasi, komunikasi ini menggunakan simbol-simbol yang mereka ciptakan dan sepakati bersama.

Secara implisit, interaksi simbolik didefinisikan melalui gerakan tubuh karena dalam gerakan tubuh akan terlihat, seperti suara atau vokal, gerakan fisik atau isyarat dan ekspresi tubuh yang seluruhnya mengandung makna. Ketika interaksi simbolik berlangsung, tiap partisipan mengambil perannya sendiri-sendiri yang bersifat khusus, namun ada kalanya para partisipan dalam memaknai perannya tidak konsisten sehingga mereka (aktor) memodifikasi peran untuk menghubungkan peran yang satu dengan yang lainnya.

Dasar atau pandangan teori behaviorisme adalah perilaku individu merupakan sesuatu yang dapat diamati, artinya mempelajari tingkah laku manusia secara objektif dari luar, dari pelaku yang mendatangkan respon, tanpa melibatkan mental *tersembunyi* sedangkan pandangan interaksi simbolik menurut Mead adalah mempelajari tindakan sosial dengan menggunakan teknik introspeksi untuk dapat mengetahui sesuatu atau makna yang dapat melatarbelakangi tindakan sosial dari sudut pandang aktor.

Dengan demikian, manusia bertindak bukan hanya karena stimulus-respon, melainkan juga didasarkan atas makna yang diberikan terhadap tindakan tersebut. Menurut Mead, sebelum orang melakukan suatu tindakan yang sebenarnya, orang tersebut mencoba mempertimbangkan beberapa alternatif melalui pemikirannya. Mempertimbangkan beberapa alternatif ini sebagai suatu proses mental *tersembunyi*, sebelum melakukan tindakan

sesungguhnya. Dalam berpikir, manusia berinteraksi dengan dirinya sendiri menggunakan simbol-simbol yang mengandung makna dan manusia akan memilih makna stimulus yang yang dituju kepadanya akan ditanggapi. Dengan demikian, individu tidak secara langsung menanggapi setiap stimulus tetapi terlebih dahulu memilih mana stimulus yang dituju kepadanya dan akan ditanggapi.

Wirawan (2012:121) menuliskan premis atau dasar pemikiran interaksi simbolis menurut Blumer sebagai berikut:

- 1) Manusia melakukan tindakan terhadap "sesuatu" berdasarkan makna yang dimiliki oleh "sesuatu" itu untuk mereka.
- 2) Makna dari "sesuatu" itu berasal dari interaksi sosial yang dialami seseorang dengan sesamanya.
- 3) Makna-makna yang ditangani, dimodifikasi melalui proses interpretatif yang digunakan orang dalam berhubungan dengan "sesuatu" yang ditemui.

Maksud dari premis yang disebutkan di atas menurut Blumer adalah interaksi antar manusia dalam interaksi simbolisme memiliki kekhasan yaitu manusia saling menginterpretasikan atau menterjemahkan dan mendefinisikan tindakannya, dan bukan hanya reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap yang lain, seperti paham behaviorisme, tetapi didasarkan atas "makna" yang diberikan terhadap tindakan orang lain tersebut.

Interaksi antar individu dihubungkan oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau saling berusaha memahami maksud dari tindakan-tindakan masing-masing. Jadi, proses interaksi manusia itu bukan terjadi secara otomatis, stimulus langsung menimbulkan tanggapan atau respon, tetapi antara stimulus yang diterima dan respon yang terjadinya sesudahnya terdapat proses interpretasi antar

aktor. Proses *interpretasi* atau *penafsiran* menjadi penengah dalam proses stimulus dan respon stimulus dan respon dalam interaksi simbolik. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran teori interaksi simbolik dan yang membedakannya dengan teori behaviorisme radikal.

Manusia dalam perspektif interaksi simbolik menurut Blumer adalah aktor yang sadar dan reflektif, yang menyatukan objek-objek yang diketahuinya melalui proses yang disebut *self-indication*, yaitu proses komunikasi yang sedang berjalan di mana individu selalu menilainya, memberi makna, dan memutuskan untuk bertindak sesuai dengan makna yang sudah mereka pakti bersama. Hal ini disebut proses *self*. Proses *indication* terjadi dalam konteks hubungan sosial di mana individu mencoba mengantisipasi tindakan-tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana ia menafsirkan tindakan itu. Dengan demikian, realitas sosial adalah merupakan proses yang dinamis dan manusia adalah aktor dari proses yang dinamis itu.

Teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah individu (Soeprapto, 2007). Sedangkan menurut Ralph Larossa dan Donald Reitzes (1993) dalam West Turner (2008: 96), interaksi simbolik pada intinya menjelaskan ventang kerangka referensi untuk memahami bagaimana manusia, bersama dengan orang lain, menciptakan dunia simbolik dan bagaimana cara dunia membentuk perilaku manusia.

Menurut Effendy (1989: 352) interaksi simbolik adalah suatu paham yang menyatakan bahwa hakekat terjadinya interaksi sosial antara individuan antarindividu dengan kelompok, kemudian antara kelompok dengan kelompok dalam masyarakat, ialah karena komunikasi, suatu kesatuan pemikiran dimana

sebelumnya pada diri masing-masing yang terlibat berlangsung internalisasi atau pematangan. Menurut Mead, teori interaksi simbolik adalah hubungan antara simbol dan interaksi. Menurut Mead, orang bertindak berdasarkan makna simbolik yang muncul dalam sebuah situasi tertentu. Sedangkan simbol adalah representasi dari sebuah fenomena, di mana simbol sebelumnya sudah disepakati bersama dalam sebuah kelompok dan digunakan kesamaan makna bersama,

Lingkup pembahasan teori interaksi simbolik, menurut Mead, manusia mempunyai sejumlah kemungkinan tindakan dan pemikirannya sebelum ia memulai tindakan yang sebenarnya dengan melalui pertimbangan. Karena itu, dalam tindakan manusia terdapat suatu proses mental yang tertutup yang mendahului proses tindakan yang sesungguhnya.

Berpikir menurut Mead adalah suatu proses individu berinteraksi dengan dirinya sendiri dengan memilih dan menggunakan simbol-simbol yang bermakna. Melalui proses interaksi dengan dirinya sendiri itu, individu memilih mana diantara stimulus yang tertuju padanya akan ditanggapinya. Dengan demikian, individu tidak secara langsung menanggapi stimulus, tetapi terlebih dahulu memilih dan kemudian memutuskan stimulus yang akan ditanggapinya.

Simbol atau tanda yang diberikan oleh manusia dalam melakukan interaksi mempunyai makna-makna tertentu, sehingga dapat menimbulkan komunikasi. Menurut Mead, komunikasi secara mumi baru terjadi bila masing-masing pihak tidak saja memberikan makna pada perilaku mereka sendiri, tetapi memahami atau berusaha memahami makna yang diberikan oleh pihak lain. Dalam hubungan ini, Habermas mengemukakan dua kecenderungan fungsional dalam argumen bahasa dan komunikasi

serta hubungan dengan perkembangan manusia. *Pertama*, bahwa manusia dapat mengarahkan orientasi perilaku mereka pada konsekuensi-konsekuensi yang paling positif. *Kedua*, sebagai kenyataan bahwa manusia terlibat dalam interaksi makna yang kompleks dengan orang yang lain, dapat memaksa mereka untuk cepat berinteraksi dengan apa yang diinginkan orang lain.

Pada awal perkembangannya, interaksi simbolik lebih menekankan studinya tentang perilaku manusia pada hubungan interpersonal, bukan pada keseluruhan kelompok atau masyarakat. Proporsi paling mendasar dari interaksi simbolik adalah perilaku dan interaksi manusia itu dapat dibedakan, karena ditampilkan lewat simbol dan maknanya. Mencari makna di balik yang sensual menjadi penting di dalam interaksi simbolis. Secara umum, ada enam proporsi yang dipakai dalam konsep interaksi simbolik, yaitu;

1. Perilaku manusia mempunyai hal di balik yang menggejala;
2. Pemaknaan manusia perlu dicari sumber pada interaksi sosial manusia;
3. Masyarakat merupakan proses yang berkembang holistik, tak terpisah, tidak linear, tidak terduga;
4. Perilaku manusia itu berlaku berdasarkan berdasar penafsiran fenomenologik, yaitu berlangsung atas maksud, pemaknaan, dan tujuan, bukan didasarkan atas proses mekanik dan otomatis;
5. Konsep mental manusia itu berkembang dialektik; dan
6. Perilaku manusia itu wajar dan konstruktif reaktif;
7. Subtansi dan perbincangan interaksi simbolik.

Daftar Pustaka

- Arisandi, Herman (2015). *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Dari Klasik Sampai Modern*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Effendy, Uchjana (1989). *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- ²⁰ Ritzer, George (2011). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirawan, Ida Bagus (2014). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, & Perilaku Sosial)*. Jakarta: Kencana.
- West, Richard & Turner, Lynn (2008). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis Dan Aplikasi*. Buku 1 edisi ke-3 (Terjemahan Maria Natalia Damayanti Maer). Jakarta: Salemba Humanika.
- Soeprapto (2007). *Interaksi Simbolik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

TEORI JARINGAN SOSIAL

Nisful Laily

⁷⁵ Selama manusia hidup manusia tidak akan pernah bisa lepas dari proses komunikasi dan interaksi. Pada saat melakukan sebuah proses komunikasi maka segala sikap, tingkah laku dan semua atribut manusia sangat ditentukan oleh lingkungan dan dengan siapa berinteraksi, baik disadari maupun tidak pengaruh tersebut. Dengan menjalin komunikasi dan interaksi sehingga menemukan relasi⁶⁴ maka dalam kehidupan manusia itu telah terbentuk sebuah jaringan sosial. Jaringan sosial (*social network*) adalah sebuah pola koneksi dalam hubungan sosial individu, kelompok dan berbagai bentuk kolektif lain. Hubungan ini bisa berupa hubungan interpersonal atau bisa juga bersifat ekonomi politik, atau hubungan sosial yang lain.

³³ Teori jaringan memiliki gagasan adanya struktur organisasi yang terdiri dari pola interaksi antar anggotanya. Van Dijk (2006) mendeskripsikan jaringan sosial sebagai sistem sosial dengan ikatan konkret dalam hubungan yang abstrak. Artinya, jaringan

sosial terdiri dari pelaku sosial-sebagai nodes (titik sambungan), yang saling berinteraksi dan menjalin hubungan (*link*). Menurut Wasserman & Faust (1994) terdapat 8 (delapan) konsep utama dalam analisis jaringan sosial, aktor/ aktor, dapat berupa individu, korporasi, atau unit sosial secara kolektif;

1. Ikatan relasi (*relational ties*). Aktor-aktor dihubungkan dengan ikatan sosial. Ikatan merupakan pembentukan suatu hubungan antara sepasang aktor yang diperhatikan dalam berbagai hal seperti konteks pertemanan, kesukaan, dan lain-lain;
2. *Dyad*, yaitu ikatan antara 2 (dua) aktor, atau kelompok yang terdiri dari 2 (dua) orang yang mana di dalamnya terdapat aktifitas di mana anggotanya dipasangkan dengan satu sama lain untuk mendiskusikan persoalan-persoalan atau menyelesaikan tugas;
3. *Triad*, merupakan hubungan antara sekumpulan aktor yang lebih besar. Analisis triad dilakukan untuk memperlihatkan adanya keseimbangan atau transivitas dari suatu hubungan;
4. Sub Kelompok (*subgroup*). *Dyad* adalah pasangan aktor dan terkait dalam ikatan, triad adalah tiga aktor yang terkait dalam ikatan. Sehingga subgroup dari aktor adalah setiap sekumpulan aktor yang memiliki ikatan antara satu sama lain;
5. Kelompok (*group*), adalah kumpulan dari aktor-aktor yang ikatan-ikatanya dapat diukur baik secara teoritis, empiris maupun konseptual;
6. Relasi (*relation*) yaitu ikatan dari jenis yang khusus antara anggota suatu kelompok adalah relasi;
7. Jaringan Sosial, terdiri dari seperangkat batasan atau sekumpulan aktor dan relasi, dan relasi-relasi yang didefinisikan oleh aktor-aktor yang terkait.

Kehadiran relasi informasi merupakan hal yang kritis dan mendefinisikan fitur dari suatu jaringan sosial (Wasserman & Faust, 1994). Sedangkan menurut Newman (2003) jaringan sosial adalah seperangkat manusia atau kelompok manusia dengan pola-pola kontak atau interaksi antara mereka.

2

Pada teori jaringan banyak di bahas tentang hubungan antara satu aktor (individu atau kelompok) dengan aktor lainnya. Salah satu ciri khas teori jaringan adalah pemusatan pemikiran pada tingkat makro, artinya aktor atau pelaku bisa saja individu (Wellman, 1983 dalam Ritzer, 2004), atau mungkin juga kelompok, perusahaan dan masyarakat.

Kaitannya dalam hal ini teori jaringan membahas tentang hubungan yang terjadi pada tingkat struktur sosial skala luas sampai tingkat yang lebih mikroskopik (ukuran sangat kecil). Analisis jaringan lebih ingin mempelajari keteraturan individu atau kolektivitas berperilaku ketimbang keteraturan keyakinan tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Karena itu pakar analisis jaringan mencoba menghindari penjelasan normatif dari perilaku sosial. Mereka menolak penjelasan non struktural yang memperlakukan proses sosial sama dengan penjumlahan ciri pribadi aktor individual dan norma tatanan. Hubungan ini berlandaskan gagasan bahwa setiap aktor (individual atau kelompok) memiliki akses berbeda terhadap sumber daya yang menilai (kekayaan, kekuasaan, informasi). Akibatnya adalah bahwa sistem yang berstruktur cenderung terstratifikasi, komponen tertentu tergantung pada komponen lain.

Teori jaringan juga memiliki beberapa prinsip logis yang merupakan tempat bersandarnya pemikiran-pemikiran teori jaringan itu sendiri. (Wellman dalam Ritzer, 2004) yaitu:

1. Ikatan antar aktor biasanya adalah simetris baik dalam kadar

- maupun intensitasnya;
2. Ikatan antara individu yang harus dianalisis dalam konteks struktur jaringan lebih luas;
 3. Terstrukturanya ikatan sosial menimbulkan berbagai jenis jaringan non acak;
 4. Adanya kelompok jaringan menyebabkan terciptanya hubungan silang antara kelompok jaringan maupun antara individu;
 5. Ada ikatan asimetris antara unsur-unsur di dalam sebuah sistem jaringan dengan akibat bahwa sumber daya yang terbatas akan terdistribusikan secara tak merata;
 6. Distribusi yang berasal dari sumber daya yang terbatas menimbulkan baik itu kerjasama maupun kompetisi;

Jaringan sosial merupakan suatu jaringan tipe khusus, di mana “ikatan” yang menghubungkan satu titik ke titik lain dalam jaringan adalah hubungan sosial. Berpijak pada jenis ikatan ini, maka secara langsung atau tidak langsung yang menjadi anggota suatu jaringan sosial adalah manusia (person). Jaringan sosial tidak hanya beranggotakan pada satu individu, namun dapat juga berupa sekumpulan orang yang mewakili titik-titik seperti yang dikemukakan sebelumnya, jika tidak harus satu titik mewakili satu orang, misalnya organisasi, instansi, pemerintah atau negara.

Sementara hubungan sosial atau saling keterhubungan merupakan interaksi sosial yang berkelanjutan (relatif cukup lama atau permanen) yang terakhir di antara mereka terikat satu sama lain dengan atau oleh seperangkat harapan yang relatif stabil (Zanden dalam Agusyanto, 2007). *Membershop group* merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut (Soerjono Soekanto, 2010).

Hubungan sosial bisa dipandang sebagai sesuatu yang seolah-olah merupakan sebuah jalur atau saluran yang menghubungkan antara satu orang (titik) dengan orang-orang lain di mana melalui jalur atau saluran tersebut bisa dialirkan sesuatu, misalnya barang, jasa, dan informasi. Hubungan sosial antara dua orang mencerminkan adanya pengharapan peran dari masing-masing lawan interaksinya. Tingkah laku yang diwujudkan dalam suatu interaksi sosial itu sistematis, meskipun para pelakunya belum tentu menyadarinya. Dari terwujudnya hubungan sosial yang baik maka akan memudahkan jaringan sosial berkembang. Jaringan sosial menjadi sangat penting di dalam masyarakat karena di dunia ini bisa dikatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak menjadi bagian dari jaringan-jaringan hubungan sosial dari manusia lainnya. Walaupun begitu manusia tidak selalu menggunakan semua hubungan sosial yang dimilikinya dalam mencapai tujuan-tujuannya, tetapi disesuaikan dengan ruang dan waktu atau konteks sosialnya (Agusyanto, 2007).

Ada 3 (tiga) pembagian tipe keteraturan jaringan sosial menurut Epstein (dalam Agusyanto, 2007) yaitu:

1. Ketentuan struktural. Di mana perilaku orang-orang diinterpretasikan dalam term tindakan-tindakan yang sesuai dengan posisi-posisi yang mereka duduki dalam suatu perangkat tatanan posisi-posisi.
2. Keteraturan kategorikal. Di mana perilaku seseorang di dalam situasi-situasi yang tidak terstruktur bisa diinterpretasi ke dalam term stereotipe-stereotipe.
3. Keteraturan personal. Dimana perilaku orang-orang baik di dalam situasi yang terstruktur maupun tidak, bisa diinterpretasikan ke dalam pengertian-pengertian ikatan-ikatan personal yang dimiliki seseorang individu dengan orang lain.

Barnes membedakan jaringan² untuk kepentingan penelitiannya, menurut Barnes (dalam Agusyanto, 2007) jaringan dibedakan atas, jaringan total digunakan untuk menyebut jaringan sosial yang kompleks, dan jaringan partial untuk menyebut jaringan yang hanya berisi satu jenis hubungan sosial. Lain hal lagi bila jaringan sosial ditinjau dari tujuan hubungan social yang membentuk jaringan-jaringan. Beberapa pakar antropologi maupun sosiologi dari beberapa literatur mengatakan, dari sisi ini jaringan sosial dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu:

1. Jaringan *interest* (kepentingan), terbentuk dari hubungan-hubungan sosial yang bermuatan kepentingan.
2. Jaringan *power*, hubungan-hubungan sosial yang membentuk jaringan bermuatan *power*. *Power* di sini merupakan suatu kemampuan seseorang atau unit sosial untuk mempengaruhi perilaku dan pengambil keputusan orang atau unit sosial lainnya melalui pengendalian (Adams dalam Agusyanto, 2007).
3. Jaringan *sentiment* (emosi), seperti judulnya jaringan ini terbentuk atas dasar hubungan-hubungan sosial yang bermuatan emosi. Hubungan sosial itu sendiri sebenarnya menjadi tujuan tindakan sosial misalnya percintaan, pertemanan atau hubungan kerabat, dan sejenisnya. Struktur sosial yang terbentuk dari hubungan-hubungan emosi pada umumnya lebih mantap atau permanen.

Ketiga tipe jaringan sosial ini dalam kehidupan nyata sering kali berpotongan. Pertemuan-pertemuan tersebut membangkitkan suatu ketegangan bagi pelaku yang bersangkutan karena logika situasional atau struktur sosial dari masing-masing tipe jaringan berbeda atau belum sesuai satu sama lain. Oleh karena itu, sering kali terlihat kontradiksi antara tindakan-tindakan dengan sikap yang pelaku wujudkan.

2

Jaringan sosial merupakan hubungan-hubungan yang tercipta antar banyak individu dalam suatu kelompok ataupun antar suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Hubungan-hubungan yang terjadi bisa dalam bentuk yang formal maupun bentuk informal. Hubungan sosial adalah gambaran atau cerminan dari kerjasama dan koordinasi antar warga yang didasari oleh ikatan sosial yang aktif dan bersifat resiprosikal (Damsar, 2002: 157).

2

Jaringan sosial merupakan hubungan yang tercipta antara banyak dalam suatu kelompok ataupun antara suatu kelompok dengan kelompok yang lain. Yang menjadi ciri khas dari teori jaringan adalah adanya pemusatan perhatian pada struktur makro dan mikro, yang artinya bahwa aktor bukan hanya individu saja namun dapat kelompok, organisasi bahkan ruang lingkup yang lebih besar sekalipun. Hubungan dapat terjadi dalam struktur sosial yang lebih luas hingga yang lebih sempit (Ritzer & Douglas, 2010: 383).

55

Barnes (1969) mengemukakan analisisnya (Agusyanto, 2007) bahwa jaringan dibedakan atas jaringan total digunakan untuk menyebut jaringan sosial yang kompleks, dan jaringan partial untuk menyebut jaringan yang hanya berisi satu jenis hubungan sosial. Lain hal lagi bila jaringan sosial ditinjau dari tujuan hubungan sosial yang membentuk jaringan-jaringan.

Kedhusin (Rudito, Famiola 2008: 147) mengemukakan ada tiga jaringan sosial yaitu:

- a) Jaringan individu (egosentris) yaitu jaringan yang berhubungan dengan modal tunggal atau individu. Sebagai contoh teman baik saya.
- b) Jaringan sosial (*social-centric*) digambarkan dalam model dan batasan analisisnya, seperti jaringan antara mahasiswa

dalam sebuah kelas, jaringan pekerja dan manajemen dalam sebuah pabrik atau tempat kerja.

- c) Jaringan terbuka (*open system*) yaitu batasan tidak dianggap penting. Contohnya jaringan politik, jaringan antar perusahaan dan jaringan antara mahasiswa.

Modal Sosial

Modal Sosial adalah suatu konsep dengan berbagai definisi yang saling terkait, yang didasarkan pada nilai jaringan sosial. Modal sosial juga didefinisikan sebagai kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Dengan membangun hubungan dengan sesama, dan menjaganya agar terus berlangsung sepanjang waktu, orang mampu bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai hal yang tidak dapat mereka lakukan sendirian, atau yang dapat mereka capai dengan susah payah. Orang berhubungan melalui serangkaian jaringan dan mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain dalam jaringan tersebut, sejauh jaringan tersebut menjadi sumber daya, dia dapat dipandang sebagai modal.

Konsep modal sosial diperkenalkan oleh Robert Putnam (1993) ketika meneliti di Italia pada tahun 1985. Berdasarkan penelitiannya, masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi karena adanya minat besar untuk terlibat pada masalah politik. Hubungan antara masyarakat lebih bersifat horizontal karena masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang setara. Kemudian beliau mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai mutual trust (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat dengan pemimpin di atasnya. Modal sosial merupakan institusi sosial yang melibatkan jaringan (*network*), norma (*norms*) dan kepercayaan masyarakat (*social trust*) demi kepentingan bersama.

Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai jumlah sumber daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik pengenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan. Bourdieu melihat bahwa ada sisi gelap dari modal sosial. Ia melihat bahwa modal sosial terkesan sedikit kuno dan individualistis. Bourdieu berargumen, mustahil memahami dunia sosial tanpa mengetahui peran modal dalam segala bentuknya, dan tidak sekadar dalam satu bentuk yang diakui oleh teori ekonomi.

Berbeda dengan pandangan Bourdieu, Coleman mendefinisikan modal sosial sebagai sarana untuk merepresentasikan sumber daya karena hal ini melibatkan harapan akan resiprositas, dan melampaui individu mana pun sehingga melibatkan jaringan yang lebih luas yang hubungan-hubungannya diatur oleh tingginya tingkat kepercayaan dan nilai-nilai bersama. Dengan kata lain, bagi Coleman modal sosial adalah sarana untuk bekerjasama. Coleman mulai berminat pada kajian modal sosial sejak adanya upaya untuk menjelaskan hubungan antara ketimpangan sosial dengan prestasi akademik di sekolah. Coleman kemudian mendefinisikan modal sosial sebagai: “melekat pada hubungan keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas dan yang berguna bagi perkembangan kognitif atau sosial anak atau orang yang masih muda. Sumber-sumber daya tersebut berbeda bagi orang-orang yang berlainan dan dapat memberikan manfaat penting bagi anak-anak dan remaja dalam perkembangan modal manusia mereka”.

82 Fukuyama (1997) menjelaskan bahwa modal sosial adalah serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka.

Adapun unsur-unsur modal sosial yang dapat dijadikan acuan untuk menganalisis fenomena politik antara lain:

- 1) Hubungan sosial yaitu bentuk komunikasi bersama melalui hidup berdampingan sebagai interaksi antara individu.
- 2) Adat dan nilai budaya lokal yang menjunjung tinggi kebersamaan, kerjasama dan hubungan sosial masyarakat.
- 3) Toleransi merupakan salah satu kewajiban moral yang harus dilakukan setiap orang ketika hidup berdampingan dengan orang lain.
- 4) Kesiediaan untuk mendengar berupa sikap menghormati pendapat orang lain.
- 5) Kejujuran menjadi salah satu hal pokok dari transparansi untuk kehidupan demokratis.
- 6) Kearifan lokal dan pengetahuan lokal sebagai pendukung nilai yang ada dalam masyarakat.
- 7) Jaringan sosial dan kepemimpinan sosial yang terbentuk berdasarkan kepentingan/ketertarikan individu secara prinsip/pemikiran dimana kepemimpinan sosial terbentuk dari kesamaan visi, hubungan personal atau keagamaan.
- 8) Kepercayaan merupakan hubungan sosial yang dibangun atas dasar rasa percaya dan rasa memiliki bersama.
- 9) Kebersamaan dan kesetiaan berupa perasaan ikut memiliki dan perasaan menjadi bagian dari sebuah komunitas.
- 10) Tanggung jawab sosial merupakan rasa empati masyarakat terhadap upaya perkembangan lingkungan masyarakat.
- 11) Partisipasi masyarakat berupa kesadaran diri seseorang untuk ikut terlibat dalam berbagai hal berkaitan dengan diri dan lingkungan.
- 12) Kemandirian berupa keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Daftar Pustaka

- Agusyanto, R (2007). *Jaringan Sosial Dalam Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Damsar (2002). *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Newman (2003). *The Structure and Function of Complex Network*. Departemen of Physic: University of Michigan USA.
- ⁶⁶ Fukuyama, F (1997). "Social Capital and the Modern Capitalist Economy: Creating A High Trust Workplace". *Stern Business Magazine*, Vol 4. No 1.
- Putnam, Robert (1993). *Social Capital*. Pricenton: Pricenton University.
- ² Ritzer, George & Douglas, Goodman (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- ⁶⁷ Soerjono, Soekanto (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Wasserman, Stanley & Katherine, Faust (1994). *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge University Press.
- Van Dijk (2006). *The Network Society: Social Aspects of New Media*. Sage: Languange Art and Diciplines.

TEORI REALITAS SOSIAL

Mohammad Hidayaturrahman

Mengulas teori realitas sosial (*social reality theory*), tidak bisa dilepaskan dari teori yang telah dikemukakan oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann. Berger & Luckmann menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksi individu yang menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Menurut Margaret Poloma, pemikiran Berger melihat realitas kehidupan sehari-hari, memiliki dimensi-dimensi subjektif dan objektif. Manusia merupakan instrumen di dalam penciptaan realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana ia mempengaruhinya melalui proses internalisasi. Dalam mode yang dialektif, di mana terdapat tesa, antitesa, dan sintesa. Berger melihat masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat. Baik manusia dan masyarakat saling berdialektika di antara keduanya. Masyarakat tidak pernah sebagai suatu produk

akhir, tetapi tetap sebagai proses yang sedang terbentuk (Poloma, 1984: 308-310).

Menurut Peter Berger, realitas sosial merupakan kehidupan manusia yang terbentuk dalam proses yang terus-menerus, yakni gejala sosial sehari-hari, yang dalam pengertian sehari-hari dinamakan pengalaman bermasyarakat. Atau dengan kata lain, realitas sosial itu tersirat dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui tindakan sosial seperti komunikasi lewat bahasa, bekerjasama lewat organisasi-organisasi sosial. Pengalaman bermasyarakat ini sebenarnya esensi masyarakat itu. Realitas sosial seperti ini ditemukan dalam pengalaman intersubjektif, merujuk pada struktur kesadaran umum ke kesadaran individual dalam kelompok yang saling berinteraksi. Maka jika ingin mengetahui, mempelajari, menjelaskan dan memahami esensi masyarakat, didapat melalui mempelajari pengalaman bermasyarakat atau realitas sosial (Berger, 2013: xv).

Sementara Piotr Sztompka membedakan dua tingkatan realitas sosial, tingkatan individualitas dan tingkat totalitas. Tingkat individualitas terdiri dari manusia individual, personal atau sebagai anggota kolektifitas konkret (kelompok, asosiasi, komunitas, kelas gerakan sosial, dan sebagainya). Tingkat totalitas adalah kesatuan sosial abstrak, sejenis supraindividu, mencerminkan realitas sosial (masyarakat, kultur, peradaban, formasi sosio-ekonomi, sistem sosial, budaya dan sebagainya) (Sztompka, 2014: 251-252).

Seseorang baru menjadi seorang pribadi yang beridentitas sejauh ia tetap tinggal di dalam masyarakatnya, bukan pribadi yang menyendiri atau terpisah dari masyarakatnya. Dengan begitu ia akan mengalami proses dialektis dengan masyarakat di mana ia tinggal dan berada. Proses dialektis tersebut disebut sebagai

momen, yang memiliki tiga tahapan. *Pertama*, eksternalisasi. Usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia, sekaligus mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya kepada lingkungan sekitar di mana dirinya berada. Eksternalisasi merupakan bentuk eksistensi manusia yang ada di dalam dirinya sendiri, dalam suatu lingkungan tertutup kemudian bergerak keluar untuk mengekspresikan diri pada dunia sekeliling di mana manusia tinggal dan berada. Eksternalisasi yang diproduksi oleh manusia kemudian menjadi sesuatu yang berbeda di luar dirinya ini disebut sebagai eksternalisasi yang terobyektivasi. Dunia yang diproduksi memperoleh sifat realitas obyektif. Sehingga karena sifatnya yang berupa realitas obyektif, maka disebut juga mengesahkan diri (*self legitimating*). Eksternalisasi merupakan proses di mana manusia yang tersosialisasi secara bersama-sama membentuk makna baik secara kognitif maupun afektif. Sebab, perkembangan manusia belum selesai pada waktu dilahirkan. Ia berproses dengan cara berinteraksi dengan lingkungan dan bereaksi terhadap lingkungan secara terus-menerus, baik fisik maupun nonfisik, sampai ia remaja, dewasa, tua, dan mati. Artinya, selama hidup manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan. *Kedua*, obyektivasi. Obyektivasi yaitu hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan realitas obyektif yang bisa jadi akan menghadapi penghasil itu sendiri sebagai suatu fakta yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Obyektivasi bisa dianggap sebagai proses netralisasi antara eksternalisasi dan internalisasi. Obyektivasi manusia berarti bahwa manusia mampu mengobyektivasikan bagian dari dirinya di dalam kesadaran sendiri. Konkretnya obyektivasi adalah proses di mana manusia

menciptakan berbagai realitas dalam kehidupannya seperti menciptakan lembaga-lembaga sosial, merumuskan tentang nilai-nilai, tentang istilah-istilah, bahasa maupun makna-makna yang mengaturnya. Setelah tercipta, ia menjadi produk dari manusia yang mendapat pengakuan dan dimiliki secara bersama-sama dalam masyarakat. Pada saat inilah, berbagai realitas itu berubah menjadi produk yang akhirnya mengikat dan mengontrol kehidupan manusia bahkan mengancam kehidupan manusia. Misalnya, dari kegiatan eksternalisasi manusia menghasilkan alat demi kemudahan hidupnya, seperti traktor untuk meningkatkan dan kemudahan pengolahan pertanian. Kedua produk itu diciptakan untuk menghadapi dunia luar manusia. Setelah dihasilkan, kedua produk itu menjadi realitas yang objektif (objektifikasi). Ia telah menjadi dirinya sendiri, terpisah dengan individu penghasilnya. Bahkan, dengan logikanya sendiri, ia bisa memaksa penghasilnya. Realitas objektif traktor bisa menentukan bagaimana petani harus mengatur cara kerjanya. Ia secara tidak sadar telah didikte oleh traktor yang diciptakannya sendiri termasuk cara kerja traktor dan kebutuhan operasional traktor. *Ketiga*, internalisasi. Proses internalisasi lebih pada penyerapan ke dalam kesadaran dunia yang terobjektifikasi sedemikian rupa sehingga struktur dunia luar manusia menentukan struktur subyektif. Proses menginternalisasikan dunia yang terobjektifikasi secara sosial adalah proses yang juga menginternalisasikan identitas yang ditetapkan secara sosial. Internalisasi adalah penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran subjektif sedemikian rupa sehingga individu dipengaruhi oleh struktur sosial atau dunia sosial di luar dirinya. Melalui internalisasi itu, manusia menjadi produk masyarakat. Internalisasi di antaranya berwujud dalam sosialisasi yang bersifat sosial, misalnya bagaimana satu generasi menyampaikan nilai-nilai budaya yang ada pada generasi

berikut. Generasi berikut diajar untuk hidup sesuai dengan nilai budaya yang mewarnai struktur masyarakatnya. Generasi baru dibentuk oleh makna-makna yang telah diobjektivasikan, mengidentifikasi diri dengannya. Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, ia dibentuk dikonstruksi oleh orang per orang. Dengan pemahaman semacam ini, realitas berwajah ganda. Sehingga, setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Dalam perspektif konstruksi sosial yang dibangun oleh Berger, kenyataan bersifat plural, dinamis dan dialektis, bukan realitas tunggal, yang statis dan final. Kenyataan itu bersifat plural, karena adanya relativitas sosial dari apa yang disebut pengetahuan dan kenyataan. Apa yang nyata bagi seorang biarawan, tidak nyata bagi seorang pengusaha (Azka, 2007: 16-17).

Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing. Misalnya mengenai demonstrasi mahasiswa, atau aksi massa. Satu kelompok orang bisa mengkonstruksi sebagai gerakan anarkhis, di luar batas dan mengganggu masyarakat, serta dijadikan alat permainan elit politik tertentu. Tetapi orang dari kelompok sosial lain, bisa mengkonstruksi gerakan mahasiswa itu, sebagai cara memperjuangkan nasib rakyat, dan berjuang tanpa pamrih. Kedua realitas tersebut saling berdialektika (Eriyanto, 2002: 14-17).

Menurut Berger dan Luckmann, realitas sosial tidak berdiri sendiri melainkan dengan kehadiran individu, baik di dalam maupun di luar realitas tersebut. Realitas tersebut memiliki makna. Realitas tersebut dikonstruksi dan dimaknakan secara

subjektif oleh individu lain, sehingga memantapkan realitas itu secara objektif. Berger dan Luckmann menyebut realitas sosial dengan realitas objektif. Realitas objektif adalah gejala sosial yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan sering dihadapi oleh individu sebagai fakta. Realitas objektif dilihat sebagai dunia yang objektif, diterima akal sehat (*common sense*), sebagai fakta dan tidak diperlukan verifikasi untuk membuktikannya. Semua realitas itu dipandang sebagai fakta yang diterima sebagai kebenaran dan dapat dilihat, misalnya umur, pendapatan dan pendidikan. Kridawati Sadhana menyebutnya dengan realitas empiris sebagai realitas objektif yang teramati di dalam inderawi. Realitas objektif terbentuk dari pengalaman di dunia objektif yang berada di luar diri individu atau yang ada dalam lingkungannya (Sadhana, 2016: 4). Selain itu ada pula realitas sosial simbolik. Realitas simbolik adalah bentuk-bentuk simbolik dari realitas sosial objektif, yang biasanya diketahui oleh khalayak dalam bentuk karya seni, fiksi, serta isi media (Bungin, 2011: 24). Realitas ini menafsirkan dan mengekspresikan dunia yang objektif dan menerjemahkannya ke dalam realitas baru, menghadirkan realitas baru dari realitas yang terjadi. Seperti tayangan di televisi yang diedit dari peristiwa yang ada, kemudian dihadirkan kepada khalayak dengan sajian yang tidak sama tentu saja dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Terakhir adalah realitas subjektif. Realitas subjektif adalah realitas sosial yang terbentuk pada diri khalayak yang berasal dari realitas sosial objektif dan realitas sosial yang simbolik. Realitas subjektif yaitu realitas yang hadir dalam benak dan kesadaran individu. Realitas tersebut dapat berasal dari realitas objektif maupun realitas simbolik, yang secara bersama-sama dapat mempengaruhi realitas subjektif seseorang sehingga setiap individu bisa jadi mempunyai penafsiran dan realitas masing-masing (Fachruddin, 2015: 35-37).

Teori realitas sosial bertumpu pada interaksi individu dengan lingkungan masyarakat di mana individu berada, keduanya saling memberi pengaruh yang besar dalam menciptakan realitas sosial. Lingkungan mempengaruhi individu, dan individu mempengaruhi masyarakat. Dalam perjalanannya, antara individu dengan lingkungan saling tarik-menarik dalam saling memberi pengaruh. Ada semacam hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara individu dengan lingkungan, dalam bentuk hubungan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lain. Lingkungan mempengaruhi individu, dan individu secara langsung mempengaruhi lingkungan, begitu seterusnya.

Daftar Pustaka

- Azka, Ainun (2007). *Pesan-Pesan Dakwah Dalam Novel Tembang Lara karya Pipiet Senja*, Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo.
- Berger, P & Luckmann, T (1966). *The Social Construction of Reality a Treatise in the Sociology of Knowledge*. Inggris: Penguin.
- Bungin, B (2011). *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Eriyanto (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Fachruddin, Andi (2015). *Cara Kreatif Memproduksi Program Televisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Poloma, M (1984). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sadhana, K (2017). *"Handbook Kajian Realitas Sosial"*. Malang: Universitas Merdeka.
- Sztompka, P (2014). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.

TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL

Eko Agusrianto

T⁴⁴ori struktural fungsional atau sering juga disebut teori fungsionalisme, adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan teori atau pendekatan lainnya, pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan⁷¹ untuk mencapai keteraturan sosial. Teori struktural fungsional ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim. Di mana pemikiran Durkheim dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte dengan pemikirannya mengenai analogi organisme kemudian dikembangkan lagi oleh

Herbert Spencer dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dengan organisme, hingga akhirnya berkembang menjadi apa yang disebut dengan *requisite functionalism*. Hal ini menjadi panduan bagi analisa substantif Spencer dan penggerak analisis fungsional. Dipengaruhi oleh kedua orang ini, studi Durkheim tertanam kuat terminologi organismik tersebut.

Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi (ketergantungan) satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori Parsons dan Merton mengenai struktural fungsional. Selain itu, antropologis fungsional Malinowski dan Radcliffe Brown juga membantu membentuk berbagai perspektif fungsional modern.

Durkheim juga berfikir bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya di masa modern, ketika hal-hal seperti latar belakang keagamaan dan etnik bersama tidak ada lagi. Untuk mempelajari kehidupan sosial di kalangan masyarakat modern Durkheim berusaha menciptakan salah satu pendekatan ilmiah pertama terhadap fenomena sosial. Bersama Herbert Spencer, Durkheim adalah salah satu orang pertama yang menjelaskan keberadaan dan sifat berbagai bagian dari masyarakat dengan mengacu kepada apa yang mereka lakukan dalam mempertahankan kesehatan dan keseimbangan masyarakat, suatu posisi yang kelak dikenal sebagai fungsionalisme.

40 Teori fungsionalisme yang menekankan kepada keteraturan, bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri

atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain, dengan kata lain masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan.

Setiap peristiwa dan setiap struktur yang ada, fungsional bagi sistem sosial itu. Demikian pula semua institusi yang ada diperlukan oleh sistem sosial itu, bahkan kemiskinan serta kecacatan sosial sekalipun. Masyarakat dilihat dari kondisi dinamika dalam keseimbangan. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial. Sebaliknya jika tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Durkheim juga menekankan bahwa masyarakat lebih dari pada sekadar jumlah dari seluruh bagiannya. Dalam bukunya "pembagian kerja dalam masyarakat," Durkheim meneliti bagaimana tatanan sosial dipertahankan dalam berbagai bentuk masyarakat ia memusatkan perhatian pada pembagian kerja dan meneliti bagaimana hal itu berbeda dalam masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Ia berpendapat bahwa masyarakat tradisional bersifat 'mekanis' dan dipersatukan oleh kenyataan bahwa setiap orang lebih kurang sama dan karenanya mempunyai banyak kesamaan di antara sesamanya.

Dalam masyarakat tradisional, menurut Durkheim kesadaran kolektif sepenuhnya mencakup kesadaran individual, norma-norma sosial kuat dan perilaku sosial diatur dengan rapi. Sedangkan dalam masyarakat modern, pembagian kerja yang sangat kompleks menghasilkan solidaritas "organik". Spesialisasi yang berbeda-beda dalam bidang pekerjaan dan peranan sosial menciptakan ketergantungan yang mengikat orang kepada

sesamanya, karena mereka tidak lagi dapat memenuhi seluruh kebutuhan mereka sendiri.

Dalam masyarakat yang “mekanis”, misalnya, para petani gurem hidup dalam masyarakat yang swasembada dan terjalin bersama oleh warisan bersama dan pekerjaan yang sama. Dalam masyarakat modern yang “organik” para pekerja memperoleh gaji dan harus mengandalkan orang lain yang mengkhususkan diri dalam produk-produk tertentu seperti bahan makanan, pakaian, dan lain lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akibat dari pembagian kerja yang semakin rumit ini, menurut Durkheim bahwa kesadaran individual berkembang dalam cara yang berbeda dari kesadaran kolektif. Seringkali malah berbenturan dengan kesadaran kolektif.

Struktural fungsional mengutamakan keseimbangan. Dengan kata lain, teori ini memandang bahwa semua peristiwa dan struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat jika sekelompok masyarakat ingin memajukan kelompoknya, mereka akan melihat apa yang akan dikembangkan dan tetap mempertahankan bahkan melestarikan tradisi-tradisi dan budaya yang sudah berkembang dan menjadikannya sebagai alat modernisasi.

Namun dalam hal ini penganut teori fungsionalisme seringkali mengabaikan variabel konflik dan perubahan sosial dalam analisa mereka. Akibatnya mereka seringkali dicap sebagai kelompok konservatif karena terlalu menekankan kepada keteraturan dalam masyarakat dan mengabaikan variabel konflik dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam masyarakat yang beragam kebudayaan akan sangat mudah terjadi konflik. Namun teori fungsional akan menjadi garis tengah untuk menjadikan sebuah perbedaan menjadi alat untuk bersatu.

Teori structural fungsional yang dianut Parsons⁴⁰ mengungkapkan keyakinan yang optimis⁴² terhadap perubahan dan kelangsungan suatu sistem. Dalam teorinya, Parson menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan makhluk hidup (Susilo & Rahmad, 2008: 107). Komponen utama pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parsons berpendapat bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Dapat dikatakan Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan.

Daftar Pustaka

- Gibson, Ivancevich, & Donnelly (1996) *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- ² Khusna, Amal (2010). *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parson, Wayne (2008). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik analisis kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Tampubolon, Manahan (2012). *Perilaku Keorganisasian (Organization Behavior)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Waber, Max (1973). *Bureaucrazy*, (dalam Hans H. Gerth, From Max Weber: Essay in Sociology). London: Oxford University Press, Inc.

TEORI KEBUTUHAN

Endang Handayani

¹⁶
Manusia dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya selalu berusaha mencari yang terbaik. Sebagai makhluk sosial, dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya tadi manusia selalu memerlukan pihak lain. Seseorang manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kebutuhan manusia sendiri jika ditinjau dari segi tingkatan kepentingannya dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan sehingga baginya kebutuhan ini haruslah dipenuhi lebih dulu dan paling utama. Dahulu kebutuhan primer hanya mencakup sandang, pangan, dan papan. Namun dewasa ini karena kehidupan yang semakin kompleks maka ditambahkan pula sebagai kebutuhan primer yaitu kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, hiburan dan lain-lain.

Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan

fisiologis maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow dalam teori hirarki kebutuhan. Kebutuhan menyatakan bahwa setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri (Potter dan Patricia, 1997). Dalam mengaplikasikan kebutuhan dasar manusia (KDM) yang dapat digunakan untuk memahami hubungan antara kebutuhan dasar manusia pada saat memberikan perawatan. Beberapa kebutuhan manusia tertentu lebih mendasar daripada kebutuhan lainnya. Oleh karena itu beberapa kebutuhan harus dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya. Kebutuhan dasar manusia seperti makan, air, keamanan dan cinta merupakan hal yang penting bagi manusia. Dalam mengaplikasikan kebutuhan dasar manusia tersebut dapat digunakan untuk memahami hubungan antara kebutuhan dasar manusia. Walaupun setiap orang mempunyai sifat tambahan, kebutuhan yang unik, setiap orang mempunyai kebutuhan dasar manusia yang sama. Besarnya kebutuhan dasar yang terpenuhi menentukan tingkat kesehatan dan posisi pada rentang sehat-sakit.

Hirarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow adalah sebuah teori yang dapat digunakan perawat untuk memahami hubungan antara kebutuhan dasar manusia pada saat memberikan perawatan. Menurut teori ini, beberapa kebutuhan manusia tertentu lebih dari pada kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, beberapa kebutuhan harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang lain. Misalnya, orang yang lapar akan lebih mencari makanan daripada melakukan aktivitas untuk meningkatkan harga diri.

Kebutuhan dasar manusia adalah hal-hal seperti makanan, air, keamanan dan cinta yang merupakan hal yang penting untuk

bertahan hidup dan kesehatan. Hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow adalah sebuah teori yang dapat digunakan perawat untuk memahami hubungan antara kebutuhan dasar manusia pada saat memberikan perawatan.

Hirarki kebutuhan manusia mengatur kebutuhan dasar dalam lima tingkatan prioritas. Tingkatan yang paling dasar, atau yang pertama meliputi kebutuhan fisiologis seperti udara, air dan makanan. Tingkatan yang kedua meliputi kebutuhan keselamatan dan keamanan, yang melibatkan keamanan fisik dan psikologis. Tingkatan yang ketiga mencakup kebutuhan cinta dan rasa memiliki, termasuk persahabatan, hubungan sosial dan cinta seksual. Tingkatan yang keempat meliputi kebutuhan rasa berharga dan harga diri, yang melibatkan percaya diri, merasa berguna, penerimaan dan kepuasan diri. Tingkatan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri.

Menurut teori Maslow, seseorang yang seluruh kebutuhannya terpenuhi merupakan orang yang sehat, dan seseorang dengan satu atau lebih kebutuhan yang tidak terpenuhi merupakan orang yang berisiko untuk sakit atau mungkin tidak sehat pada satu atau lebih dimensi manusia.

8

Manusia sebagai bagian integral yang berintegrasi satu sama lainnya dalam motivasinya memenuhi kebutuhan dasar (fisiologis, keamanan, kasih sayang, harga diri dan aktualisasi diri). Setiap kebutuhan manusia merupakan suatu tegangan integral sebagai akibat dari perubahan dari setiap komponen sistem. Tekanan tersebut dimanifestasikan dalam perilakunya untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan sampai terpuhinya tingkat kepuasan klien.

Dasar kebutuhan manusia adalah terpenuhinya tingkat kepuasan agar manusia bisa mempertahankan hidupnya. Peran yang utama adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia dan tercapainya suatu kepuasan bagi diri sendiri serta kliennya. Meskipun dalam kenyataannya dapat memenuhi salah satu dari kebutuhan membawa dampak terhadap perubahan sistem dalam individu (biologis, intelektual, emosional, sosial, spiritual, ekonomi, lingkungan, patologi dan psikopatologi).

5

Dalam tingkah laku manusia, Maslow memiliki asumsi dasar, bahwa tingkah laku manusia dapat ditelaah melalui kecenderungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga bermakna dan terpuaskan. Untuk itu Maslow menempatkan motivasi dasar manusia sebagai sentral teorinya.

Manusia memiliki sifat dasar yang tidak akan pernah sepenuhnya merasa puas, karena kepuasan bagi manusia bersifat sementara. Ketika suatu kebutuhan terpuaskan maka akan muncul kebutuhan lain yang lebih tinggi nilainya, yang menuntut untuk dipuaskan, begitu pula seterusnya. (Hasyim, 2002).

Maslow memiliki konsep fundamental unil dari teorinya, yaitu:

Manusia dimotivasi oleh sejumlah kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk seluruh spesies, tidak berubah, dan berasal dari sumber genetik atau naluriah.

Kebutuhan-kebutuhan itu juga bersifat psikologis, bukan semata-mata fisiologis. Kebutuhan-kebutuhan itu merupakan inti kodrat manusia, hanya saja mereka itu lemah, mudah diselewengkan dan dikuasai proses belajar, kebiasaan atau tradisi yang keliru. (Supratiknya, 2006). Kebutuhan dasar tersebut tersusun secara hirarki dalam strata yang bersifat relatif, yaitu:

(1) Kebutuhan-kebutuhan fisiologis (*fa'ali/ phsyologic needs*); (2) Kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan (*safety & security needs*); (3) Kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki (*love and belonging needs*); (4) Kebutuhan akan penghargaan (*esteem need*); dan (5) kebutuhan akan aktualisasi diri (*self actualization need*) (Maslow, 1994).

Kebutuhan-kebutuhan ini senantiasa muncul, meskipun dimungkinkan tidak secara berurutan. Dalam pengertian, bahwa kebutuhan yang paling dasar akan muncul terlebih dahulu dan mendesak untuk dipenuhi, dan jika kebutuhan ini sudah terpenuhi akan muncul kebutuhan berikutnya yang juga menuntut untuk dipenuhi. Namun dimungkinkan ada sebagian kecil orang yang kebutuhan dasarnya berbeda struktur hirarkinya dibandingkan dengan yang lain. Misalnya orang yang memiliki keyakinan tertentu akan memilih kelaparan dari pada harus menghilangkan keyakinannya. Seperti kisah Amar bin Yasir yang lebih memilih disiksa oleh kafir Qurais daripada berpindah keyakinan, karena dia tidak butuh menyembah berhala.

Suatu hal yang perlu ditegaskan di sini adalah, bahwa pemenuhan-pemenuhan kebutuhan dasar tersebut tidak hanya bersifat material, namun lebih dari itu adalah bersifat spiritual. Dengan kata lain, orang yang memiliki kesehatan mental yang prima akan mudah terpuaskan dari kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Karena kebutuhan dasar pada dasarnya adalah dimotivasi oleh motif kemunduran (*deficiency motivation*). Sementara orang yang sehat secara mental lebih dimotivasi oleh motif perkembangan (*growth motivation*). Seorang yang mengalami penyakit mental akan sulit merasa puas dari kebutuhan dasar, bahkan akan senantiasa merasa kurang (Hasyim, 2002).

5

1) **Kebutuhan-kebutuhan fisiologis (*fa'ali/ phsyologic needs*)**

Pada saat ini kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang paling kuat dan mendasar diantara yang lain. Dalam hal ini seseorang sangat membutuhkan oksigen untuk bernapas, air untuk diminum, makanan, papan, sandang, buang hajat kecil maupun besar, seks, dan fasilitas-fasilitas yang dapat berguna untuk kelangsungan hidupnya. Ini merupakan contoh kebutuhan fisiologis.

Kebutuhan-kebutuhan ini sifatnya sangat mendesak dan tidak akan menginginkan kebutuhan lain sebelum kebutuhan dasar ini terpenuhi. Misalnya seseorang yang sedang haus atau lapar, tidak akan membutuhkan motivasi lain sebelum rasa haus dan laparnya hilang. Motivasi untuk mendapatkan kebutuhan ini sangatlah kuat sehingga mendorong individu melakukan kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan ini. Maslow meyakini bahwa kebutuhan ini adalah jalan pertama yang nantinya, bila terpenuhi akan membawa manusia menuju kebutuhan akan rasa aman (Nasrul, 2000).

5

2) **Kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan (*safety & security needs*)**

Sebenarnya tidak bisa dipungkiri, pada awalnya mayoritas dari aktivitas kehidupan manusia ini adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik ini. Segera setelah kebutuhan dasar terpenuhi, orang mulai 'cari-cari' kebutuhan level kedua, yakni kebutuhan akan rasa aman dan kepastian (*safety and security needs*). Kebutuhan ini muncul dan memainkan peranan dalam bentuk mencari tempat perlindungan, membangun privasi individual (kebebasan individu), mengusahakan keterjaminan finansial melalui asuransi atau dana pensiun, dan sebagainya.

3) **Kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki (*love and belonging needs*)**

Ketika kebutuhan fisik akan makan, papan, sandang berikut kebutuhan keamanan telah terpenuhi, maka seseorang beralih ke kebutuhan berikutnya yakni kebutuhan untuk dicintai dan disayangi (*love and belonging needs*). Dalam hal ini seseorang mencari dan menginginkan sebuah persahabatan, menjadi bagian dari sebuah kelompok, dan yang lebih bersifat pribadi seperti mencari kekasih atau memiliki anak, itu adalah pengaruh dari munculnya kebutuhan ini setelah kebutuhan dasar dan rasa aman terpenuhi

4) **Kebutuhan akan penghargaan (*esteem need*)**

Level keempat dalam hirarki adalah kebutuhan akan penghargaan atau pengakuan (*esteem needs*). Maslow membagi level ini lebih lanjut menjadi dua tipe, yakni tipe bawah dan tipe atas. Tipe bawah meliputi kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, perhatian, reputasi, kebanggaan diri, dan kemashuran. Tipe atas terdiri atas penghargaan oleh diri sendiri, kebebasan, kecakapan, keterampilan, dan kemampuan khusus (spesialisasi). Apa yang membedakan kedua tipe adalah sumber dari rasa harga diri yang diperoleh. Pada *self esteem* tipe bawah, rasa harga diri dan pengakuan diberikan oleh orang lain. Akibatnya rasa harga diri hanya muncul selama orang lain mengatakan demikian, dan hilang saat orang mengabaikannya.

Situasi tersebut tidak akan terjadi pada *self esteem* tipe atas. Pada tingkat ini perasaan berharga diperoleh secara mandiri dan tidak tergantung kepada penilaian orang lain. Dengan lain kata, sekali anda bisa menghargai diri anda sendiri sebagai apa adanya, anda akan tetap berdiri tegak, *madheg pandhito*, bahkan ketika orang lain mencampakkan.

5) **Kebutuhan akan aktualisasi diri (*self actualization need*)**

Ketika kebutuhan akan penghargaan ini telah terpenuhi, maka kebutuhan lainnya yang sekarang menduduki tingkat teratas adalah aktualisasi diri. Inilah puncak sekaligus fokus perhatian Maslow dalam mengamati hirarki kebutuhan. Terdapat beberapa istilah untuk menggambarkan level ini, antara lain *growth motivation*, *being needs*, dan *self actualization*.

Maslow melakukan sebuah studi kualitatif dengan metode analisis biografi guna mendapat gambaran jelas mengenai aktualisasi diri. Dia menganalisis riwayat hidup, karya, dan tulisan sejumlah orang yang dipandang telah memenuhi kriteria sebagai pribadi yang beraktualisasi diri. Termasuk dalam daftar ini adalah Albert Einstein, Abraham Lincoln, William James, dan Eleanor Roosevelt (Nasrul, 2000).

Daftar Pustaka

- Hasyim, Muhammad (2002). *Dialog Antara Tasawuf dan Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maslow, Abraham (1994). *Motivasi dan Kepribadian (Teori Motivasi dengan Pendekatan hierarki Kebutuhan Manusia)*. Jakarta: PT PBP.
- Nasrul, Effendy (1998). *Dasar-Dasar Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Potter, Patricia & Perry, Anne (2005). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan 1 Edisi 4*. Jakarta: EGC.
- Supratiknya, A (2006). *Komunikasi Pribadi: Tinjauan Psikologis*. Yogyakarta: Kanisius

TEORI PERUBAHAN SOSIAL

Anak Agung Putu Sugiantiningsih

Dalam kelompok teori perubahan sosial klasik, telah dibahas empat pandangan dari tokoh-tokoh terkenal yakni August Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber. August Comte menyatakan bahwa perubahan dalam alam pemikiran manusia, yang oleh Comte disebut dengan evolusi intelektual. Tahapan-tahapan pemikiran tersebut mencakup tiga tahap, dimulai dari tahap theologis primitif, tahap metafisik transisional, dan terakhir tahap positif rasional. Setiap perubahan tahap pemikiran manusia tersebut mempengaruhi unsur kehidupan masyarakat lainnya, dari secara keseluruhan juga mendorong perubahan sosial.

Sementara itu, Karl Marx pada melihat perubahan sosial sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam tata perekonomian masyarakat, terutama sebagai akibat dari pertentangan yang terus terjadi antara kelompok pemilik modal

atau alat-alat produksi dengan kelompok pekerja. Dalam karyanya Marx menyatakan sejarah dari semua masyarakat pada saat ini adalah sejarah perjuangan kelas. Perjuangan kelas berasal dari adanya pembagian kerja dan kepemilikan pribadi yang menghasilkan kontradiksi yang dalam dan luas pada masyarakat, yaitu antara kelompok pemilik sarana produksi dan bukan pemilik.

Perubahan sosial mengacu pada adanya pergantian dalam hubungan sosial dan ide-ide kultural, sehingga dalam hal ini konsep sosial dan budaya menjadi konsep yang saling berkaitan dalam terjadinya suatu perubahan. Perubahan dalam ide dan nilai secara singkat akan mengarah pada terjadinya perubahan dalam hubungan sosial, dan sebaliknya perubahan dalam pola hubungan sosial akan menuju pada adanya perubahan nilai dan norma. Secara teori ada banyak ahli yang memberikan sumbangannya dalam menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial, antara lain oleh *William Ogburn, Kingsley Davis, Gilin, Samuel Kaenig serta Selo Soemarjan*. Ogburn tidak memberikan definisi secara jelas tentang perubahan sosial, tetapi lebih menjelaskan tentang bagaimana ruang lingkup dari perubahan sosial yang di dalamnya meliputi unsur-unsur budaya. Dalam hal ini Ogburn menekankan bahwa kebudayaan material mempunyai pengaruh besar terhadap kebudayaan immaterial sehingga terjadilah perubahan sosial.

Berikutnya Kingsley Davis yang secara lebih jauh menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan suatu perubahan dalam struktur dan fungsi masyarakat. Penjelasan dari Davis ini dapat kita pahami dari ilustrasi tentang organisasi pekerja, di mana adanya organisasi serikat pekerja dalam dunia industri akan membuat suatu perbedaan dalam hubungan majikan atau pemilik industri dengan pekerjanya, sehingga pekerja pun mempunyai peran dalam dunia ekonomi di mana mereka adalah bagian dari sistem yang ikut menentukan jalannya suatu organisasi ekonomi.

Selanjutnya, penjelasan dari Gilin yang mengemukakan bahwa perubahan sosial merupakan suatu variasi atau sesuatu yang lain yang timbul dari cara-cara hidup yang telah diterima. Sesuatu yang baru tersebut dapat disebabkan perubahan dalam kondisi geografis maupun komposisi penduduk. Perubahan sosial dapat pula mempunyai pengertian sebagai adanya faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kehidupan manusia, seperti yang dikemukakan oleh Samuel Koenig. Hal tersebut berarti bahwa perubahan sosial merujuk pada adanya modifikasi-modifikasi dari faktor eksternal atau internal dalam pola-pola kehidupan manusia. Sedangkan tokoh sosiologi dari Indonesia, yaitu Selo Soemarjan menyatakan bahwa perubahan sosial mencakup semua aspek perubahan dalam lembaga suatu masyarakat yang dapat mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai, sikap dan pola perilaku kelompok dalam masyarakat tersebut. Ia menekankan bahwa perubahan sosial terjadi pada lembaga masyarakat sehingga mempengaruhi struktur masyarakat yang bersangkutan.

Emile Durkheim melihat perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis, yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik, ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik. Sementara itu, Max Weber pada dasarnya melihat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah akibat dari perubahan nilai yang dijadikan orientasi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini dicontohkan masyarakat Eropa yang sekian lama terbelenggu oleh nilai Katolikisme Ortodox. Kemudian berkembang pesat kehidupan sosial ekonominya atas dorongan dari nilai Protestanisme yang dirasakan lebih rasional dan lebih sesuai dengan tuntutan kehidupan modern.

Pendekatan ekuilibrium menyatakan bahwa terjadinya perubahan sosial dalam suatu masyarakat adalah karena terganggunya keseimbangan di antara unsur-unsur dalam sistem sosial di kalangan masyarakat yang bersangkutan, baik karena adanya dorongan dari faktor lingkungan (ekstern) sehingga memerlukan penyesuaian (adaptasi) dalam sistem sosial, seperti yang dijelaskan oleh Talcott Parsons, maupun karena terjadinya ketidakseimbangan internal seperti yang dijelaskan dengan Teori kesenjangan Budaya (*cultural lag*) oleh William Ogburn.

Pendekatan modernisasi yang dipelopori oleh Wilbert More, Marion Levy, dan Neil Smelser, pada dasarnya merupakan pengembangan dari pikiran-pikiran Talcott Parsons, dengan menitikberatkan pandangannya pada kemajuan teknologi yang mendorong modernisasi dan industrialisasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini mendorong terjadinya perubahan-perubahan yang besar dan nyata dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk perubahan dalam organisasi atau kelembagaan masyarakat.

Dalam Bahasa Inggris disebut *society*, asal katanya *socius* yang berarti "kawan". Kata "masyarakat" berasal dari bahasa Arab, yaitu *syiek*, artinya "bergaul". Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk akhiran hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai pribadi melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.

1. Masyarakat dalam arti luas merupakan keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan sebagainya.
2. Masyarakat dalam arti sempit yaitu sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu misalnya teritorial, bangsa, golongan, dan sebagainya.

3. Masyarakat adalah kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka ini dapat mengorganisasikan dirinya berpikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat harus mempunyai syarat-syarat seperti:
- Harus ada pengumpulan manusia.
 - Telah bertempat tinggal dalam waktu lama di suatu daerah tertentu.
 - Adanya aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.
 - Ada sistem tindakan utama.
 - Aaling setia pada sistem tindakan utama.
 - Mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota.
 - Sebagian atau seluruh anggota baru didapat dari kelahiran/ reproduksi manusia.
 - Klasifikasi masyarakat.

Cara umum dan sederhana, masyarakat mengenal dua bentuk karakteristik wilayah, yaitu desa dan kota. Kota dianggap sebagai wilayah yang non-agraris dengan peri-kehidupan yang serba modern, dan pengaruh kebudayaan yang sudah tidak begitu lekat dengan masyarakat yang hidup di dalamnya.

Pengertian *urban community* (masyarakat kota). Kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia dengan kepadatan penduduk yang tinggi, strata sosial ekonomi yang heterogen, dan corak kehidupan yang materialistik. Masyarakat perkotaan sering juga disebut *urban community*. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupan serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Masyarakat kota

memiliki tatanan yang heterogen sehingga kelompoknya lebih dinamis. Masyarakat kota mempunyai daya tarik bagi masyarakat desa untuk melakukan urbanisasi. Perhatian khusus masyarakat kota tidak terbatas pada aspek-aspek seperti pakaian, makanan dan perumahan, tetapi mempunyai perhatian lebih luas lagi. Menurut teori Talcott Parsons mengenai tipe masyarakat kota yang diantaranya mempunyai ciri-ciri:

- Netral afektif: Masyarakat kota memperlihatkan sifat yang lebih mementingkan rasionalitas dan sifat rasional ini erat hubungannya dengan konsep *gesellschaft* atau *association*. Mereka tidak mau mencampur adukkan hal-hal yang bersifat emosional atau yang menyangkut perasaan pada umumnya dengan hal-hal yang bersifat rasional, itulah sebabnya tipe masyarakat itu disebut netral dalam perasaanya
- Orientasi diri: Manusia dengan kekuatannya sendiri harus dapat mempertahankan dirinya sendiri, pada umumnya di kota tetangga itu bukan orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kita oleh karena itu setiap orang dikota terbiasa hidup tanpa menggantungkan diri pada orang lain, mereka cenderung untuk individualistik.
- Universalisme: Berhubungan dengan semua hal yang berlaku umum, oleh karena itu pemikiran rasional merupakan dasar yang sangat penting untuk universalisme.
- Prestasi: Mutu atau prestasi seseorang akan dapat menyebabkan orang itu diterima berdasarkan kepandaian atau keahlian yang dimilikinya.

Perbedaan ciri dan kebiasaan sosial masyarakat kota dan masyarakat desa:

1. Kehidupan keagamaan kurang kehidupan keagamaan kuat/ religius.

2. Individualis hubungan sosial yang erat/ kolektif.
3. Pembagian kerja lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Kerja berdasarkan musim dan iklim dan nomaden.
4. Interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada kepentingan obyektif interaksi menitikberatkan kepentingan pribadi/ subyektif.
5. Jalan kehidupan yang cepat membuat faktor waktu menjadi sangat penting waktu begitu tidak dianggap penting, karena masyarakatnya non materialistik.
6. Lebih terbuka dalam menerima pengaruh dari luar. Selektif terhadap budaya asing/ luar.
7. Penduduk yang lebih banyak
8. Sebagian besar dilapisi beton dan aspal. Lingkungan hidup dengan alam bebas.
9. Sektor ekonomi sekunder yaitu industri, dan ekonomi tersier yaitu bidang pelayanan jasa sektor ekonomi primer yaitu bidang agraris.
10. Kehidupan heterogen kehidupan homogeni.
11. Stratifikasi sosial lebih kompleks stratifikasi yang umumnya sama.
12. Kurangnya tingkat persaingan ekonomi.
13. Mobilitas sosial di kota jauh lebih tinggi mobilitas yang biasa, terlihat pada pagi hari yang sepi.
14. Pola interaksi lebih dipengaruhi oleh ekonomi, politik, pendidikan. Pola interaksi pada masyarakat pedesaan adalah motif-motif sosial.
15. Hirarki sistem administrasi nasional kedudukan kota lebih tinggi sistem administrasi kedudukan yang lebih rendah daripada kota.
16. Kebauran dan diversikan kultural kesatuan dan keutuhan kultural.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani (1992). *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Craib, Ian (1992). *Teori-Teori Sosial Modern dari Parson Sampai Habermas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Calhoun, C (1997). *Nationalism*, Minneapolis: University of Minnesotya Perss.
- Coser, Lowis (1976). *Master of Sociological Thought*, 2nd edition. New York. Harcourt Brace Jovanovich
- Doyle, Johnson (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia
- Dwi, Rachmad (2008). *Sosiologi Lingkungan Modern*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ritzer, George & Goodman, Douglas (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Geertz, Clifford (1973). *The Interpretation of cultured sekeded ersays*. New York: Basic Book, Inc Publisher.
- Koentjaraningrat (1997). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Koentjaraningrat (1980). *Teori Anthropologi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Laclau, Ernesto & Chantal Mouffe (2001). *Hegemony and Socialist Strategy: Toward a Radical Democratic Politic*. London: Verso.
- Poloma, Margaret (1994). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

PENUTUP

Teori menjadi pemandu dan alat bantu bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang semakin dinamis dan kompleks. Semakin akrab dengan teori, manusia semakin mudah dalam membaca fenomena kehidupan dan memprediksi kehidupan di masa mendatang. Sering membaca teori tidak akan rugi, malah semakin beruntung. Teori memberi perspektif yang tidak bisa diberikan oleh hanya sekadar retorika.

Buku teori sosial untuk penelitian ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi yang telah Anda baca, semoga memberi inspirasi untuk melakukan penelitian dalam berbagai format dan bentuk. Jika pun tidak, paling tidak, sudah menjadi bagian dari sumbangsih membangun budaya literasi, baik bagi para penulisnya, maupun bagi para pembaca yang budiman. Semoga ke depan akan semakin banyak karya sejenis yang mewarnai dunia sosial, baik yang ditulis oleh penulis yang sama maupun penulis lain.

Akhir kalam, pada era modern, menggali ilmu layaknya menggali sumur di dekat pantai, tidak perlu terlalu harus bekerja

keras dan ekstra menggali sampai ke dalaman tertentu. Dalam hitungan meter akan bertemu dengan air yang dicari. Dan saat air yang dicari ketemu, maka segera diminum. Pada saat meminum air, maka dahaga tidak pernah terpuaskan, karena akan selalu akan berusaha meminum dan meneguknya. Begitulah, harapan kita, semoga kita semua diberi kenikmatan oleh Tuhan, untuk selalu dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Salah satunya ada di dalam teori-teori yang tersebar di dalam buku-buku, selain di buku yang Anda pegang ini. Semoga.

Malang, 1 Mei 2020



BIODATA PENULIS

Mohammad Hidayaturrahman: Lahir di Sumenep, 15 Januari 1977, pendidikan terakhir, Doktor Ilmu Sosial, konsentrasi politik pembangunan Universitas Merdeka Malang, lulus tahun 2020. Saat ini aktif mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wiraraja Sumenep. Rajin menulis di berbagai jurnal nasional dan internasional. Di antara artikel yang dipublikasi, “Kiai and Political Relations Reconciling Politics And Religion in Indonesia, terbit di Jurnal Tahrir IAIN Ponorogo, Volume 18, No. 2, November 2018, terakreditasi nasional, Sinta 2. “The Role of Local People in Improving Education of the Archipelago and Remote Communities of Indonesia, Terbit di Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), Atlantis Press, Volume 267, Desember 2018, terindeks Thompson Reuters. Aktif menjadi presenter di berbagai seminar nasional dan internasional, di antaranya, “Presenter pada The 4th International Conference on Teacher Education and Professional

Development (InCoTEPD), Universitas Negeri Yogyakarta, 13-14 Nopember 2019. "Presenter pada International Conference on Islam and Muslim Societies (ICONIS) 2019, Magister Program State of Islamic Studies (IAIN) Salatiga, Central Java, 6-7 August, 2019. Pernah mendapat penghargaan "Best paper pada Indonesia Development Forum 2018 dengan topik "Potensi Ekonomi dan Tantangan Pembangunan Jejaring Transportasi (Studi Wilayah Kepulauan Sumenep, Jawa Timur), Bappenas, di Jakarta 10-11 Juli 2018. Dan "Best Paper pada Internasional Islamic Research Forum (IIRF) IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 27-28 Nopember 2017".

Nisful Laily Zain: Lahir di Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada 24 Nopember 1976. Lulusan S3 Ilmu Sosial Universitas Merdeka Malang ini menjadi Kepala Sekolah JAWARA SMK PGRI 1 Pasuruan, Jawa Timur. Selain menjadi kepala sekolah, juga aktif di berbagai kegiatan penulisan dan seminar baik regional, nasional maupun internasional. Penulis saat ini menjadi pemimpin redaksi Majalah JAWARA SMK PGRI 1 Pasuruan. Selain itu, ia juga pernah menjadi redaktur di Majalah INSPIRATIF yang diterbitkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, Jawa Timur. Beberapa tulisannya tentang pendidikan dimuat di media cetak dan online seperti Radar Bromo dan lainnya.

Moch. Moerad: Lahir di Banyuwangi, 7 Desember 1953. Pendidikan terakhir Doktor Ilmu Sosial Universitas Merdeka Malang. Saat ini menjadi dokter spesialis dan aktif mengajar ilmu Obstetri pada mahasiswa Akbid, STIKES Banyuwangi.

Meriah penghargaan dari Panglima Kodam XV Pattimura, atas pengabdianya pada tahun 1984, juga dari Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudoyono atas prestasi kerja sebagai PNS selama 25 tahun. Menikah dengan Ida Mariana, dikarunia empat anak; Teddy, Arief, Denna dan Thoriq.

H. M. Yahya: lahir di Kuala Kapuas, 03 April 1970. Sekarang sedang menyelesaikan studi S3 pada Prodi Doktoral Ilmu Sosial Universitas Merdeka Malang. Bekerja sebagai wiraswasta dan aktif di berbagai kegiatan ilmiah seperti mengajar, ceramah agama dan sosial di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah. Dikarunia enam anak; Fitriyani, Annisa Ramadhaniah, Habibi Baiquni Arrabat, Ayuhan Nafsul Mutmainnah, M. Amin Ilham Akbar, Ammar Alqisty.

Lorentius Goa: Lahir di Desa Dhereisa, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur 13 Oktober 1974. Lulusan S3 Ilmu Sosial Universitas Merdeka Malang. Saat ini menjadi staf dosen di Sekolah Tinggi Pastoral, Yayasan Institut Pastoral Indonesia (STP-IPI Malang). Aktif menulis di Jurnal SAPA (Jurnal Kateketik dan Pastoral) STP-IPI Malang. Selain itu penulis juga menjadi Moderator Bina Awal ALMA Putera Malang-Jawa Timur sejak tahun 2008. Penulis juga pernah menjadi Guru Agama Katolik di SMK Negeri 2 Kota Malang (2009-2016).

Teresia Noiman Derung: Lahir di Desa Munting, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, tanggal 10 Agustus 1978. Pendidikan terakhir Doktor Ilmu Sosial Universitas Merdeka Malang dengan konsentrasi Budaya dan Religi, lulus

tahun 2020. Saat ini menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Pastoral Yayasan Institut Pastoral Indonesia (STP-IPI) Malang. Pengalaman menulis di Jurnal SAPA setiap 6 bulan sekali, menulis di beberapa jurnal lokal lainnya maupun internasional, di antaranya yang berjudul “Interaction Between Caregivers and Children with Mildly Developmental Disabilities: Study of Social Behavior in the Saint Vincentius Orphanage Foundation Merauke Branch”.

Yossita Wisman: Lahir di Tumbang Samba Katingan, Kalimantan Tengah pada 10 April 1970. Menyelesaikan S1 di Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin (1996), S2 di Universitas Islam Nusantara Bandung (2003) dan S3 di Universitas Merdeka Malang tahun 2020. Pekerjaannya banyak di dunia pendidikan dengan mengajar di SMA Muhammadiyah 1 Tumbang Samba (1996-2003), mengajar di Universitas PGRI Palangka Raya (2003), mengajar di Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah dari tahun 2008 sampai sekarang. Selain itu, ia juga aktif di berbagai kegiatan sosial, di antaranya bidang pendidikan Himpunan Warga Katingan periode (2019-2024), bidang pendidikan Perhimpunan Warga Otdanum Provinsi Kalimantan Tengah periode (2019-2023), anggota Forum Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional, anggota Majelis Adat Dayak Nasional, anggota Perhimpunan Wanita KWOD Kalteng, dan anggota Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional.

Eko Agusrianto: Lahir di Jarai, Bengkulu 15 Agustus 1965. Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan S3 Ilmu Sosial di Universitas Merdeka Malang. Bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Bengkulu. Pernah menjadi

Kaur Perencanaan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Kasubbag TU Pimpinan Setda Provinsi Bengkulu, Kabag Protokol Setda Provinsi Bengkulu, Sekretaris Dispenda Provinsi Bengkulu, Kadis Perhubungan dan Kominfo provinsi Bengkulu, dan Plt Kadis Kominfosan Kota Bengkulu. Sebelumnya pernah bekerja sebagai Redaktur Sumatera Express, Kepala Biro Sumatera Express di Bengkulu dan Koresponden Koran Nasional Media Indonesia di Bengkulu. Saat ini aktif juga menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Chandra Dimuka Palembang, dosen luar biasa di Universitas Taman Siswa Palembang dan dosen luar biasa STIA Bengkulu.

Endang Handayani: Lahir di Kuala Kapuas, 01 Agustus 1982. Saat ini aktif mengajar di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan (FKIP) Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, ia juga aktif menjadi guru di TK Rona Raya, menjadi Kepala TK Rona Raya. Dan menjadi Sekretaris PAUD Gugus III "Pepaya" Palangka Raya pada tahun 2016-2018. Saat ini sedang menyelesaikan semester akhir di program S3 Ilmu Sosial Universitas Merdeka Malang. Pengalaman penelitian dan buku yang pernah ditulis di antaranya, "Upaya Meningkatkan Kemampuan Melafakan Bunyi Siswa Tahun Pelajaran 2008/ 2009, Madrasah Tsanawiyah Miftahul Jannah Palangka Raya Melalui Pembelajaran Kooperatif (2009)," "Keterpaduan Pembelajaran Antara Kelompok Bermain dengan Pendidikan dalam keluarga (Studi Kasus Pendidikan Anak Usia Dini di Kelompok Bermain "Al Qonita " Palangka Raya)," dan "Teori-teori Sosial dan Pertentangannya."

Anak Agung Putu Sugiantiningsih: Lahir di Kota Denpasar, Bali 7 Mei 1987. Menyelesaikan Doktor Ilmu Sosial di Universitas Merdeka Malang. Meraih Magister Administrasi Publik (MAP) di kampus yang sama. Sedangkan gelar sarjana Ilmu Pemerintahan diraih di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa. Saat ini aktif sebagai Koordinator Humas YKP Provinsi Bali. Menjadi Pembina UKM Kesenian di STISPOL Wira Bhakti, Bali. Aktif juga sebagai Sekretaris Umum Gerakan Wanita Sejahtera Kota Denpasar. Selain itu, aktif juga sebagai Sekretaris Umum Pemuda Panca Marga Provinsi Bali. Menjadi Ketua Umum Wirawati Catur Panca Kota Denpasar sampai tahun 2025. Aktivitas dalam dunia seni juga digelutinya, dengan menjadi pendiri Teater Wong Kutus SMA N Denpasar, teater hijau SMP N 7 Denpasar. Pernah menjadi mengajar puisi di SMPN 1 Denpasar, pernah mengajar teater dan mendirikan Teater di SD 4 Saraswati, SD 1 Saraswati dan SD 5 Saraswati. Pernah menjadi juri drama modern di Balai Bahasa Bali, juri puisi dan musikalisasi puisi di Universitas Udayana, dan pelatih di politeknik dan dramamusikal selama empat tahun.

Teori Sosial Empirik

ORIGINALITY REPORT

45%

SIMILARITY INDEX

45%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.usu.ac.id

Internet Source

10%

2

www.scribd.com

Internet Source

5%

3

text-id.123dok.com

Internet Source

3%

4

jurnal.umrah.ac.id

Internet Source

3%

5

fr.scribd.com

Internet Source

2%

6

core.ac.uk

Internet Source

2%

7

blog.ruangguru.com

Internet Source

1%

8

andrisetiyawahyudi-fkp.web.unair.ac.id

Internet Source

1%

9

documents.mx

Internet Source

1%

10

docplayer.info

Internet Source

1%

11	media.neliti.com Internet Source	1 %
12	sip-belajar.blogspot.com Internet Source	1 %
13	iwanputrakaltim.blogspot.com Internet Source	1 %
14	123dok.com Internet Source	1 %
15	universitas-ui.blogspot.com Internet Source	1 %
16	muhammadiffahsjadjaah.wordpress.com Internet Source	1 %
17	skripsi-konsultasi.blogspot.com Internet Source	1 %
18	es.scribd.com Internet Source	1 %
19	id.scribd.com Internet Source	1 %
20	thoriqs.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	zahralja69.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	www.herodes.site Internet Source	<1 %
23	www.dictio.id Internet Source	<1 %

24	id.123dok.com Internet Source	<1 %
25	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
26	www.nurkhoiri.com Internet Source	<1 %
27	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
28	khairulazharsaragih.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	Herry Purwanto. "Water Resources Mangement Community Based In Meeting The Needs of Housedhold in The Village Sejahtera District Sukadana District Kayong Utara", JURNAL BORNEO AKCAYA, 2016 Publication	<1 %
30	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
31	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
32	Binsar Antoni Hutabarat. "Evaluasi terhadap Rumusan RUU Permusikan", Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat, 2019 Publication	<1 %
33	Nailul Mona. "Kohesi pada Jaringan Sosial Bullying", Jurnal Komunikasi Indonesia, 2018 Publication	<1 %

34	suciatiliaoktaviani.wordpress.com Internet Source	<1 %
35	pascasarjana.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %
36	Muhammad Reza Hardianto, Isnaini Rodiyah. "Peran Pemerintah dalam Program Pembangunan Desa Wonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2018 Publication	<1 %
37	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
38	rindakarismatic.blogspot.com Internet Source	<1 %
39	fis.um.ac.id Internet Source	<1 %
40	daninur.blog.fisip.uns.ac.id Internet Source	<1 %
41	eprints.unmer.ac.id Internet Source	<1 %
42	qdoc.tips Internet Source	<1 %
43	irmaherlina33.blogspot.com Internet Source	<1 %
44	pengurusanpembelajaran13a.blogspot.com Internet Source	<1 %

45	adoc.pub Internet Source	<1 %
46	azriel-batigol.blogspot.com Internet Source	<1 %
47	Dewi Masitha. "POLA INTERAKSI EDUKATIF GURU-MURID TERHADAP PENINGKATAN AKHLAKUL KARIMAH: (Studi Multisitus di MIN Tolobali dan SDIT Insan Kamil Kota Bima)", eL-Muhbib: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar, 2017 Publication	<1 %
48	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
49	Naura Nabina Fairuzahida. "Perilaku Keluarga dalam Pengasuhan orang dengan Gangguan Jiwa di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar", Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery), 2017 Publication	<1 %
50	digilib.unisayogya.ac.id Internet Source	<1 %
51	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
52	nicofergiyono.blogspot.com Internet Source	<1 %
53	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %

54	Deta Marsela, Bayu Pradikto. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBERDAYAKAN SISKAMLING", Journal Of Lifelong Learning, 2021 Publication	<1 %
55	liahilyatulmasrifah.blogspot.com Internet Source	<1 %
56	psike.id Internet Source	<1 %
57	wkwk.lecture.ub.ac.id Internet Source	<1 %
58	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
59	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
60	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
61	www.sabersinfin.com Internet Source	<1 %
62	Dwi Susanti, Christantie Effendy, Sri Setiyarini. "GAMBARAN KEPUASAN PASIEN KANKER STADIUM LANJUT TERHADAP PERAWATAN PALIATIF DI RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA", MEDIA ILMU KESEHATAN, 2019 Publication	<1 %
63	journal.unair.ac.id Internet Source	

<1 %

64

kuliahtantan.blogspot.com

Internet Source

<1 %

65

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

<1 %

66

eprints.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

67

junsasta.blogspot.com

Internet Source

<1 %

68

myprofilfaisal.blogspot.com

Internet Source

<1 %

69

ejournal.umm.ac.id

Internet Source

<1 %

70

Agus Aan Hermawan, Yana Suharyana.
"IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN
DEMOKRATISASI DI PROVINSI BANTEN
(STUDI PRAKTIK POLITIK UANG PADA
PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 – 2020 DI
PROVINSI BANTEN)", Jurnal Kebijakan
Pembangunan Daerah, 2021

Publication

<1 %

71

issuu.com

Internet Source

<1 %

72

proceedings.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

muftiimam120798.blogspot.com

73	Internet Source	<1 %
74	www.jim.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
75	library.binus.ac.id Internet Source	<1 %
76	Khoirul Huda, Anjar Mukti Wibowo. "Interaksi Sosial Suku Samin Dengan Masyarakat Sekitar (Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Tahun 1990-2012)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2013 Publication	<1 %
77	belajarpsikologi.com Internet Source	<1 %
78	ragilsetyabudi.blogspot.com Internet Source	<1 %
79	spi.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
80	adoc.tips Internet Source	<1 %
81	www.sekolahan.co.id Internet Source	<1 %
82	Youdi ., Mamahit, Welson M. Wangke, Nortje M. Benu. "KAJIAN MODAL SOSIAL PADA KELOMPOK TANI DI DESA TUMANI	<1 %

KECAMATAN MAESAAN KABUPATEN
MINAHASA SELATAN (Kelompok Tani Esa
Waya dan Kelompok Tani Sinar Mas)", AGRI-
SOSIOEKONOMI, 2016

Publication

83	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
84	www.docstoc.com Internet Source	<1 %
85	konsultasiskripsi.com Internet Source	<1 %
86	ainikurniap.blogspot.com Internet Source	<1 %
87	atikamillatina.wordpress.com Internet Source	<1 %
88	m.bola.com Internet Source	<1 %
89	eprints.poltekkesjogja.ac.id Internet Source	<1 %
90	journal.lppmunindra.ac.id Internet Source	<1 %
91	ulashoim.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On

